

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA UTARA II
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SIBOLGA**



**LAPORAN KINERJA
TAHUN 2024**

DAFTAR ISI

LAPORAN KINERJA (LAKIN) TAHUN 2024.....	
DAFTAR ISI.....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	v
BAB I PENDAHULUAN	9
A. Latar Belakang	9
B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi.....	10
C. Sistematika Laporan.....	17
BAB II PERENCANAAN KINERJA	18
A. Perencanaan Strategis.....	18
B. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	22
A. Capaian Kinerja Organisasi	22
B. Realisasi Anggaran	146
C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	147
BAB IV PENUTUP	148
LAMPIRAN	149

Dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2024, dan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja (LAKIN) sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan/sasaran strategis instansi. Hal ini juga sejalan dengan Nota Dinas Direktorat Jenderal Pajak nomor ND-8/PJ/2025 tanggal 6 Januari 2025 hal Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024 di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Kepala Kantor Pelayanan Pajak diminta untuk menyusun dan menyampaikan secara lengkap:

1. LAKIN Tahun 2024;
2. Data achievement Direktorat Jenderal Pajak dan Kementerian Keuangan yang berskala nasional dan/atau internasional;
3. Progres tindak lanjut rekomendasi tindak lanjut pengelolaan kinerja dari hasil evaluasi KemenPAN-RB, Inspektorat Jenderal (Itjen), maupun Sekretariat Jenderal (Setjen);

sebagai pertanggungjawaban kinerja instansi berbasis Indikator Kinerja Utama (IKU) dan implementasi anggaran berbasis kinerja dalam pencapaian visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak

LAKIN merupakan instrumen penilaian kinerja dalam mencapai visi dan misi secara kuantitatif dan wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sibolga. Penyusunan LAKIN mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020–2024 sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020, serta Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020–2024 sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 389/PJ/2020.

Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sibolga dibuat dalam rangka pertanggungjawaban kinerja instansi berbasis Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja dalam pencapaian visi dan misi yang dibebankan kepada KPP Pratama Sibolga. LAKIN ini juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kerja secara kuantitatif dan sebagai wujud transparansi pelaksanaan tugas dan dalam rangka perwujudan *good government* secara berkesinambungan.

Sejalan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi, Direktorat Jenderal Pajak telah menerapkan metode *balanced scorecard* (BSC) sebagai alat manajemen kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan atas dasar penilaian indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan indikator

keberhasilan pencapaian sasaran-sasaran yang menjadi sasaran strategis (SS) sebagaimana telah ditetapkan pada Peta Strategis Direktorat Jenderal Pajak tahun 2024.

Rencana Strategis DJP 2020-2024 menjadi koridor yang menentukan arah dan tujuan yang jelas bagi KPP Pratama Sibolga dalam mencapai sasaran strategis yang ingin dicapai serta menjadi landasan utama dalam menentukan kebijakan dan strategi dalam mencapai tugas utama; yaitu mengumpulkan penerimaan pajak. Visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak dalam Renstra DJP 2020-2024 digunakan sebagai landasan penyusunan rencana kinerja tahunan (RKT) untuk periode 2020-2024 berupa rencana kerja operasional yang kuantitatif, yang pada intinya merupakan implementasi pelaksanaan tugas yang sangat strategis dalam pengelolaan administrasi perpajakan.

Dalam menjalankan Rencana Strategis tersebut, seluruh aparatur di KPP Pratama Sibolga telah disatukan dalam visi dan misi sebagaimana yang tertuang dalam Keputusan Kepala KPP Pratama Sibolga Nomor KEP-63/WPJ.26/KP.06/2021 tanggal 3 September 2021 tentang Visi, Misi, dan Moto KPP Pratama Sibolga, yaitu:

Visi	Misi
<p>“Menjadi Kantor Pelayanan Pajak yang Menghimpun Penerimaan Negara melalui Sistem Administrasi Perpajakan Modern yang Didukung oleh Sumber Daya Manusia yang Berintegritas, Profesional, dan Bersinergi demi Mencapai kesempurnaan”</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Kepatuhan pajak melalui edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum yang adil, efektif, dan berkualitas; 2. Meningkatkan mutu pelayanan yang berbasis teknologi modern untuk kemudahan pemenuhan kewajiban perpajakan; 3. Mengembangkan kompetensi Sumber Daya Manusia yang Berintegritas dan Profesional.

Selama tahun 2024 KPP Pratama Sibolga telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Peta Strategi Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2024 yang diterjemahkan dalam Kontrak Kinerja Kepala KPP Pratama Sibolga Tahun 2024 yang terdiri dari 20 Indikator Kinerja Utama (IKU). LAKIN KPP Pratama Sibolga akan menjabarkan perbandingan antara realisasi pencapaian IKU tahun 2024 dengan kontrak kinerja tahun 2024, serta beberapa kinerja lainnya yang telah dicapai oleh KPP Pratama Sibolga.

Pada tahun 2024 KPP Pratama Sibolga mampu meraih capaian nilai kinerja organisasi (NKO) sebesar 106,29%. Nilai ini disokong oleh 4 perspektif yaitu *Stakeholder Perspective* dengan indeks capaian 100,79%, *Customer Perspective* dengan indeks capaian 98,14%, *Internal Process*

Perspective dengan indeks capaian 109,30%, dan *Learning & Growth Perspective* dengan indeks capaian 116,41%.

Akhir kata, semoga LAKIN Tahun 2024 ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan transparan mengenai pertanggungjawaban atas pencapaian visi dan misi yang diamanatkan kepada KPP Pratama Sibolga sebagai pendorong peningkatan kinerja KPP Pratama Sibolga.

Sibolga, 31 Januari 2025

Kepala Kantor



Ditandatangani secara elektronik

Ricky Agustina Nugraha



RINGKASAN EKSEKUTIF

Sebagaimana diamanatkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2024, penerimaan dari sektor perpajakan menjadi penyumbang terbesar pendapatan negara. Pajak merupakan pengejawantahan praktik demokrasi dengan rakyat berperan serta dalam membiayai negara dan pemerintahannya secara khusus untuk mewujudkan pembangunan nasional yang mandiri dalam pembiayaannya. Sehubungan dengan hal tersebut, DJP baik dari tingkat pusat sampai dengan unit operasional dibawahnya harus berupaya untuk terus meningkatkan penerimaan pajak sekaligus memberikan pelayanan prima kepada wajib pajak. LAKIN ini diharapkan berfungsi sebagai kontrol/alat uji kinerja secara kuantitatif dalam rangka terwujudnya transparansi menuju terciptanya *good governance*. LAKIN ini merupakan alat yang digunakan sebagai umpan balik untuk meningkatkan kinerja semua unit di lingkungan KPP Pratama Sibolga secara bertahap dan berkesinambungan. Penyusunan LAKIN ini juga menjadi gambaran sasaran tugas KPP Pratama Sibolga yang diamanahkan tanggung jawab untuk merealisasikan penerimaan pajak sebesar Rp679.348.063.000,00. Dari target tersebut, KPP Pratama Sibolga mencapai realisasi penerimaan pajak sebesar Rp680.248.174.373 atau sebesar 100,13%. Pencapaian ini adalah berkat dukungan wajib pajak yang telah melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakannya, perangkat peraturan perundang-undangan perpajakan, penerapan kebijakan mulai dari tingkat pusat hingga kanwil, serta sinergi dan dukungan pihak-pihak lain yang terkait. Adapun Sasaran Strategis dan IKU Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sibolga pada Tahun 2024 ialah sebagai berikut.

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama
<i>Stakeholder Perspective</i>	
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas
<i>Customer Perspective</i>	
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)
<i>Internal Process Perspective</i>	
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa

6	Pengujian kepatuhan material yang efektif
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan
6c-N	Efektivitas pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu
7	Penegakan hukum yang efektif
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan
8	Data dan informasi yang berkualitas
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP
Learning & Growth Perspective	
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran

Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sibolga Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 tercapai dengan baik. IKU Kemenkeu-Three Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sibolga yaitu sebanyak 18 IKU berstatus hijau, 1 IKU berstatus kuning dan 1 IKU berstatus merah. Secara rinci data target dan realisasi IKU Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sibolga dapat disajikan sebagaimana tabel berikut:

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Polarisasi	V/C	Bobot IKU	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian
Stakeholder Perspective							30,00%	100,79
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							100,79
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	100,13%	Max	E/L	26%	57,78%	100,13
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00	101,70	Max	P/L	19%	42,22%	101,70
Customer Perspective							20,00%	98,14
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							96,21
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	100,13%	Max	E/L	26%	57,78%	100,13
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	90,83%	Max	P/L	19%	42,22%	90,83
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							100,08
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	100,08%	Max	E/M	21%	100,00%	100,08
Internal Process Perspective							25,00%	109,30
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif							114,42

4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%	88,80%	Max	E/M	21%	50,00%	120,00
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100,00%	108,83%	Max	E/M	21%	50,00%	108,83
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif							120,00
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%	111,60%	Max	P/M	14%	100,00%	120,00
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif							116,45
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	118,44%	Max	P/M	14%	33,33%	118,44
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14%	33,33%	120,00
6c-N	Efektivitas pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00%	110,92%	Max	P/M	14%	33,33%	110,92
7	Penegakan hukum yang efektif							75,64
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100,00%	118,09%	Max	P/M	14%	26,92%	118,09
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75,00%	102,56%	Max	P/L	19%	36,54%	120,00
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%	0,00%	Max	P/L	19%	36,54%	0,00
8	Data dan informasi yang berkualitas							120,00
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14%	42,42%	120,00
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55,00%	74,59%	Max	P/L	19%	57,58%	120,00
<i>Learning & Growth Perspective</i>							25,00%	116,41
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							112,82
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100,00	116,91	Max	P/M	14%	33,33%	116,91
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00	95,15	Max	P/M	14%	33,33%	111,94
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00	98,65	Max	P/M	14%	33,33%	109,61
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel		0,00%					120,00
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00	120,00	Max	P/M	14%	100,00%	120,00
Nilai Kinerja Organisasi								106,29

Pencapaian Sasaran Strategis Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sibolga sudah baik. Perbaikan secara terus menerus akan dilakukan agar penerimaan pajak dapat lebih optimal yang meliputi peningkatan kuantitas dan kualitas SDM, pengembangan teknologi informasi administrasi modern berbasis komputer, serta perbaikan sarana dan prasarana kantor guna mendukung pelayanan prima kepada Wajib Pajak. Direktorat Jenderal Pajak bersama KPP Pratama Sibolga terus andil dalam melakukan pembaharuan sistem pelayanan dengan menggunakan pengembangan jaringan dan teknologi informasi berbasis komputer, baik atas pelayanan daring via website pajak seperti <https://ereg.pajak.go.id/login> untuk melakukan akses layanan perpajakan, *whatsapp* dan *email* kantor untuk memberikan layanan konsultasi dan/atau edukasi, dan petugas

penerima telepon yang siaga untuk melayani kebutuhan wajib pajak terkait perpajakan. KPP Pratama Sibolga terus berusaha untuk mengembangkan berbagai inovasi kreatif yang dapat mendukung tercapainya pelayanan prima, membuka diri terhadap cara kerja baru, dan senantiasa meningkatkan kapasitas sumber daya manusianya.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai pilar utama penerimaan negara, kontribusi penerimaan pajak terhadap pendapatan negara dalam APBN semakin meningkat dari tahun ke tahun. Dalam UU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 Penerimaan Perpajakan direncanakan sekitar Rp2.309.86 Triliun atau 82.43% dari total rencana pendapatan negara sebesar Rp2.802,29 Triliun. Target penerimaan pajak tersebut hanya akan dapat terwujud jika seluruh elemen Direktorat Jenderal Pajak bersama-sama dengan wajib pajak menyadari akan arti pentingnya penerimaan pajak untuk keperluan negara sehingga kepatuhan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan dapat tercapai.

Dalam mendukung pencapaian target nasional, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sibolga diberikan tugas untuk menghimpun penerimaan pajak sebesar Rp679.348.063.000, sebagai bagian dari total target Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara II yang mencapai Rp7.991.704.324.000. Sebagai organisasi strategis di bawah naungan Direktorat Jenderal Pajak, KPP Pratama Sibolga bertanggung jawab penuh atas pengelolaan pajak di wilayahnya, termasuk memastikan tercapainya target penerimaan pajak melalui peningkatan kepatuhan dan pelayanan wajib pajak.

Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja KPP Pratama Sibolga pada tahun anggaran 2024 yang disusun dengan berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Jo. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Jo. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini menjelaskan terkait tantangan dan realisasinya yang digambarkan dari hasil nilai kinerja organisasi. Adapun tantangan strategis yang kerap kali dihadapi, seperti digitalisasi ekonomi, perkembangan teknologi, Implementasi CORETAX, fluktuasi perekonomian, dan lain sebagainya. Dengan dasar dan permasalahan tersebut, laporan kinerja ini diharapkan dapat menjadi alat evaluasi dan perencanaan yang mendukung upaya pencapaian target penerimaan pajak serta perbaikan pelayanan perpajakan yang lebih efektif dan efisien di masa mendatang.

B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Pasal 58 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Pratama mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum wajib pajak di bidang pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, pajak tidak langsung lainnya, dan pajak bumi dan bangunan, dan melaksanakan penguasaan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 59 Peraturan Menteri Keuangan tersebut, Kantor Pelayanan Pajak Pratama mempunyai fungsi sebagai berikut.

- a. Analisis, penjabaran, dan pencapaian target penerimaan pajak.
- b. Penguasaan data dan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenang KPP.
- c. Pelayanan, edukasi, pendaftaran, dan pengelolaan pelaporan wajib pajak.
- d. Pendaftaran wajib pajak, objek pajak, dan penghapusan nomor pokok wajib pajak.
- e. Pengukuhan dan pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak.
- f. Pemberian dan/atau penghapusan nomor objek pajak secara jabatan.
- g. Penyelesaian tindak lanjut pengajuan/pencabutan permohonan wajib pajak maupun masyarakat.
- h. Pengawasan, pemeriksaan, penilaian dan penagihan pajak.
- i. Pendataan, pemetaan wajib pajak dan objek pajak, dan pengenaan.
- j. Penetapan, penerbitan, dan/atau pembetulan produk hukum dan produk layanan perpajakan.
- k. Pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak.
- l. Penjaminan kualitas data hasil perekaman dan hasil identifikasi data internal dan eksternal.
- m. Pemutakhiran basis data perpajakan.
- n. Pengurangan pajak bumi dan bangunan.
- o. Pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko.
- p. Pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal.
- q. Penatausahaan dan pengelolaan piutang pajak.
- r. Pelaksanaan tindak lanjut kerja sama perpajakan.
- s. Pengelolaan dokumen perpajakan dan nonperpajakan.
- t. Pelaksanaan administrasi kantor.

Dalam rangka merealisasikan target penerimaan pajak dimaksud dilakukan berbagai upaya berupa peningkatan etika dan moral aparat dengan memegang teguh nilai-nilai Kementerian Keuangan, peningkatan kompetensi dan kedisiplinan pegawai, penyempurnaan bank data, penyusunan strategi taktis yang tepat, peningkatan kerja sama dan komunikasi

yang baik dengan pihak internal dan eksternal, serta penggunaan sistem teknologi informasi secara efektif.

Berdasarkan Pasal 60 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sibolga merupakan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kelompok II yang terdiri atas:

a. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal

Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal di bawah kepemimpinan Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal, mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, pengelolaan kinerja, melakukan pemantauan pengendalian intern, pengujian kepatuhan dan manajemen risiko, internalisasi kepatuhan, penyusunan laporan, pengelolaan dokumen nonperpajakan, serta dukungan teknis pelaksanaan tugas kantor.

b. Seksi Penjaminan Kualitas Data

Seksi Penjaminan Kualitas Data di bawah kepemimpinan Kepala Seksi Penjaminan Kualitas Data, mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka penjaminan kualitas data melalui pencarian, pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, pengelolaan dan tindak lanjut kerja sama perpajakan, penjaminan kualitas data yang berkaitan dengan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi, penerusan data hasil penjaminan kualitas, tindak lanjut atas distribusi data, penatausahaan dokumen berkaitan dengan pembangunan data, dan pelaksanaan dukungan teknis pengolahan data, serta melakukan penyusunan monografi fiskal dan melakukan pengelolaan administrasi produk hukum dan produk pengolahan data perpajakan.

c. Seksi Pelayanan

Seksi Pelayanan di bawah kepemimpinan Kepala Seksi Pelayanan, mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pemberian layanan perpajakan yang berkualitas dan memastikan Wajib Pajak memahami hak dan kewajiban perpajakannya melalui pelaksanaan edukasi dan konsultasi perpajakan, pengelolaan registrasi perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, penerimaan, tindak lanjut, dan proses penyelesaian permohonan, saran dan/ atau pengaduan, dan surat lainnya dari Wajib Pajak atau masyarakat, pemenuhan hak Wajib Pajak, serta melakukan penatausahaan dan penyimpanan dokumen perpajakan, dan melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk layanan perpajakan.

d. Seksi Pemeriksaan, Penilaian dan Penagihan

Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan di bawah kepemimpinan Kepala Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan, mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pencapaian target penerimaan pajak melalui pelaksanaan pemeriksaan, pelaksanaan penilaian properti, bisnis, dan aset tak berwujud, pelaksanaan tindakan penagihan, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, serta melakukan penatausahaan piutang pajak, dan melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pemeriksaan, penilaian, dan penagihan.

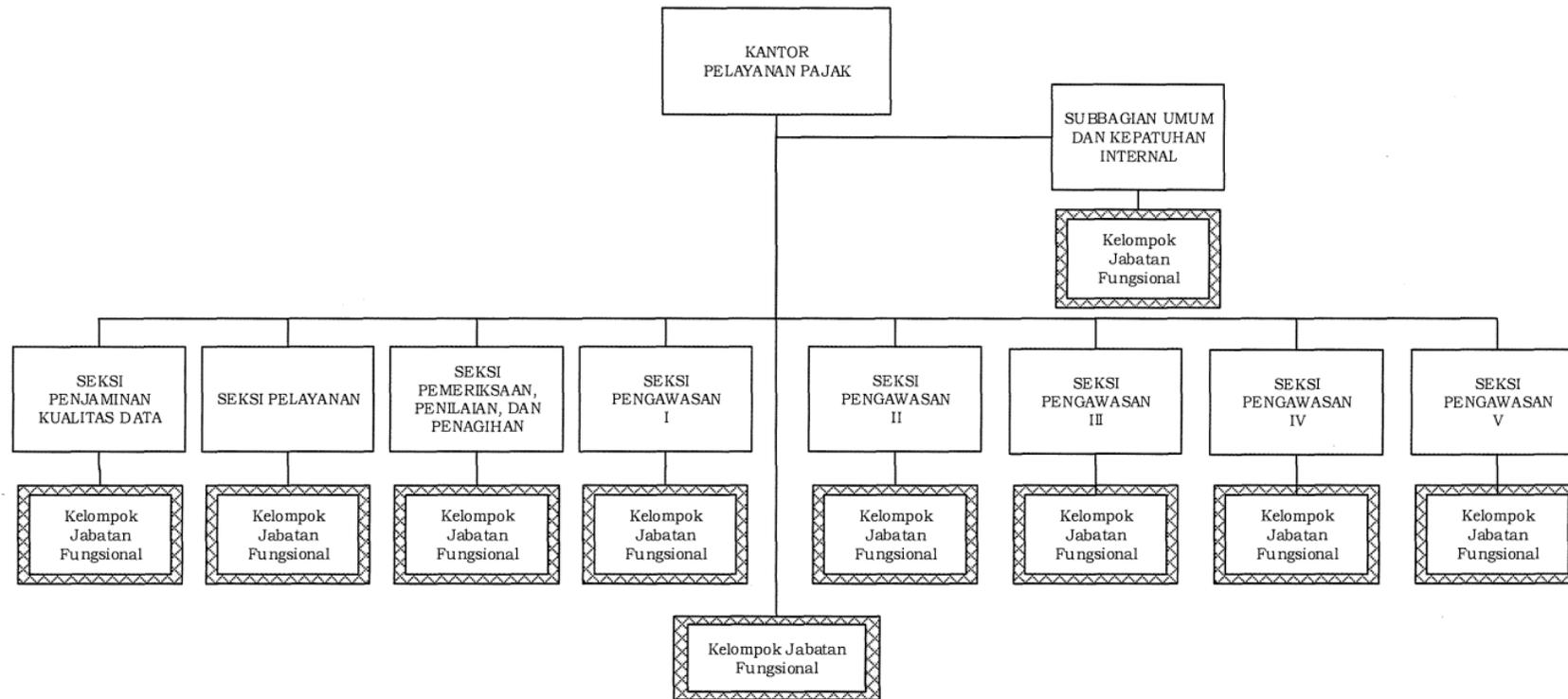
e. Seksi Pengawasan I, II, III, IV, dan V

Seksi Pengawasan I, Seksi Pengawasan II, Seksi Pengawasan III, Seksi Pengawasan IV, Seksi Pengawasan V, dan Seksi Pengawasan VI di bawah kepemimpinan Kepala Seksi Pengawasan, masing-masing mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka memastikan Wajib Pajak mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut intensifikasi dan ekstensifikasi berbasis pendataan dan pemetaan (mapping) subjek dan objek pajak, penguasaan wilayah, pengamatan potensi pajak dan penguasaan informasi, pencarian, pengumpulan, pengolahan, penelitian, analisis, pemutakhiran, dan tindak lanjut data perpajakan, pengawasan dan pengendalian mutu kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, imbauan dan konseling kepada Wajib Pajak, pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak, serta melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pengawasan perpajakan.

f. Kelompok jabatan fungsional

Terdiri atas Supervisor, Ketua Tim, dan Anggota Tim.

BAGAN ORGANISASI
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA (KELOMPOK II)



Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sibolga yang terletak di Jalan Ade Irma Suryani No.17, Kelurahan Simare-Mare, Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga merupakan salah satu Kantor Pelayanan Pajak di wilayah Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara II yang mempunyai wilayah kerja sebagai berikut:

- a. Kotamadya Sibolga;
- b. Kabupaten Tapanuli Tengah;
- c. Kotamadya Gunungsitoli;
- d. Kabupaten Nias;
- e. Kabupaten Nias Utara;
- f. Kabupaten Nias Barat;
- g. Kabupaten Nias Selatan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 tanggal 18 November 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Pratama mempunyai tugas mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan Pajak Bumi dan Bangunan, serta melaksanakan penguasaan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas, Kantor Pelayanan Pajak Pratama menyelenggarakan fungsi:

- a. analisis, penjabaran, dan pencapaian target penerimaan pajak;
- b. penguasaan data dan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenang KPP;
- c. pelayanan, edukasi, pendaftaran, dan pengelolaan pelaporan Wajib Pajak;
- d. pendaftaran Wajib Pajak, objek pajak, dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;
- e. pengukuhan dan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
- f. pemberian dan/atau penghapusan Nomor Objek Pajak secara jabatan;
- g. penyelesaian tindak lanjut pengajuan/pencabutan permohonan Wajib Pajak maupun masyarakat;
- h. pengawasan, pemeriksaan, penilaian, dan penagihan pajak;
- i. pendataan, pemetaan Wajib Pajak dan objek pajak, dan pengenaan;
- j. penetapan, penerbitan, dan/atau pembetulan produk hukum dan produk layanan perpajakan;
- k. pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak;
- l. penjaminan kualitas data hasil perekaman dan hasil identifikasi data internal dan eksternal;
- m. pemutakhiran basis data perpajakan;
- n. pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan;
- o. pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko;
- p. pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal;
- q. penatausahaan dan pengelolaan piutang pajak;
- r. pelaksanaan tindak lanjut kerjasama perpajakan;

- s. pengelolaan dokumen perpajakan dan non perpajakan; dan
- t. pelaksanaan administrasi kantor.

Adapun penjelasan sumber daya manusia KPP Pratama Sibolga adalah sebagai berikut.

1. Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah Pegawai
1	Laki-laki	59
2	Perempuan	35
Jumlah		94

2. Berdasarkan Strata/Tingkat Pendidikan

No	Strata Pendidikan	Jumlah Pegawai
1	Strata 2 (S2)	11
2	Strata 1(S1)/Diploma IV	37
3	Diploma III Sederajat	25
4	Diploma I Sederajat	21
Jumlah		94

3. Berdasarkan Agama

No	Agama	Jumlah Pegawai
1	Islam	43
2	Katholik	4
3	Kristen Protestan	47
Jumlah		94

4. Berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	Jumlah Pegawai
1	Kepala Kantor	1
2	Kepala Subbag	1
3	Kepala Seksi	8
4	Kepala KP2KP	2
5	Sekretaris	1
6	Bendaharawan	1
7	Juru Sita	2
8	Account Representative	33
No	Jabatan	Jumlah Pegawai
9	Penyuluh Pajak Ahli Pertama	1
10	Asisten Penyuluh Pajak Mahir	1
11	Asisten Penyuluh Pajak Terampil	1

12	Pemeriksa Pajak Muda	1
13	Pemeriksa Pajak Pertama	1
14	Pemeriksa Pajak Pelaksana Lanjutan	1
15	Pemeriksa Pajak Pelaksana	2
16	Pelaksana	37
Jumlah		94

5. Berdasarkan Seksi/Bagian

No	Seksi/Bagian	Jumlah
1	Kepala Kantor	1
2	Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal	10
3	Seksi Penjaminan Kualitas Data	4
4	Seksi Pelayanan	14
5	Seksi Pemeriksaan, Penilaian dan Penagihan	7
6	Seksi Pengawasan I	9
7	Seksi Pengawasan II	9
8	Seksi Pengawasan III	9
9	Seksi Pengawasan IV	8
10	Seksi Pengawasan V	7
11	Fungsional Pemeriksa Pajak	5
12	KP2KP	11
Jumlah		94

C. Sistematika Laporan

Secara sistematis laporan ini disusun sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issues*) yang sedang dihadapi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini disajikan uraian tentang amanat yang tercantum dalam renstra, prioritas nasional maupun dalam renja/RKA tahun 2024 dan penjelasan atas ringkasan/ikhtisar PK tahun 2024.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada Bab ini disajikan penjelasan tentang capaian kinerja organisasi dari setiap sasaran strategis, realisasi anggaran yang digunakan dalam rangka mewujudkan kinerja organisasi, efisiensi penggunaan sumber daya yang telah dilakukan, penghargaan yang diterima selama 2024, dan evaluasi internal untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja serta langkah-langkah perbaikan.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

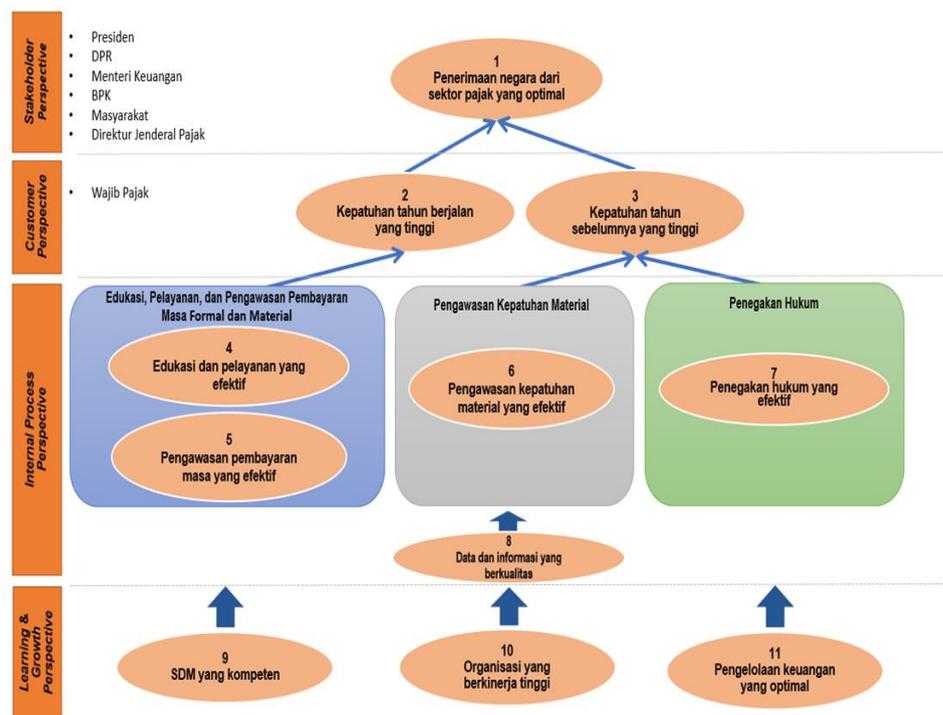
A. Perencanaan Strategis

Dalam rangka menuntaskan amanat Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK-387/KM.1/2018 tentang Uraian Jabatan Struktural Instansi Vertikal dan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan DJP, Direktur Jenderal Pajak mendelegasikan sebagian kewenangannya untuk melaksanakan tugas dan fungsi DJP di daerah yang salah satunya kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Sibolga, dimana pada tahun 2024 KPP Pratama Sibolga menerima mandat target penerimaan pajak sebesar Rp679.348.063.000. Adapun langkah-langkah dalam melaksanakan pemenuhan mandat tersebut adalah dengan menjalankan visi Direktorat Jenderal Pajak yaitu "Menjadi Mitra Tepercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: "Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan", dan melaksanakan 3 (tiga) misi Direktorat Jenderal Pajak yaitu: (1) merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia, (2) meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan terstandardisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil; dan, (3) mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya organisasi yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas, profesional, dan bermotivasi.

Dalam rangka pemenuhan tersebut, KPP Pratama Sibolga dibawah naungan Direktorat Jenderal Pajak telah menetapkan sasaran strategis yang ingin dicapai sepanjang Tahun 2020 - 2024 yang dituangkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-389/PJ/2020 tanggal 31 Agustus 2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020 – 2024. Adapun rencana strategis yang dimaksud ialah pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan, penerimaan negara yang optimal, dan birokrasi dan layanan public yang agile, efektif, dan efisien. Sejalan dengan rencana strategis tersebut juga turut ditetapkan sebanyak 5 (lima) sasaran strategis yang menggambarkan kondisi yang ingin dicapai Direktorat Jenderal Pajak juga KPP Pratama Sibolga yaitu, kebijakan fiskal yang ekspansif dan konsolidatif, penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal, organisasi dan sdm yang optimal, sistem informasi yang andal dan terintegrasi, dan pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah.

B. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja (PK) adalah dokumen formal yang berisi kesepakatan antara pimpinan dan pegawai atau lembaga pemerintahan mengenai target kinerja yang harus dicapai dalam periode tertentu yang digunakan dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010. Adapun dokumen Penetapan Kinerja/perjanjian kinerja disajikan dan sebuah data yang berisi pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Perjanjian Kinerja tahun 2023 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sibolga didasarkan pada Sasaran Strategis (SS), Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai indikator kinerja, dan implementasi Anggaran Berbasis Kinerja mengacu pada Renstra DJP Tahun 2020-2024 dan Cetak Biru Program Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan tahun 2014-2025. Berikut merupakan peta strategi KPP Pratama Sibolga.



Peta strategi KPP Pratama Sibolga

Perjanjian kinerja di lingkungan KPP Pratama Sibolga telah dilakukan dengan menggunakan metode *balanced scorecard (BSC)*. Metode *BSC* digunakan sebagai instrumen perencanaan kinerja di lingkungan KPP Pratama Sibolga yang dituangkan menjadi sasaran strategis. Untuk menjamin tercapainya sasaran dan target yang dimaksud secara optimal dan tepat waktu, visi dan misi KPP Pratama Sibolga harus menjadi acuan sekaligus landasan penyusunan strategi. Dari visi dan misi tersebut kemudian dirumuskan sasaran strategis (SS).

Tujuan strategis ini dipetakan dalam peta strategi. Terdapat 4 (empat) ukuran yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan *balanced scorecard*, yaitu *stakeholders perspective*, *customers perspective*, *internal process perspective*, dan *learning and growth perspective*. Keempat ukuran tersebut tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam 10 Sasaran Strategis dan 20 indikator kinerja utama. Berikut merupakan rincian dari Sasaran Strategi dan Indikator Kinerja Utama yang dimaksud:

NO	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	01a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak	100%
		01b-CP Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	02a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%
		02b-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	03a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif	04a-CP Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%
		04b-N Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	05a-CP Persentase pengawasan pembayaran masa	90%
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif	06a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%
		06b-N Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%
		06c-N Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%
7	Penegakan hukum Yang efektif	07a-CP Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%
		07b-CP Tingkat efektivitas penagihan	75%
		07c-N Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%

NO	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
8	Data dan informasi yang berkualitas	08a-CP Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	100%
		08b-CP Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55%
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	09a-N Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100
		09b-N Indeks Penilaian Integritas Unit	85
		09c-N Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	10a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100

Pada intinya penyusunan IKU/IKI di seluruh unit DJP disusun oleh Sekretariat Direktorat Jenderal selaku KKO-One dengan melibatkan Direktorat terkait pengampu IKU/IKI. Dalam pembuatan Peta Strategi, SS, dan IKU/IKI KPDJP mempertimbangkan Renstra, Renja, RPJMN, arahan Menteri, dan juga masukan dari Unit Vertikal. Keterlibatan Unit yang dimaksud dalam penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 diantaranya mengirimkan Nota Dinas Usul IKU/IKI Baru, Hapus, maupun Perbaikan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Dalam Laporan Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Sibolga Tahun 2024, realisasi Nilai Kinerja Organisasi berikut di bawah adalah realisasi mulai tanggal 1 Januari 2024 s.d. 31 Desember 2024 (sebelum dilakukan validasi). Dari total 20 IKU, 18 IKU telah mencapai target dengan indeks capaian hijau, 2 IKU belum mencapai target yang ditetapkan dengan indeks capaian kuning dan merah. Hal ini adalah berkat sinergi dan semangat kerja seluruh elemen KPP Pratama Sibolga yang terus memberikan kinerja prima. Untuk menjabarkan keberhasilan tersebut, berikut disajikan ringkasan data capaian masing-masing IKU berdasarkan sasaran strategis yang telah dicapai KPP Pratama Sibolga sampai dengan akhir tahun anggaran 2024.

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Polarisasi	V/C	Bobot IKU	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian
<i>Stakeholder Perspective</i>							30,00%	100,79
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							100,79
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	100,13%	Max	E/L	26%	57,78%	100,13
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00	101,70	Max	P/L	19%	42,22%	101,70
<i>Customer Perspective</i>							20,00%	98,14
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							96,21
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	100,13%	Max	E/L	26%	57,78%	100,13
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	90,83%	Max	P/L	19%	42,22%	90,83
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							100,08
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	100,08%	Max	E/M	21%	100,00%	100,08
<i>Internal Process Perspective</i>							25,00%	109,30
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif							114,42
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%	88,80%	Max	E/M	21%	50,00%	120,00
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100,00%	108,83%	Max	E/M	21%	50,00%	108,83
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif							120,00
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%	111,60%	Max	P/M	14%	100,00%	120,00
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif							116,45
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	118,44%	Max	P/M	14%	33,33%	118,44

6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14%	33,33%	120,00
6c-N	Efektivitas pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00%	110,92%	Max	P/M	14%	33,33%	110,92
7	Penegakan hukum yang efektif							75,64
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100,00%	118,09%	Max	P/M	14%	26,92%	118,09
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75,00%	102,56%	Max	P/L	19%	36,54%	120,00
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%	0,00%	Max	P/L	19%	36,54%	0,00
8	Data dan informasi yang berkualitas							120,00
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14%	42,42%	120,00
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55,00%	74,59%	Max	P/L	19%	57,58%	120,00
Learning & Growth Perspective							25,00%	116,41
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							112,82
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100,00	116,91	Max	P/M	14%	33,33%	116,91
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00	95,15	Max	P/M	14%	33,33%	111,94
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00	98,65	Max	P/M	14%	33,33%	109,61
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel		0,00%					120,00
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00	120,00	Max	P/M	14%	100,00%	120,00
Nilai Kinerja Organisasi								106,29

Untuk penyusunan LAKIN KPP Pratama Sibolga Tahun 2024 terdapat 20 IKU yang dianalisis sebagai berikut:

▪ **IKU 1a-CP : Persentase realisasi penerimaan pajak**

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
Target	15%	40%	40%	70%	70%	100%	100%
Realisasi	14.26%	33.26%	33.26%	57%	57%	100.13%	100.13%
Capaian	95.07	83.15	83.15	81.51	81.51	100.13	100.13

Sumber : Laporan Penjelasan Progress IKU Triwulan IV 2024 KPP Pratama Sibolga

a. Deskripsi Sasaran Strategis

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan.

b. Definisi IKU

Realisasi penerimaan pajak adalah jumlah realisasi penerimaan pajak bruto dikurangi pembayaran Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak (SPMKP), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB), dan Surat Perintah Membayar Pengembalian Pendapatan (SPMPP).

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim.

Target penerimaan pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan target penerimaan pajak yang tercantum dalam UU APBN/APBN-P, peraturan perundang-undangan lainnya tentang APBN, atau besaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Target penerimaan pajak Kanwil merupakan target penerimaan pajak DJP yang didistribusikan ke masing-masing Kanwil DJP, yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.

Target penerimaan pajak KPP merupakan target penerimaan pajak Kanwil DJP yang didistribusikan ke masing-masing KPP yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Kanwil DJP yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per KPP.

Catatan: Penerimaan WP dari awal tahun s.d. pindah diadministrasikan di KPP lama, sedangkan penerimaan WP dari SK pindah s.d. akhir tahun diadministrasikan di KPP baru.

c. Formula IKU

$$\frac{\text{Realisasi penerimaan pajak}}{\text{Target penerimaan pajak}} \times 100\%$$

d. Realisasi IKU

URAIAN	TARGET	PENERIMAAN TAHUN BERJALAN								NETTO LALU	PENCAPAIAN	PERTUMBUHAN
		MPN	DOLLAR	SPM	PIBK KIRIM	PIBK TERIMA	BRUTO	SPMKP	NETTO			
A. Pajak Penghasilan	351.483.320.000	300.949.558.059	0	26.949.900.075	-2.439.340.420.000	973.272.888.000	326.464.390.402	696.941.885	325.747.428.717	303.342.449.293	82.70	7.39
1. PPh NON NEGAS	351.483.320.000	300.949.558.059	0	26.949.900.075	-2.439.340.420.000	973.272.888.000	326.464.390.402	696.941.885	325.747.428.717	303.342.346.793	82.70	7.39
1.1 PPh Pasal 21	174.012.674.000	155.171.809.318	0	22.191.380.771	-310.024.251.000	326.078.250.000	177.378.644.088	0	177.378.644.088	138.659.300.543	101.93	27.92
1.2 PPh Pasal 22	41.945.796.000	29.227.454.652	0	190.867.950	-1.614.632.032.000	54.456.720.000	27.838.157.290	0	27.838.157.290	31.342.461.220	66.38	-11.12
1.3 PPh Pasal 22 Impor	8.750.240.000	2.501.745.947	0	0	0	0	2.501.745.947	0	2.501.745.947	3.813.887.425	28.39	-34.40
1.4 PPh Pasal 23	14.487.140.000	17.608.800.694	0	858.874.303	-52.745.661.000	29.458.012.000	18.444.187.848	0	18.444.187.848	15.175.047.026	123.89	21.54
1.5 PPh Pasal 25-29 OP	3.933.214.000	3.766.964.535	0	188.921	-10.181.435.000	68.934.953.000	3.825.917.004	56.471.182	3.769.445.822	3.335.705.007	95.84	13.00
1.6 PPh Pasal 25-29 Badan	40.475.858.000	48.783.776.913	0	22.409.677	-106.923.026.000	72.530.797.000	48.771.794.361	640.490.703	48.131.303.658	62.317.096.851	118.91	-22.76
1.7 PPh Pasal 26	36.884.000	331.534.834	0	0	-3.707.847.000	0	327.826.947	0	327.826.947	181.467.447	888.74	80.45
1.8 PPh Final	47.341.472.000	49.373.338.031	0	3.697.397.923	-340.556.148.000	421.814.156.000	47.351.991.962	0	47.351.991.962	48.556.581.274	70.32	-2.44
1.9 PPh Pajak Luar Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
1.10 PPh Non Negas Lainnya	0	4.135.135	0	0	0	0	4.135.135	0	4.135.135	0	0.00	0.00
2. PPh NEGAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	302.500	0.00	-100.00
2.1 PPh 3.Menyak Bumi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172.500	0.00	-100.00
2.2 PPh Gas Alam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0.00	-100.00
2.3 PPh 3.Menyak Bumi Lainnya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2.4 PPh Gas Alam Lainnya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
B. PPh dan PPhBNI	303.615.022.000	309.380.779.177	0	25.338.250.650	-1.637.158.561.000	1.665.073.159.000	334.766.944.425	5.230.024.151	329.536.920.274	312.516.123.021	104.54	5.45
1. PPh Dalam Negeri	301.443.584.000	307.239.420.177	0	25.338.306.178	-1.589.205.787.000	1.665.073.159.000	332.761.593.727	5.230.024.151	327.531.569.576	311.309.992.192	104.65	5.21
2. PPh Impor	1.244.927.000	1.806.554.344	0	0	0	0	1.806.554.344	0	1.806.554.344	874.105.084	142.82	106.67
3. PPhBNI Dalam Negeri	835.821.000	315.402.987	0	1.944.472	-47.952.774.000	0	169.394.683	0	169.394.683	269.347.880	20.27	-37.23
4. PPhBNI Impor	0	6.757.786	0	0	0	0	6.757.786	0	6.757.786	12.232.920	0.00	-44.72
5. PPh Lainnya	70.690.000	22.644.083	0	0	0	0	22.644.083	0	22.644.083	49.953.243	33.03	-34.67
6. PPhBNI Lainnya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

Sumber : Aplikasi Portal DJP tanggal 15 Januari 2025

Realisasi penerimaan pajak sampai dengan akhir Desember 2024 tercatat sebesar Rp680.248.174.373 dengan capaian sebesar 100,13% dari target dan realisasi yang ditetapkan sesuai Nota Dinas Kepala Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara II Nomor ND-8/WPJ.26/2025 tanggal 3 Januari 2025 tentang Penyampaian Revisi Perubahan Ketiga Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan PPM dan Kegiatan PKM per KPP Tahun 2024.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realiasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak	97.68%	96.69%	125.32%	104.50%	100,13%

Sumber : Laporan Nilai Kinerja Organisasi tahun 2020 s.d. tahun 2024 dan Aplikasi Portal DJP

Realisasi capaian IKU Persentase realisasi penerimaan pajak mengalami kenaikan dan penurunan yang signifikan selama 5 tahun terakhir. Realisasi penerimaan pajak tahun 2024 telah mencapai target yang ditetapkan, namun mengalami penurunan selama 2 tahun terakhir. Penurunan penerimaan pajak yang signifikan ini dipengaruhi dengan adanya implementasi UU HPP bagi WP OP UMKM dan mayoritas jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan di wilayah kerja KPP Pratama Sibolga didominasi oleh WP OP UMKM.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase realisasi penerimaan pajak	100%	100%	100%	100,13%

Sumber : Aplikasi Portal DJP tanggal 15 Januari 2025

Tercapainya target IKU Persentase realisasi penerimaan pajak menggambarkan pemulihan aktivitas ekonomi yang semakin menguat. Beberapa hal yang juga melatarbelakangi membaiknya kinerja penerimaan sampai dengan akhir Desember 2024 diantaranya:

- a) Mayoritas sektor-sektor usaha tumbuh positif;
- b) Reformasi fiskal sebagai implementasi UU HPP berupa pelaksanaan PPS, penyesuaian tarif PPN, penerapan pajak kripto, pajak fintech-P2P lending, serta PPN PMSE;
- c) Berakhirnya waktu pemberian fasilitas pada sebagian besar sektor; dan
- d) Pertumbuhan yang positif secara kumulatif pada kinerja PPM dan PKM.

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak	100%	100%	100,13%

Sumber : Aplikasi Portal DJP tanggal 15 Januari 2025

Penerimaan pajak sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan, hal ini diiringi dengan kinerja jenis pajak utama yang mengalami pertumbuhan positif. Membaiknya kinerja PPN Dalam Negeri merupakan salah satu dampak dari kasus Covid-19 di Indonesia yang semakin terkendali, meningkatnya konsumsi masyarakat, dan pemulihan kegiatan ekonomi.

Implementasi UU HPP berupa penyesuaian tarif PPN yang semula tarifnya 10% menjadi 11% ikut mendorong kinerja PPN Dalam Negeri. Sementara itu, membaiknya kinerja PPh Migas dan PPh Non Migas secara umum dipengaruhi oleh peningkatan aktivitas ekonomi, kenaikan harga komoditas, dan bauran kebijakan.

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- a. Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi penerimaan pajak. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- a) Melakukan sosialisasi Kepatuhan Perpajakan kepada Bendahara Instansi Pemerintah Daerah/Desa
- b) Melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan oleh Komite Kepatuhan secara periodik
- c) Melakukan pengawasan melalui Daftar Transaksi Harian (DTH) dan Rincian Transaksi Harian (RTH) kepada masing-masing Pemda di wilayah kerja KPP Pratama Sibolga
- d) Pembuatan raport desa secara triwulanan
- e) Optimalisasi pemanfaatan data internal dan eksternal sesuai dengan prioritas untuk penggalian potensi selain Daftar Prioritas Pengawasan (DPP)
- f) Optimalisasi penyelesaian SP2DK DPP dan SP2DK Outstanding (meminta bantuan kanwil terkait SP2DK Outstanding potensial)

- b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja realisasi penerimaan pajak. Hal-hal tersebut antara lain:

- a) Penyebab keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi IKU ini didominasi dengan kegiatan pengawasan Wajib Pajak oleh AR/Pemeriksa/Penilai/dan Penyuluh agar terus mengikuti perkembangan kegiatan ekonomi di berbagai sektor sehingga penerimaan dari aktivitas PPM dan PKM dapat mencapai target yang sudah ditetapkan.
- b) Penyebab penurunan realisasi IKU ini didominasi oleh tren restitusi yang cukup tinggi dibandingkan tahun sebelumnya serta beberapa wilayah kerja KPP Pratama Sibolga yang sulit dijangkau dengan kendaraan roda empat dan alamat Wajib Pajak berdasarkan MFWP tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.
- c) Upaya yang dilakukan oleh KPP Pratama Sibolga yaitu menjaga, mengawasi, dan memastikan prognosa penerimaan sampai dengan 31 Desember 2024 agar dapat memenuhi target penerimaan dengan turut berkoordinasi dengan Kepala Kanwil DJP Sumatera Utara II.

- c. Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan pajak dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh KPP Pratama Sibolga adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.
- b. Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
- c. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

- d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- a. Melakukan canvassing untuk memperluas basis pajak dari sisi ekstensifikasi.
- b. Meningkatkan penerimaan pajak dengan melakukan intensifikasi pajak dengan menyusun daftar sasaran prioritas pengawasan sehingga kegiatan pengawasan yang dilakukan lebih terarah.
- c. Meningkatkan sinergi dengan Pemerintah Daerah khususnya dalam rangka pertukaran data dan informasi yang terkait dengan perpajakan.

- e. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

Realisasi penerimaan pajak pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah memperkuat pengawasan berbasis risiko, melakukan edukasi dan sosialisasi kepada Wajib Pajak.

- f. Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Realisasi penerimaan pajak dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- a. Kendala kondisi ekonomi yang masih penuh dengan ketidakpastian yang diatasi dengan optimalisasi perencanaan penerimaan, menyampaikan hasil pemantauan kinerja penerimaan secara rutin dan menindaklanjuti laporan tersebut.
- b. Kendala perlambatan penerimaan dari sektor-sektor yang menjadi kontributor utama penerimaan pajak. Kendala ini dilakukan dengan melakukan pengawasan yang terarah sesuai dengan kebijakan nasional dan meningkatkan sinergi (joint program, joint analysis, joint business process).

- g. Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat

Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan KPP Pratama Sibolga yaitu membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum seperti di TPT KPP Pratama Sibolga, menyediakan kursi roda bagi WP disabilitas, serta pemerintah melalui Kementerian Keuangan yang membuat program pembeian insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.

- h. Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- a. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
- b. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
- c. Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
- d. Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan IHT dan Pelatihan kepada Kepala Seksi PKD, Kepala Seksi Pengawasan, dan AR untuk dapat melakukan analisis atas data yang tersedia; • Melakukan monitoring penerimaan pajak dari SP2DK atas DPP tahun berjalan; • Penyelenggaraan Forum AR di lingkungan unit kerja secara periodik sebagai sarana diskusi bersama; • Menganalisis ability to pay Wajib Pajak oleh Komite Kepatuhan WP termasuk analisis yang mencakup data historis, laporan keuangan, dan informasi pihak ketiga dengan metode data analitik; • Melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelesaian Kegiatan Pemeriksaan dan percepatan penyelesaian pemeriksaan setiap triwulan. 	2025

▪ **IKU 1b-CP : Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas**

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
Target	100	100	100	100	100	100	100
Realisasi	100.21	102.5	102.5	101.89	101.89	101.70	101.70
Capaian	100.21	102.5	102.5	101.89	101.89	101.70	101.70

Sumber : Laporan Penjelasan Progress IKU Triwulan IV 2024 KPP Pratama Sibolga

a. Deskripsi Sasaran Strategis

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan.

b. Definisi IKU

Indeks pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas terdiri dari 2 komponen, yaitu:

- Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto;
 Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto diukur melalui dua komponen, yaitu: (1) pertumbuhan nasional dengan bobot komponen sebesar 60 persen; serta (2) pertumbuhan unit dengan bobot komponen sebesar 40%. Realisasi capaian masing-masing komponen yang dapat diperhitungkan adalah maksimal 120%. Komponen pertumbuhan nasional adalah hasil perbandingan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dengan satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan dikalikan 100 persen. Komponen pertumbuhan unit kerja adalah hasil penjumlahan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dikalikan 100 persen. Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan (t) adalah realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan (t) dibagi dengan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun lalu (t-1) dikalikan 100 persen. Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim, diadministrasikan di KPP baru.

- Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas

Deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas adalah selisih antara proyeksi dengan realisasi dari penerimaan. Penerimaan meliputi penerimaan perpajakan termasuk penerimaan PPH migas, dan bea/cukai, penerimaan PNBPN, Hibah dan penerimaan pembiayaan. Dalam satu bulan Komite ALM dapat melakukan rapat paling kurang 1 (satu) kali. Berdasarkan keputusan rapat Komite ALM yang dituangkan dalam pokok-pokok keputusan rapat Komite ALM yang disusun oleh Sekretariat ALM, tim teknis ALM menyusun proyeksi penerimaan dan pengeluaran. Proyeksi penerimaan dan pengeluaran ini yang menjadi dasar perhitungan IKU. Penerimaan Kas, (1) Rencana penerimaan kas adalah rencana penerimaan kas (cash inflows) yang berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan, (2) Realisasi penerimaan kas adalah realisasi penerimaan kas (cash inflows) yang berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan. Perencanaan penerimaan kas dinyatakan akurat apabila standard deviasi antara realisasi penerimaan kas dan rencana penerimaan kas dalam suatu waktu tertentu $\leq 8\%$. Deviasi penerimaan kas pada unit Kanwil dan KPP adalah deviasi penerimaan kas (penerimaan pajak) di lingkup Kanwil dan KPP masing-masing.

c. Formula IKU

Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan penerimaan kas = $(50\% \times \text{indeks capaian Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto}) + (50\% \times \text{indeks capaian Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas})$

d. Realisasi IKU

Ranking	KPP	Bruto	Deviasi sd. Tw 4 (Min 0, Maks 120%)	Realisasi
1	127. PRATAMA BALIGE	95.49 %	110.00 %	102.75 %
2	116. PRATAMA RANTAU PRAPAT	105.00 %	100.00 %	102.50 %
3	126. PRATAMA SIBOLGA	103.40 %	100.00 %	101.70 %
4	114. PRATAMA TEBING TINGGI	101.07 %	100.00 %	100.54 %
5	117. PRATAMA PEMATANG SIANTAR	108.48 %	90.00 %	99.24 %
6	128. PRATAMA KASANJAHE	106.62 %	90.00 %	98.31 %
7	118. PRATAMA PADANG SIDEMPUAN	98.20 %	100.00 %	98.10 %
8	115. PRATAMA KISARAN	100.08 %	90.00 %	99.04 %

Sumber : Mandor DJP

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realiasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase pertumbuhan penerimaan pajak bruto	26.84%	108.72%	93.48%		
Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas				111,99	101,70

Sumber : Laporan Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Sibolga

Realisasi IKU indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas pada tahun 2024 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Hal tersebut dikarenakan kecilnya angka prognosa ditentukan yang mengakibatkan kecilnya persentase deviasi proyeksi perencanaan kas pada tahun 2024 dan berakibat turunnya realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	-	-	100	101,70

Sumber : Aplikasi Mandor tanggal 15 Januari 2025

Beberapa hal yang juga melatarbelakangi membaiknya turunnya realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas:

- Adanya kebijakan terbaru yang membuat terjadinya turunnya angka penerimaan pajak bruto.
- Dilakukan pencairan terhadap SPMKP yang mempengaruhi tingkat deviasi proyeksi perencanaan kas.
- Terdapat anomali penerimaan yang begitu besar jika dibandingkan dengan tahun tahun sebelumnya.

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	-	101,70

Sumber : Aplikasi Mandor tanggal 15 Januari 2025

Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas sampai akhir 2024 mencapai target hingga akhir Desember 2024 yang ditetapkan.

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

a. Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi IKU ini. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- a) Melakukan manajemen restitusi dengan menggunakan dashboard restitusi.
- b) Melakukan koordinasi dengan seksi teknis terkait sektor-sektor penerimaan yang akan didapat setiap bulannya.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas. Hal-hal tersebut antara lain:

- a) Implementasi peraturan-peraturan terkait UU HPP yang memerlukan waktu untuk bisa diterapkan secara efektif;
- b) Tren restitusi yang semakin meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

c. Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian atas kinerja realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh KPP Pratama Sibolga adalah sebagai berikut:

- a) Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.
- b) Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
- c) Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Capaian atas kinerja realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas dengan melakukan melakukan pengawasan terhadap sumber penerimaan setiap sektor dan meningkatkan kualitas data atas prognosa penerimaan yang telah dibuat.

e. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko terhadap penerimaan yang diluar dugaan dari sektor tertentu dengan melakukan penyanding data dari tahun berikutnya dan update informasi terkait kebijakan-kebijakan baru dari Direktorat Jenderal Pajak.

f. Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas tidak dapat dicapai secara maksimal

karena beberapa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh KPP Pratama Sibolga dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut ialah dengan meningkatkan kualitas prognosa penerimaan yang akan disajikan.

g. Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat

Dalam praktiknya, pemenuhan IKU ini dilaksanakan oleh seluruh pegawai KPP Pratama Sibolga tanpa membedakan gender.

- h. Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

Kontribusi yang dapat diberikan KPP Pratama Sibolga ialah sebagai sumber pendaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk menjadi alat kontrol dalam penjagaan penerimaan perpajakan.

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> Menyusun kebijakan dan strategi penyusunan prognosa penerimaan pajak per jenis pajak yang andal; Melakukan rapat internal terkait penerimaan pajak yang berkemungkinan besar akan mengalami peningkatan ataupun penurunan terhadap prognosa yang telah dibuat; Merencanakan, memantau dan mengevaluasi penerimaan pada bulan sebelumnya untuk dapat menyusun prognosa penerimaan untuk bulan berikutnya. 	2025

▪ **IKU 2a-CP : Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)**

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
Target	15%	40%	40%	70%	70%	100%	100%
Realisasi	14%	33.42%	33.42%	58.97%	58.97%	100.13%	100.13%
Capaian	93.36	83.55	83.55	84.24	84.24	100.13	100.13

Sumber : Laporan Penjelasan Progress IKU Triwulan IV 2024 KPP Pratama Sibolga

a. Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan *voluntary and enforced tax compliance* Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal.

b. Definisi IKU

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi

Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional. Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassessment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM). Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

c. Formula IKU

$$\frac{\text{Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM}}{\text{Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM}} \times 100\%$$

d. Realisasi IKU

Jnit Kerja	PPM					PKM					
	Target	Realisasi	Realisasi IKU %	Trajectory %	Capaian IKU %	Target	Realisasi	Realisasi IKU %	Trajectory %	Capaian IKU %	Target
DJP SUMATERA UTARA II	7.567.526.513.000	7.489.950.142.611	98,97%	100,00%	98,97%	749.291.852.000	544.759.642.766	72,70%	100,00%	72,70%	8.317.218.455.000
UMS-SPKOL-Ga	665.234.625.000	652.551.253.387	98,23%	100,00%	95,23%	51.740.175.000	27.696.620.898	53,53%	100,00%	53,53%	736.975.000.000

Sumber : Mandor DJP

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) sampai dengan akhir Desember 2024 tercatat sebesar Rp652.551.253.387 dengan capaian sebesar 100,13% dari target dan realisasi yang ditetapkan sesuai Nota Dinas Kepala Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara II Nomor ND-8/WPJ.26/2025 tanggal 3 Januari 2025 tentang Penyampaian Revisi Perubahan Ketiga Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan PPM dan Kegiatan PKM per KPP Tahun 2024.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realiasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
----------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	-	98.42%	129.90%	108.73%	100.13%
--	---	--------	---------	---------	---------

Sumber : Laporan Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Sibolga

Realisasi IKU penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) pada tahun 2024 mengalami penurunan selama 3 tahun terakhir namun realisasi IKU ini telah mencapai target yang telah ditetapkan. Hal tersebut terjadi karena kurangnya tingkat kesadaran wajib pajak terkait kewajiban pembayaran pajak.

- Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%	100%	100%	100.13%

Sumber : Aplikasi Mandor tanggal 15 Januari 2025

Tercapainya target IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) menggambarkan pengawasan pembayaran masa (PPM) yang cukup optimal. Beberapa hal yang juga melatarbelakangi realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) yang optimal sampai dengan akhir Desember 2024 diantaranya:

- Wajib pajak melakukan pembayaran masa dengan rutin;
- Mayoritas sektor-sektor usaha tumbuh positif;
- Peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam melakukan kegiatan pengawasan pembayan masa (PPM)
- Peningkatan Koordinasi dan Kolaborasi dalam menjalin kerjasama dengan berbagai instansi terkait

- Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari	100%	-	100.13%

kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)			
---	--	--	--

Sumber : Aplikasi Mandor tanggal 15 Januari 2025

Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan, hal ini diiringi dengan kinerja jenis pajak utama yang mengalami pertumbuhan positif yang mampu mendorong pembayaran pajak pada kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) menjadi meningkat.

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

a. Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi IKU ini. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- a) Penelitian dan tindak lanjut hasil data matching.
- b) Meningkatkan produktivitas dan *success rate* (melibatkan pemeriksa, penyidik, dan penilai) atas penerbitan SP2DK di Approweb.
- c) Melakukan monitoring dan evaluasi untuk mendorong unit vertikal melakukan pengawasan kepatuhan pembayaran dan pelaporan Wajib Pajak dalam menerbitkan STP.
- d) Melakukan analisa perilaku pembayaran WP terhadap aktivitas sektor usaha.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong tercapainya kinerja realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM). Hal-hal tersebut antara lain:

- a) Penyebab keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) KPP Pratama Sibolga tahun 2024 didominasi dengan kegiatan pengawasan Wajib Pajak oleh AR/Pemeriksa/Penilai/dan Penyuluh agar terus mengikuti perkembangan kegiatan ekonomi di berbagai sektor sehingga penerimaan dari aktivitas PPM dapat mencapai target yang sudah ditetapkan.
- b) Pengawasan Wajib Pajak oleh segenap insan DJP yang mampu mengikuti perkembangan kegiatan ekonomi di berbagai sektor.
- c) Pemulihan ekonomi dan peningkatan harga komoditas.

c. Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh KPP Pratama Sibolga adalah sebagai berikut:

- a) Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.
- b) Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
- c) Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Capaian atas kinerja realisasi IKU ini pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Adapun program yang telah dilakukan adalah meningkatkan penerimaan pajak dengan melakukan intensifikasi pajak dengan menyusun daftar sasaran prioritas pengawasan sehingga kegiatan pengawasan yang dilakukan lebih terarah.

e. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM). Mitigasi risiko yang dilakukan oleh KPP Pratama Sibolga adalah memperkuat pengawasan berbasis risiko, melakukan edukasi dan sosialisasi kepada Wajib Pajak.

f. Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh KPP Pratama Sibolga dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut ialah dengan optimalisasi perencanaan penerimaan, menyampaikan hasil pemantauan kinerja penerimaan secara rutin dan menindaklanjuti laporan tersebut untuk mengatasi kendala kondisi ekonomi yang masih penuh dengan ketidakpastian.

- g. Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat

Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan KPP Pratama Sibolga ialah membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum seperti di TPT KPP Pratama Sibolga, menyediakan kursi roda bagi penyandang disabilitas, serta pemerintah melalui Kementerian Keuangan yang membuat program pemberian insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.

- h. Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu seperti pajak yang dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan monitoring penerimaan pajak dari SP2DK atas DPP tahun berjalan; • Melakukan pendekatan persuasif agar Wajib Pajak merespon dan membayar melalui surat undangan pembahasan dan melakukan kunjungan kerja ke lokasi Wajib Pajak untuk mendapatkan data lebih lanjut tentang Wajib Pajak yang akan dituangkan di dalam Laporan Hasil Kunjungan; • Melakukan penelitian Kepatuhan Material tahun-tahun sebelumnya (yang belum daluarsa dan belum dihimbau). 	2025

▪ **IKU 2b-CP : Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi**

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
Target	60%	80%	80%	90%	90%	100%	100%
Realisasi	73.38%	81.16%	81.16%	81.08%	81.08%	90.83%	90.83%
Capaian	122.38	101.45	101.45	90.10	90.10	90.83	90.83

Sumber : Laporan Penjelasan Progress IKU Triwulan IV 2024 KPP Pratama Sibolga

a. Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan *voluntary and enforced tax compliance* Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal.

b. Definisi IKU

Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan dan Orang Pribadi adalah perbandingan antara jumlah SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi dengan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh dengan memperhatikan kualitas waktu. SPT Tahunan PPh adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak, yang meliputi:

- a. SPT 1771 dan SPT 1771\$ yang dilaporkan oleh Badan;
- b. SPT 1770, 1770S dan 1770SS yang dilaporkan oleh Orang Pribadi;

SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi Wajib SPT adalah SPT Tahunan Tahun Pajak 2023 yang disampaikan oleh WP Badan dan Orang Pribadi yang diterima selama tahun 2024 termasuk SPT Tahunan PPh selain Tahun Pajak 2023 yang batas akhir penyampaiannya pada Tahun 2024 (tidak termasuk pembetulan SPT Tahunan PPh). Wajib Pajak Wajib SPT terdiri dari Wajib Pajak Badan dan Orang pribadi dengan status domisili/pusat (kode status NPWP 000) yang mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, tidak termasuk: bendahara, joint operation, cabang/lokasi, WP berstatus Kantor Perwakilan (Representative Office), WP Penghasilan Tertentu sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 yang diubah dengan PMK-9/PMK.03/2018, WP Non Efektif, dan sejenis lainnya yang dikecualikan atau tidak mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, dengan detail kriteria sebagaimana dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

Kriteria tepat waktu penyampaian SPT adalah sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 3 UU KUP, termasuk Wajib Pajak yang memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 4 UU KUP.

Terkait ketepatan waktu, pembobotan pelaporan SPT pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

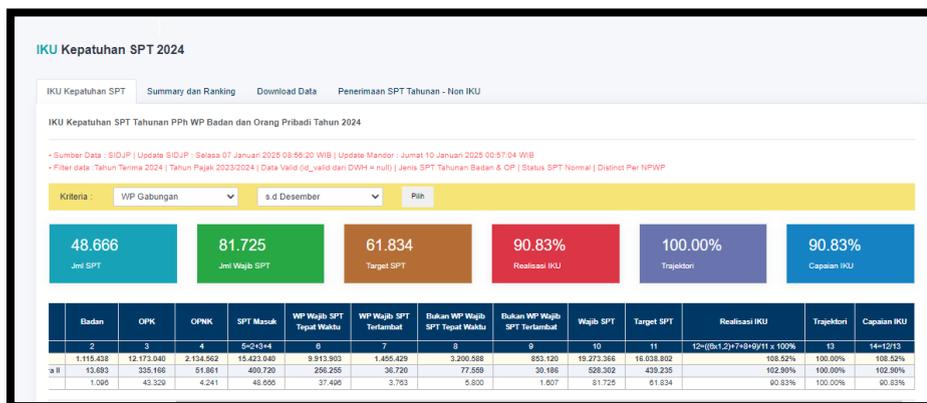
- atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tepat waktu pada tahun 2024 oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT yang menyampaikan SPT Tahunan PPh diberikan pembobotan 1,2;
- atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tidak tepat waktu dan/atau selain oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT, diberikan pembobotan 1.

Target WP Badan dan Orang Pribadi yang Wajib SPT pada Pimpinan Unit Kanwil ditetapkan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian berdasarkan jumlah WP Wajib SPT pada unit tersebut. Tata cara penetapan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh pada Pimpinan Unit KPP/Pemilik Peta Strategi dan selain Pimpinan Unit/selain Pemilik Peta Strategi dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

c. Formula IKU

$$\left[\frac{(1,2 \times \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}) + \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 selain yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}}{\text{Target WP yang menyampaikan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023}} \right] \times 100\%$$

d. Realisasi IKU



Sumber : Mandor DJP

Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi sampai dengan akhir Desember 2024 mencapai realisasi sebesar 90.83%.

- Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realiasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	71.99%	100.23%	102.40%	100.23%	90.83%

Sumber : Laporan Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Sibolga

Realisasi capaian IKU Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi mengalami fluktuatif setiap tahunnya. Hal tersebut dikarenakan kesadaran wajib pajak yang mempengaruhi pencapaian atas IKU persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi.

- Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	-	-	100%	90.83%

Sumber : Aplikasi Mandor tanggal 15 Januari 2025

Tidak Tercapainya target IKU persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi menggambarkan menurunnya kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang optimal.

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%	-	90.83%

Sumber : Aplikasi Mandor tanggal 15 Januari 2025

Tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi sampai dengan akhir Desember 2024 belum mampu melampaui target yang telah ditetapkan, hal ini diiringi dengan kurangnya kesadaran Wajib Pajak akan pentingnya membayar pajak dan kontribusinya bagi pembangunan negara, semakin besar motivasi mereka untuk patuh.

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

a. Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi IKU ini. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- a) Melakukan Layanan Di luar Kantor (LDK) terkait penyampaian SPT Tahunan Orang Pribadi dan Badan.
- b) Melakukan Penyuluhan terkait tata cara pelaporan SPT Tahunan dan kendala kendala yang di temukan saat pelaporan SPT Tahunan.
- c) Penyuluhan tentang manfaat Pelaporan SPT Tahunan kepada Wajib Pajak.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong kenaikan kinerja realisasi tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi. Hal-hal tersebut antara lain:

- a) Peningkatan kesadaran pajak wajib pajak akan pentingnya membayar pajak dan kontribusinya bagi pembangunan negara, semakin besar motivasi mereka untuk patuh.
- b) Penyediaan sistem pelaporan pajak yang lebih *user-friendly*, baik melalui aplikasi maupun *website*, memudahkan wajib pajak dalam menyampaikan SPT.

c. Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Realisasi tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Adapun langkah efisiensi yang dilakukan oleh KPP Pratama Sibolga adalah melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomatisasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Realisasi IKU ini merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Adapun program yang telah dilakukan adalah memperluas basis pajak dengan melakukan ekstensifikasi yang dilakukan dengan memadankan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan melakukan pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas administrasi perpajakan dengan membentuk sistem inti administrasi perpajakan.

e. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

Realisasi tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya kinerja realisasi tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh KPP Pratama Sibolga adalah dengan konsisten melakukan risiko, melakukan edukasi dan sosialisasi kepada Wajib Pajak.

f. Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Realisasi tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh KPP Pratama Sibolga dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut ialah dengan optimalisasi edukasi pajak dan membangun budaya kepatuhan pajak pada masyarakat.

g. Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat

Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan KPP Pratama Sibolga ialah membangun

fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum seperti di TPT KPP Pratama Sibolga, menyediakan kursi roda bagi penyandang disabilitas, serta pemerintah melalui Kementerian Keuangan yang membuat program pemberian insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.

- h. Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu seperti pajak yang dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> Melakukan Pemberian reminder/pengingat pelaporan SPT kepada Wajib Pajak melalui pesan siaran (broadcast message) menggunakan WhatsApp centang hijau; Membuka Layanan asistensi SPT Tahunan di Luar Kantor, seperti di lokasi usaha WP Pemberi Kerja, Kantor Instansi Pemerintah; Menghimbau Instansi Pemerintah dan BUMN untuk membuat bukti potong. 	2025

- IKU 3a-CP : Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)**

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
Target	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
Realisasi	20.28%	39.74%	39.74%	31.73%	31.73%	100.08%	100.08%
Capaian	81.11	79.47	79.47	42.31	42.31	100.08	100.08

Sumber : Laporan Penjelasan Progress IKU Triwulan IV 2024 KPP Pratama Sibolga

a. Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak sebagai tindak lanjut analisis data dalam rangka kegiatan pengawasan dan penegakan hukum atas tahun pajak sebelum tahun pajak berjalan.

b. Definisi IKU

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional. Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassessment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM). Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

c. Formula IKU

$$\frac{\text{Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM}}{\text{Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM}} \times 100\%$$

d. Realisasi IKU

Dashboard IKU Penerimaan PPM PKM 2024

Data Penerimaan PPM PKM
Per Unit Kerja

2024 | Januari | Desember | Pilih

Data update terakhir: 10-01-2025 13:58:20 WIB

Unit Kerja	PPM					PKM					
	Target	Realisasi	Realisasi IKU %	Trajectory %	Capaian IKU %	Target	Realisasi	Realisasi IKU %	Trajectory %	Capaian IKU %	Target
DJP SUMATERA UTARA II	7.567.926.613.000	7.489.980.142.611	98,97%	100,00%	98,97%	749.291.952.000	544.759.642.768	72,70%	100,00%	72,70%	8.317.216.465.000
UMS SIGI GA	685.234.925.000	652.551.253.387	95,23%	100,00%	95,23%	51.740.175.000	27.696.920.988	53,53%	100,00%	53,53%	738.975.000.000

Sumber : Mandor DJP

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) sampai dengan akhir Desember 2024 tercatat sebesar 27.696.920.986 dengan capaian sebesar 100,08% dari target dan realisasi yang ditetapkan sesuai Nota Dinas Kepala Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara II Nomor ND-8/WPJ.26/2025 tanggal 3 Januari 2025 tentang Penyampaian Revisi Perubahan Ketiga Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan PPM dan Kegiatan PKM per KPP Tahun 2024.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realiasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	-	75.50	93.20%	54.52%	100.08%

Sumber : Laporan Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Sibolga

Realisasi IKU penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) pada tahun 2024 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%	100%	100%	100.08%

Sumber : Aplikasi Mandor tanggal 15 Januari 2025

Tercapainya target IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) menggambarkan pemulihan aktivitas ekonomi yang semakin menguat. Beberapa hal yang juga melatarbelakangi membaiknya kinerja penerimaan sampai dengan akhir Desember 2024 diantaranya:

- a) Pertumbuhan yang positif secara kumulatif pada kinerja PKM

- b) Adanya peningkatan intensitas pengawasan
- c) Peningkatan kesadaran wajib pajak terhadap PKM yang belum di bayarkan
- d) Kenaikan harga komoditas pada sektor-sektor tertentu

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%	100%	100.08%

Sumber : Aplikasi Mandor tanggal 15 Januari 2025

Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan, hal ini diiringi dengan kinerja jenis pajak utama yang mengalami pertumbuhan positif yang mampu mendorong pembayaran pajak pada kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) menjadi meningkat dan optimalnya tindakan pengawasan yang dilakukan untuk merealisasikan potensi pajak yang ada.

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

a. Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi IKU ini. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- a) Penelitian dan tindak lanjut hasil data matching.
- b) Meningkatkan produktivitas dan success rate (melibatkan pemeriksa, penyidik, dan penilai) atas penerbitan SP2DK di Approweb.
- c) Melakukan monitoring dan evaluasi untuk mendorong unit vertikal melakukan pengawasan kepatuhan pembayaran dan pelaporan Wajib Pajak dalam menerbitkan STP.
- d) Melakukan analisis perilaku pembayaran WP terhadap aktivitas sektor usaha.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong tercapainya kinerja realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM). Hal-hal tersebut antara lain:

- a) Penyebab keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi IKU ini didominasi dengan kegiatan pengawasan Wajib Pajak oleh AR/Pemeriksa/Penilai/dan Penyuluh agar terus mengikuti perkembangan kegiatan ekonomi di berbagai sektor sehingga penerimaan dari aktivitas PKM dapat mencapai target yang sudah ditetapkan.
- b) Upaya yang dilakukan oleh KPP Pratama Sibolga ialah terus melakukan penjagaan, pengawasan dan tindaklanjut terhadap data PKM yang sudah disediakan agar dapat memenuhi target penerimaan dengan turut berkoordinasi dengan Kepala Kanwil DJP Sumatera Utara II.
- c. Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya
- Capaian atas realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Adapun langkah efisiensi yang dilakukan oleh KPP Pratama Sibolga adalah melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomatisasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.
- d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
- Capaian atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Adapun program yang telah dilakukan adalah meningkatkan penerimaan pajak dengan melakukan intensifikasi pajak dengan menyusun daftar sasaran prioritas pengawasan sehingga kegiatan pengawasan lebih terarah.
- e. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja
- Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh KPP Pratama Sibolga dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut ialah dengan memperkuat pengawasan berbasis resiko, melakukan edukasi dan sosialisasi kepada Wajib Pajak.
- f. Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh KPP Pratama Sibolga dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut ialah dengan optimalisasi perencanaan penerimaan, menyampaikan hasil pemantauan kinerja penerimaan secara rutin dan menindaklanjuti laporan tersebut untuk mengatasi kendala kondisi ekonomi yang masih penuh dengan ketidakpastian.

- g. Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat

Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan KPP Pratama Sibolga ialah membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum seperti di TPT KPP Pratama Sibolga, menyediakan kursi roda bagi penyandang disabilitas, serta pemerintah melalui Kementerian Keuangan yang membuat program pemberian insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.

- h. Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu seperti pajak yang dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> • Menganalisis ability to pay Wajib Pajak oleh Komite Kepatuhan WP termasuk analisis yang mencakup data historis, laporan keuangan, dan informasi pihak ketiga dengan metode data analitik; • Melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelesaian Kegiatan Pemeriksaan dan percepatan penyelesaian pemeriksaan setiap triwulan; • Menindaklanjuti semua data-data yang telah disediakan; 	2025

<ul style="list-style-type: none"> Menyusun kebijakan dan strategi pengamanan penerimaan pajak. 	
--	--

▪ **IKU 4a-CP : Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan**

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
Target	10%	40%	40%	60%	60%	74%	74%
Realisasi	18.61%	73.98%	73.98%	88.62%	88.62%	88.80%	88.80%
Capaian	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00

Sumber : Laporan Penjelasan Progress IKU Triwulan IV 2024 KPP Pratama Sibolga

a. Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, terpercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

b. Definisi IKU

Penyuluhan perpajakan adalah suatu upaya dan proses pemberian informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah maupun non pemerintah. Edukasi Pajak adalah setiap upaya dan proses mengembangkan serta meningkatkan semua potensi warga negara (jasmani, rohani, moral dan intelektual) untuk menghasilkan perilaku kesadaran perpajakan yang tinggi serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan perpajakan agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Kegiatan penyuluhan dibagi menjadi tiga tema dan tujuan, yaitu:

1. Tema I - Meningkatkan Kesadaran Pajak
 2. Tema II - Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Pajak
 3. Tema III - Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan melalui Perubahan Perilaku
- Kegiatan edukasi yang diperhitungkan dalam hal manual IKU ini adalah kegiatan edukasi perpajakan dengan metode penyuluhan langsung secara aktif dan penyuluhan melalui pihak ketiga yang diinisiasi oleh unit kerja. BKegiatan edukasi

perpajakan yang dilakukan perekaman dalam aplikasi sisuluh melampaui 30 hari kalender setelah kegiatan edukasi dilakukan atau tidak menyelesaikan tahapan MPKP sesuai ketentuan, tidak diakui sebagai kegiatan penyuluhan yang diperhitungkan dalam capaian IKU. Rasio kegiatan penyuluhan merupakan perbandingan antara jumlah realisasi kegiatan penyuluhan terhadap total rencana kegiatan penyuluhan. Realisasi kegiatan penyuluhan yang dapat diakui sebagai realisasi adalah maksimal sebesar rencana kegiatan penyuluhan yang telah ditetapkan.

Rencana kegiatan penyuluhan selama setahun diusulkan pada awal periode oleh masing-masing unit kerja yang ditetapkan oleh Kanwil DJP dengan batasan minimal sesuai yang ditetapkan dalam Nota Dinas Kebijakan Edukasi Perpajakan tahun 2024. Masing-masing unit pengampu, yang berwenang melakukan persetujuan rencana kerja, wajib melakukan pemeriksaan jumlah rencana kerja dan dapat melakukan penyesuaian jumlah rencana kerja untuk masing masing tema, sebelum dilakukan persetujuan. Daftar Sasaran Penyuluhan Terpilih (DSPT) terdiri dari DSPT Kolaboratif dan DSPT mandiri. DSPT kolaboratif melingkupi daftar wajib pajak yang akan dilakukan edukasi perpajakan tema III, dalam hal tidak dapat dilakukan edukasi perpajakan tema III, komite kepatuhan dapat mengajukan data tersebut untuk ditetapkan sebagai DSPT tema II. Kriteria Perubahan perilaku sebagaimana dimaksud pada tema III adalah sebagai berikut.

1. Perubahan Perilaku Pelaporan

- Melakukan pelaporan SPT Masa yang telah jatuh tempo; atau
- Melakukan pelaporan SPT Tahunan yang telah jatuh tempo.
setelah pelaksanaan kegiatan edukasi perpajakan, sesuai dengan materi edukasi yang disampaikan.

2. Perubahan Perilaku Pembayaran

- Melakukan pembayaran semua jenis pajak untuk pertama kali dan tidak jatuh tempo;
- Melakukan pembayaran semua jenis pajak yang telah jatuh tempo;
- Melakukan pembayaran atas SPT Pembetulan;

Petunjuk kegiatan penyuluhan mengacu pada Nota Dinas Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat tentang Petunjuk Kegiatan Edukasi Perpajakan Tahun 2024.

c. Formula IKU

$$\text{IKU EP} = \{(25\% \times \text{Rasio Kegiatan}) + (30\% \times \text{Rasio Perubahan Perilaku Lapor}) + (45\% \times \text{Rasio Perubahan Perilaku Bayar})\}$$

d. Realisasi IKU

Kode Unit	Nama Unit	Realisasi								Progress			
		Kegiatan		Perubahan Perilaku				Realisasi IKU	Capaian IKU				
		Capaian	Rasio (15,5%)	Lapor		Bayar			s.d Q1 (10%)	s.d Q2 (40%)	s.d Q3 (60%)	s.d Q4 (74%)	
				Capaian	Rasio (28,12%)	Capaian	Rasio (42,18%)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
126	PRATAMA SIBOLGA	100.00 %	15.50 %	120.00 %	28.12 %	95.50 %	42.18 %	88.80 %	120.00 %	120.00 %	120.00 %	120.00 %	
4104160000	KPP Pratama Sibolga	100.00 %	15.50 %	120.00 %	28.12 %	50.00 %	42.18 %	88.80 %	120.00 %	120.00 %	120.00 %	120.00 %	
4104160100	KP2KP Pandan	100.00 %	15.50 %	120.00 %	28.12 %	120.00 %	42.18 %	88.80 %	71.61 %	120.00 %	120.00 %	120.00 %	
4104160200	KP2KP Gunung Sitoli	100.00 %	15.50 %	120.00 %	28.12 %	120.00 %	42.18 %	88.80 %	61.67 %	120.00 %	120.00 %	120.00 %	

Sumber : Mandor DJP

Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan sampai dengan akhir Desember 2024 telah mencapai realisasi sebesar 88.80% dari target yang telah ditetapkan dengan capaian sebesar 120%.

- Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realiasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	-	-	-	84%	88.80%

Sumber : Laporan Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Sibolga

Realisasi capaian IKU Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan pada tahun 2024 tetap tercapai 88.80% dari target sebesar 74.00% dengan indeks capaian sebesar 120% dengan tetap mempertahankan kualitas kegiatan edukasi dari penyuluhan terhadap wajib pajak. Perubahan perilaku didukung juga dengan kualitas SDM yang mampu melakukan dengan optimal.

- Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	-	-	74%	88.80%

Sumber : Aplikasi Mandor tanggal 15 Januari 2025

Tercapainya target IKU Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan menggambarkan optimalnya penyuluhan kepada wajib pajak agar dapat melakukan kewajiban bayar dan laporinya. Beberapa hal yang juga melatarbelakangi bertahannya kinerja kegiatan edukasi dan penyuluhan terhadap persentase perubahan perilaku lapor dan bayar sampai dengan akhir Desember 2024 diantaranya:

- Mayoritas sektor-sektor usaha tumbuh positif.
- Wajib Pajak memahami kewajiban bayar dan lapor yang harus dipenuhi.
- Fungsional penyuluh mampu memberikan pelayanan penyuluhan yang optimal kepada wajib pajak.

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%	-	88.80%

Sumber : Aplikasi Mandor tanggal 15 Januari 2025

Perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan, hal ini diiringi perubahan sikap Wajib Pajak melalui penyuluhan yang berkelanjutan dapat mengubah sikap individu terhadap kewajiban perpajakan. Dari yang awalnya dianggap sebagai beban, pajak dapat dilihat sebagai kontribusi untuk pembangunan negara dan kesejahteraan bersama. Penedukasian yang efektif memberikan pemahaman yang lebih baik tentang peraturan, manfaat, dan konsekuensi dari tindakan tertentu. Ketika individu memahami mengapa mereka harus melaporkan dan membayar pajak, motivasi mereka untuk mematuhi aturan pun meningkat.

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

a. Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi IKU ini. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- a) Melakukan analisis perilaku pembayaran WP terhadap sektor usaha.
- b) Optimalisasi penyuluhan kewajiban SPT orang pribadi, badan dan Instansi pemerintah.
- c) Melakukan monitoring dan evaluasi mendorong unit vertikal melakukan pengawasan kepatuhan pembayaran dan pelaporan wajib pajak.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong kinerja realisasi perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan. Hal-hal tersebut antara lain:

- a) Penyebab keberhasilan/peningkatan kinerja perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan pajak KPP Pratama Sibolga tahun 2024 didominasi dengan kegiatan pengawasan penyuluhan Wajib Pajak oleh Fungsional Penyuluh agar terus mengikuti perkembangan kegiatan ekonomi di berbagai sektor sehingga kinerja perubahan perilaku lapor dan bayar menjadi lebih optimal.
- b) Upaya yang dilakukan oleh KPP Pratama Sibolga ialah tetap melakukan penyuluhan kepada wajib pajak baik melalui kelas pajak atau pun dengan TPT Helpdesk agar dapat memenuhi perubahan perilaku lapor dan bayar dengan turut berkoordinasi dengan Kepala Kanwil DJP Sumatera Utara II.

c. Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian atas kinerja realisasi perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Adapun langkah efisiensi yang dilakukan oleh KPP Pratama Sibolga adalah melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomatisasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.

- d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Capaian atas kinerja perubahan perilaku lapor dan bayar merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Adapun program yang telah dilakukan adalah melakukan intensifikasi pajak dengan menyusun daftar sasaran prioritas penyuluhan sehingga kegiatan penyuluhan yang dilakukan lebih terarah.

- e. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

Perubahan perilaku lapor dan bayar pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko ketidakpatuhan Wajib Pajak dilakukan dengan memperkuat penyuluhan, edukasi dan sosialisasi kepada Wajib Pajak.

- f. Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Realisasi kinerja perubahan perilaku lapor dan bayar dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh KPP Pratama Sibolga dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut ialah dengan optimalisasi penyuluhan dan menyampaikan hasil pemantauan kinerja penyuluhan secara rutin dan menindaklanjuti laporan tersebut untuk mengatasi kendala kondisi ekonomi yang masih penuh dengan ketidakpastian.

- g. Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat

Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan KPP Pratama Sibolga ialah membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum seperti di TPT KPP Pratama Sibolga, menyediakan kursi roda bagi penyandang disabilitas, serta pemerintah melalui Kementerian Keuangan yang membuat program pemberian insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.

- h. Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu seperti pajak yang dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> Melakukan Edukasi dan Penyuluhan secara langsung kepada Wajib Pajak; Melakukan Podcast/siniar edukasi perpajakan; Melakukan Edukasi dan Penyuluhan secara langsung melalui Media Sosial kepada Wajib Pajak. 	2025

▪ **IKU 4b-N : Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan**

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
Target	5%	5%	10%	5%	15%	85%	100%
Realisasi	5.71%	12.82%	12.82%	18.00%	18.00%	108.83%	108.83%
Capaian	114.10	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00

Sumber : Laporan Penjelasan Progress IKU Triwulan IV 2024 KPP Pratama Sibolga

a. Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, terpercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

b. Definisi IKU

Salah satu indikator keberhasilan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam pencapaian Sasaran Strategis Edukasi, Pelayanan dan Kehumasan yang efektif pada Internal Perspektif diukur dari hasil survei terhadap Wajib Pajak dan stakeholders lainnya. Survei dilaksanakan oleh unit kerja vertikal dan Kantor Pusat DJP. Hasil dalam pelaksanaan survei adalah Laporan Hasil Survei.

Realisasi Triwulan I s.d. Triwulan III diperoleh dari hasil survei yang dilaksanakan unit kerja vertikal sebagai berikut.

1. Survei kepuasan pelayanan : terkait tingkat kepuasan stakeholders atas pelayanan yang diberikan oleh KPP.

2. Survei efektivitas penyuluhan : terkait pemberian informasi atau edukasi perpajakan yang dilakukan oleh KPP.

3. Survei efektivitas kehumasan : terkait pelaksanaan kegiatan kehumasan oleh Kanwil DJP.

Kuesioner survei berasal dari Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat.

Selain survei yang dilaksanakan oleh unit kerja vertikal, Kantor Pusat DJP melalui Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat bekerja sama dengan pihak surveyor mengadakan Survei Kepuasan Layanan dan Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan untuk realisasi IKU Triwulan IV.

Survei tersebut mengukur:

1. Tingkat kepuasan pengguna layanan DJP;
2. Tingkat efektivitas penyuluhan perpajakan; dan
3. Tingkat efektivitas kehumasan perpajakan.

Penghitungan capaian IKU dihitung dengan proporsi survei triwulanan sebesar 5% dan survei nasional tahunan DJP 85%. Realisasi IKI adalah hasil survei terkait kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan.

c. Formula IKU

Indeks Hasil Survei

d. Realisasi IKU

REALISASI KEPUASAN PELAYANAN DAN EFEKTIVITAS PENYULUHAN										
Indeks Kepuasan Pelayanan, Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan Kanwil DJP dan Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan KPP Tahun 2024										
No	KANWIL/KPP	Nilai Indeks Triwulan IV Tahun 2024			Nilai Indeks Triwulan IV Tahun 2024		Nilai realisasi IKU			
		Indeks Kepuasan Pelayanan	Indeks Efektivitas Penyuluhan	Indeks Efektivitas Kehumasan	Indeks KPP	Indeks Kanwil	Realisasi IKU KPP TW IV	Realisasi Y 2024 KPP	Realisasi IKU Kanwil TW IV	Realisasi Y. 2024 Kanwil
	KANWIL DJP SUMATERA UTARA II	81.59	85.75	85.87	87.74	87.74	90.83	108.83	90.95	108.95
341	KPP PRATAMA SIBOLGA	92.04	93.21	97.62	97.62	97.62	90.83	108.83	90.95	108.95
342	KPP PRATAMA KISARAN	86.97	84.94	85.95	85.95	85.95	89.10	106.90	89.10	106.90
343	KPP PRATAMA TEBING TINGGI	93.91	85.77	89.84	89.84	89.84	93.13	111.13	93.13	111.13
344	KPP PRATAMA BALIGE	93.87	85.99	89.93	89.93	89.93	93.22	111.22	93.22	111.22
345	KPP PRATAMA KABANJAHE	90.60	85.65	88.13	88.13	88.13	91.35	109.35	91.35	109.35
346	KPP PRATAMA RANTAU PRAPAT	88.65	84.92	86.78	86.78	86.78	89.96	107.95	89.96	107.95
347	KPP PRATAMA PADANG SIDEMPUAN	92.62	87.62	90.12	90.12	90.12	93.42	111.42	93.42	111.42
348	KPP PRATAMA PEMATANG SIANTAR	90.96	83.69	87.32	87.32	87.32	90.52	108.52	90.52	108.52

Sumber : Nota Dinas Direktur P2HUMAS Nomor ND-4331/WPJ.01/2024

Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan tercapai melebihi target yang telah ditentukan dengan capaian persentase sebesar 108.83%. Hal ini mencerminkan membaiknya survei pelayanan dan efektivitas penyuluhan yang diberikan KPP Pratama Sibolga kepada wajib pajak.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realiasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	-	-	-	-	108.83%

Sumber : Laporan Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Sibolga

Realisasi capaian IKU Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan pada tahun 2024 mencapai 108.83% dari target sebesar 100.00%. Hal ini dikarenakan meningkatnya kualitas pelayanan dan edukasi penyuluhan yang diberikan KPP Pratama Sibolga kepada wajib pajak baik melalui layanan di Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) dan helpdesk pelayanan. Tidak ditemukan data historis atas IKU ini dikarenakan IKU ini merupakan IKU baru.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	-	-	100%	108.83%

Sumber : Aplikasi Mandor tanggal 15 Januari 2025

Tercapainya target IKU Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan menggambarkan kualitas layanan yang diberikan semakin membaik. Beberapa hal yang juga melatarbelakangi membaiknya Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan sampai dengan akhir Desember 2024 diantaranya:

- Petugas pelayanan dan penyuluhan selalu memberikan senyum, sapa dan salam kepada wajib pajak.
- Semua layanan tidak dipungut biaya apapun.
- Permohonan wajib pajak diselesaikan pada waktu yang tepat
- Wajib Pajak merasa nyaman dengan kondisi TPT KPP Pratama Sibolga

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100%	-	108.83%

Sumber : Aplikasi Mandor tanggal 15 Januari 2025

Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan, hal ini diiringi dengan kualitas pelayanan yang membaik. Membaiknya kualitas pelayanan dan efektivitas penyuluhan ini didorong dengan kualitas SDM yang mampu memberikan pelayanan terbaik, penyelesaian permohonan yang tepat waktu dan kualitas Tempat Pelayanan Terpadu yang nyaman dan bagus.

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

a. Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian atas kinerja kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- a) Mempertahankan kualitas layanan dan penyuluhan yang baik dan efisien.
- b) Memberikan fasilitas umum di TPT yang mampu memberikan rasa nyaman kepada Wajib Pajak.
- c) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kualitas layanan dan penyelesaian permohonan wajib pajak.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja realisasi kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan. Hal-hal tersebut antara lain:

- a) Penyebab keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan KPP Pratama Sibolga tahun 2024 didominasi dengan kualitas layanan yang diberikan dan penyelesaian permohonan tepat waktu.
- b) Upaya yang dilakukan oleh KPP Pratama Sibolga ialah terus melakukan perbaikan terhadap kualitas layanan edukasi dan memberikan Tempat Pelayanan Terpadu yang nyaman.

c. Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian atas kinerja realisasi IKU ini dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Adapun langkah efisiensi yang dilakukan oleh KPP Pratama Sibolga adalah melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Capaian atas kinerja Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Adapun program yang telah dilakukan adalah dengan melakukan monitoring atas survey terhadap tingkat kepuasan layanan kepada wajib pajak.

e. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan pajak pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh KPP Pratama Sibolga adalah memperkuat pengawasan berbasis risiko, melakukan edukasi dan sosialisasi kepada Wajib Pajak.

f. Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh KPP Pratama Sibolga dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut ialah dengan optimalisasi pelayanan, menyampaikan hasil pemantauan survei secara rutin dan menindaklanjuti survei tersebut untuk mengatasi kendala pelayanan yang tidak memuaskan.

g. Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat

Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan KPP Pratama Sibolga ialah membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum seperti di TPT KPP Pratama Sibolga, menyediakan kursi roda bagi penyandang disabilitas, serta pemerintah melalui Kementerian Keuangan yang membuat program pemberian insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.

- h. Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu seperti pajak yang dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> Membuat kotak saran untuk wajib pajak; Melakukan survey terkait kualitas layanan yang diberikan kepada wajib pajak; Memberikan fasilitas umum yang dapat membuat wajib pajak merasa lebih nyaman. 	2025

▪ **IKU 5a-CP : Persentase pengawasan pembayaran masa**

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
Target	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
Realisasi	59.76%	112.24%	112.24%	105.52%	105.52%	111.60%	111.60%
Capaian	66.39	120.00	120.00	117.24	117.24	120.00	120.00

Sumber : Laporan Penjelasan Progress IKU Triwulan IV 2024 KPP Pratama Sibolga

a. Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan pembayaran masa melalui kegiatan penelitian atas kesesuaian dan ketepatan pembayaran masa pada tahun pajak berjalan sehingga kepatuhan Wajib Pajak meningkat dan penerimaan pajak dapat tercapai optimal.

b. Definisi IKU

Pengawasan Pembayaran Masa adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024). Kegiatan pengawasan pembayaran masa dibagi menjadi:

- Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis; dan
- Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berdasarkan Wilayah).

Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis: adalah penjumlahan Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti, Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 dan Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan atas Wajib Pajak Strategis.

a) Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti (Strategis):

- Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti adalah persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti.

b) Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 (Strategis):

Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 adalah penjumlahan atas realisasi Kuantitas Penelitian dan Kualitas Penelitian. Kuantitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara realisasi Jumlah Wajib Pajak yang Dilakukan Penelitian dengan Jumlah Wajib Pajak yang Seharusnya Dilakukan Penelitian. Kualitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah Tindak Lanjut Kenaikan Angsuran dengan Jumlah Penelitian yang Diterbitkan Surat Imbauan. Terhadap Komponen Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25, berlaku pembobotan komponen Kuantitas dan Kualitas sebagaimana berikut: 40% untuk Kuantitas Penelitian; 60% untuk Kualitas Penelitian. Dalam hal tidak terdapat target angka mutlak pada komponen Kualitas Penelitian (penyebut = 0), maka penghitungan realisasi menggunakan bobot 100% untuk komponen Kuantitas Penelitian.

- c) Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan (Strategis):
Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan adalah penjumlahan atas realisasi Kuantitas Penelitian dan Kualitas Penelitian. Kuantitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Diterbitkan dibandingkan dengan Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Seharusnya Diterbitkan. Terhadap Komponen Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan, berlaku pembobotan komponen Kuantitas dan Kualitas sebagaimana berikut: 60% untuk Kuantitas Penelitian; 40% untuk Kualitas Penelitian.
- d) Pada kondisi terdapat target angka mutlak pada ketiga komponen tersebut (penyebut \neq 0), maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis menggunakan bobot sebagaimana berikut:
- 40% untuk Persentase Penerbitan STP yang Seharusnya Diterbitkan;
 - 30% untuk Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25;
 - 30% untuk Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan;
- Dalam hal tidak terdapat target angka mutlak pada salah satu komponen tersebut (penyebut = 0), maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis menggunakan bobot 50% untuk masing-masing komponen yang memiliki target angka mutlak.
- Dalam hal terdapat hanya satu komponen yang memiliki target angka mutlak, maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis menggunakan bobot 100% untuk komponen yang memiliki target angka mutlak. Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berdasarkan Wilayah) adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024) atas Wajib Pajak Lainnya (Berdasarkan Wilayah). Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berdasarkan Wilayah): adalah penjumlahan Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti, Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi, dan Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan atas Wajib Pajak Lainnya (Berdasarkan Wilayah)
- e) Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti:
Pada dasarnya semua jenis pembayaran masa wajib dilakukan pengawasan. Namun, dalam rangka efektivitas pengawasan maka dilakukan prioritas terutama terhadap jenis data yang telah disediakan pada sistem aplikasi, atas pajak yang tidak atau kurang dibayar, yang dianggap memberikan kontribusi

besar bagi penerimaan pajak, dan/atau kriteria yang diatur melalui Nota Dinas tersendiri dari kantor pusat. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti adalah jumlah daftar nominatif STP dalam rangka pengawasan pembayaran PPh, PPN, dan pajak lainnya, serta pelaporan SPT Tahunan dan SPT Masa atas masa pajak November sebelum tahun berjalan sampai dengan masa pajak Oktober tahun berjalan untuk STP Masa, dan tahun pajak sebelum tahun berjalan untuk STP Tahunan. Atas keterlambatan pelaporan dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang telah disampaikan SPT-nya dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang tidak disampaikan SPT-nya bagi pembayaran yang tidak diwajibkan adanya penyampaian SPT. Nominal sanksi minimal ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.

- f) Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi
- Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi mencakup Capaian Kuantitas Penambahan Wajib Pajak dan Capaian Kualitas Penambahan Wajib Pajak;
 - Capaian Kuantitas Penambahan Wajib Pajak adalah akumulasi Jumlah Penambahan Wajib Pajak dan Jumlah LHP2DKE non NPWP dari SP2DKE Outstanding dengan bobot tertentu, dibagi Target Kuantitas Penambahan Wajib Pajak.
 - Target Kuantitas Penambahan Wajib Pajak terdiri dari Penambahan Wajib Pajak baru hasil tindak lanjut DSE serta penyelesaian SP2DKE Outstanding menjadi LHP2DKE yang tidak terbit NPWP. NPWP yang dihitung sebagai realisasi adalah NPWP dengan status aktif pada saat pengukuran
- g) Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan:
- Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan adalah penjumlahan atas realisasi Kuantitas Penelitian dan Kualitas Penelitian. Kuantitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Diterbitkan dibandingkan dengan Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Seharusnya Diterbitkan. Terhadap Komponen Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan, berlaku pembobotan komponen Kuantitas dan Kualitas sebagaimana berikut 60% untuk Kuantitas Penelitian, 40% untuk Kualitas Penelitian. .

penindaklanjutan yang optimal atas daftar nominatif STP, penelitian kenaikan angsuran PPh pasal 25, dan tindak lanjut data perpajakan yang masih berjalan.

- Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase pengawasan pembayaran masa	100%	90%	90%	120%

Sumber : Aplikasi Mandor tanggal 15 Januari 2025

Tercapainya target IKU Persentase pengawasan pembayaran masa menggambarkan pemulihan aktivitas ekonomi yang semakin menguat dan optimalnya kinerja pengawasan atas pembayaran masa strategis dan kewilayahan. Beberapa hal yang juga melatarbelakangi membaiknya kinerja pengawasan pembayaran masa sampai dengan akhir Desember 2024 diantaranya:

- Penindaklanjutan atas jumlah daftar normatif STP pada Wajib Pajak Strategis dan Wajib Pajak Kewilayahan.
- Optimalnya Penelitian kenaikan angsuran pasal 25 dan kuantitas penelitian kenaikan angsuran PPh pasal 25 untuk Wajib Pajak Strategis dan Wajib Pajak Kewilayahan.
- Penindaklanjutan data perpajakan tahun berjalan dengan kualitas LHP2DK yang terbit dan pembayaran yang baik.

- Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase pengawasan pembayaran masa	90%	-	120%

Sumber : Aplikasi Mandor tanggal 15 Januari 2025

Pengawasan pembayaran masa sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan, hal ini diiringi dengan pengawasan pembayaran masa untuk Wajib Pajak Strategis dan Wajib Pajak Kewilayahan yang

membaik, penindaklanjutan atas daftar normatif STP yang ada dan penindaklanjutan atas data perpajakan pada tahun berjalan yang optimal.

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

a. Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja
Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian atas kinerja pengawasan pembayaran masa. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- a) Penelitian dan tindak lanjut hasil data matching.
- b) Meningkatkan produktivitas dan *success rate* (melibatkan pemeriksa, penyidik, dan penilai) atas penerbitan SP2DK di Approweb.
- c) Melakukan monitoring dan evaluasi untuk mendorong unit vertikal melakukan pengawasan kepatuhan pembayaran dan pelaporan Wajib Pajak dalam menerbitkan STP.
- d) Penurunan data dan panduan pelaksanaan kegiatan penelitian kenaikan angsuran yang dapat digunakan Kanwil dalam melakukan penelitian dan pengawasan kenaikan angsuran.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong peningkatan kinerja realisasi pengawasan pembayaran masa. Hal-hal tersebut antara lain:

- a) Penyebab keberhasilan/peningkatan kinerja Pengawasan pembayaran masa pajak KPP Pratama Sibolga tahun 2024 didominasi dengan kegiatan pengawasan Wajib Pajak oleh AR/Pemeriksa/Penilai/dan Penyuluh agar terus mengikuti perkembangan kegiatan ekonomi di berbagai sektor sehingga penerimaan dari aktivitas PPM dan PKM dapat mencapai target yang sudah ditetapkan.
- b) Upaya yang dilakukan oleh KPP Pratama Sibolga ialah terus melakukan penjagaan, pengawasan, penindaklanjutan data dan monitoring pembayaran masa sampai dengan 31 Desember 2024 agar dapat memenuhi target penerimaan dengan turut berkoordinasi dengan Kepala Kanwil DJP Sumatera Utara II.

c. Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian atas kinerja realisasi IKU ini dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Adapun langkah efisiensi yang dilakukan oleh KPP Pratama Sibolga adalah melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien dan Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Capaian atas kinerja realisasi IKU ini merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Adapun program yang telah dilakukan adalah Meningkatkan penerimaan pajak dengan melakukan intensifikasi pajak dengan menyusun daftar sasaran prioritas pengawasan sehingga kegiatan pengawasan yang dilakukan lebih terarah.

e. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

Realisasi pengawasan pembayaran masa pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi pengawasan pembayaran masa. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh KPP Pratama Sibolga adalah dengan memperkuat pengawasan berbasis risiko, melakukan edukasi dan sosialisasi kepada Wajib Pajak.

f. Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Realisasi pengawasan pembayaran masa pajak dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh KPP Pratama Sibolga dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut ialah dengan optimalisasi perencanaan penerimaan, menyampaikan hasil pemantauan kinerja penerimaan secara rutin dan menindaklanjuti laporan tersebut untuk mengatasi kendala kondisi ekonomi yang masih penuh dengan ketidakpastian.

g. Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti

misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat

Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan KPP Pratama Sibolga ialah membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum seperti di TPT KPP Pratama Sibolga, menyediakan kursi roda bagi penyandang disabilitas, serta pemerintah melalui Kementerian Keuangan yang membuat program pemberian insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.

- h. Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu seperti pajak yang dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none">• Peningkatan Strategi Pengawasan;• Melakukan Optimalisasi Sumber Daya;• Melakukan penyusunan DSP4 Adjustment dengan berfokus pada sektor unggulan dan sektor lainnya yang diproyeksikan tumbuh di tahun 2025 demi menunjang penerimaan negara yang optimal;• Melakukan monitoring terhadap pengawasan kenaikan angsuran.	2025

▪ **IKU 6a-CP : Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan**

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	65.26%	107.85%	107.85%	101.34%	101.34%	118.44%	118.44%
Capaian	65.26%	107.85%	107.85%	101.34%	101.34%	118.44%	118.44%

Sumber : Laporan Penjelasan Progress IKU Triwulan IV 2024 KPP Pratama Sibolga

a. Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

b. Definisi IKU

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dibagi menjadi:

- Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis (bobot 50%)

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis (LHPt), penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) atas Wajib Pajak Strategis. Kegiatan Penelitian dan Analisis dilaksanakan sesuai dengan Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) yang telah disetujui oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak. Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis adalah penjumlahan realisasi dua komponen:

- Komponen Penelitian

Komponen Penelitian merupakan perbandingan antara jumlah bobot Laporan Hasil Penelitian (LHPt) WP Strategis sesuai DPP Tahun 2024 termasuk LHPt tindak lanjut atas data konkret sesuai SE-09/PJ/2023 dengan jumlah target angka mutlak LHPt Wajib Pajak Strategis. Jumlah target angka mutlak LHPt Wajib Pajak Strategis adalah jumlah target angka mutlak yang ditentukan oleh Kanwil DJP masing-masing.

- **Komponen Tindak Lanjut**

Komponen Tindak Lanjut merupakan perbandingan antara jumlah bobot capaian penyelesaian DPP Tahun 2024 dan SP2DK Outstanding dengan jumlah target angka mutlak Laporan Hasil Permintaan Data dan/ atau Keterangan (LHP2DK) Wajib Pajak Strategis.

- **Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Kewilayahan) (Bobot 50%).**

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Lainnya (Berdasarkan Kewilayahan) merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis, penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) atas WP Lainnya (Berdasarkan Kewilayahan). Kegiatan ini dilaksanakan sebagaimana diatur dalam SE-05/PJ/2022 diterbitkan dalam rangka menindaklanjuti data pemicu dan/atau penguji yang telah tersedia dalam Approweb atau analisis untuk meningkatkan kepatuhan material WP, dan bukan dalam rangka himbauan kepatuhan formal maupun dalam rangka menagih sanksi atas keterlambatan pelaporan SPT Masa dan/atau pelunasan pajaknya. Sehubungan dengan berlakunya SE-09/PJ/2023 tentang Penyelesaian Tindak Lanjut atas Data Konkret, maka Laporan Hasil Penelitian (LHPt) hasil penelitian atas data konkret sebagaimana dimaksud pada SE-09/PJ/2023 dengan daluwarsa penetapan ≤ 90 hari yang ditindaklanjuti tanpa penerbitan SP2DK diakui sebagai realisasi sesuai ketentuan pada Manual IKU ini. Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (berbasis Kewilayahan) adalah penjumlahan capaian dua komponen, Komponen Kuantitas (40%) dan Komponen Kualitas (60%).

- **Komponen Kuantitas**

Capaian Komponen Kuantitas merupakan penjumlahan antara Capaian Tindak Lanjut atas Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) (50%) dan Capaian Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding (50%).

- Komponen Kualitas

Capaian Komponen Kualitas merupakan perbandingan antara Jumlah Tindak Lanjut atas DPP dan Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding berdasarkan rekomendasi yang dihasilkan dengan Target Komponen Kualitas.

c. Formula IKU

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan data dan/atau keterangan = (50% x Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis) + (50% x Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan)).

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis = (40% x Capaian Penelitian) + (60% x Capaian Tindak Lanjut).

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) = (40% x Capaian Kuantitas) + (60% x Capaian Kualitas).

d. Realisasi IKU

The screenshot displays the 'IKU P4DK Strategis 2024' dashboard. It includes a navigation bar with 'Dashboard', 'P4DK Strategis', 'P4DK Kewilayahan', 'Cek Data', and 'Informasi dan Manual IKU'. Below the navigation bar, there are filters for 'Periode IKU' (set to '1.1. Triwulan 4') and buttons for 'Pilih', 'Download Data LHPPT', and 'Download Data LHP2DK'. A 'Target Penetapan Data (ETL)' section shows dates for '09 Januari 2025, 21:01 WIB' and '10 Januari 2025, 13:01 WIB'. The main table is titled 'Komponen Penelitian (40 %)' and 'Komponen Tindak Lanjut (60 %)' and lists various units with their respective targets and actuals.

Unit Kerja	Komponen Penelitian (40 %)			Komponen Tindak Lanjut (60 %)					Realisasi IKU	Trajectory	Capaian IKU (Max 120%)		
	Target LHPPT	Jumlah Bobot LHPPT	Capaian Penelitian (Max 120%)	Target LHP2DK	Jumlah Bobot LHP2DK atas DPP 2024	LHP2DK dari SP2DK Outstanding		Capaian Tindak Lanjut (Max 120%)					
	b	c	d = c / b	e	f	Defincom	Jumlah Bobot LHP2DK	g	h	i	j	k	l
030. KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA UTARA II	1.060,00	1.933,30	120,00%	1.060,00	1.159,85	328	269,55	120,00%	120,00%	100%	120,00%		
114 PRATAMA TEBING TINGGI	120,00	278,30	120,00%	120,00	177,60	13	9,65	120,00%	120,00%	100%	120,00%		
115 PRATAMA KISARAN	160,00	295,00	120,00%	160,00	195,70	27	25,05	120,00%	120,00%	100%	120,00%		
116 PRATAMA RANTAU PRAPAT	140,00	272,20	120,00%	140,00	176,85	74	62,30	120,00%	120,00%	100%	120,00%		
117 PRATAMA PEMATANG SIANTAR	160,00	277,40	120,00%	160,00	143,85	50	30,05	108,69%	113,21%	100%	113,21%		
118 PRATAMA PADANG SIDEMPLUAN	140,00	197,40	120,00%	140,00	132,75	67	56,95	120,00%	120,00%	100%	120,00%		
120 PRATAMA SIBOLGA	140,00	290,00	120,00%	140,00	117,60	55	47,35	117,82%	116,89%	100%	116,89%		
127 PRATAMA BALIGE	100,00	176,00	120,00%	100,00	160,50	22	19,35	119,55%	119,91%	100%	119,91%		
128 PRATAMA KABANJAHE	100,00	175,00	120,00%	100,00	117,00	20	18,85	120,00%	120,00%	100%	120,00%		
0. NASIONAL	62.600,00	108.016,80	120,00%	62.410,00	86.372,45	16.837	12.431,10	120,00%	120,00%	100%	120,00%		

Sumber : Aplikasi Mandor DJP tanggal 15 Januari 2025

Unit Kerja	Komponen Kuantitas (40%)						Komponen Kualitas (60%)			Realisasi IKU	
	LHP2DK dari DPP (50%)			LHP2DK dari SP2DK Outstanding (50%)			Capaian Kuantitas (Maka, 120%)	Target LHP2DK	Jumlah Bobot LHP2DK		Capaian Kualitas
	Target DPP	Jumlah Bobot	Realisasi	Target SP2DK Outstanding	Jumlah Bobot	Realisasi					
a	b	c	d = c : b	e	f	g = f : e	h = 50% x d + 50% x g	i	j	k = j : i	l = 40% x h + 60% x k
030. KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA UTARA II	3.755,05	4.861,20	129,46%	1.242,50	1.833,80	155,64%	120,00%	4.997,55	6.851,20	137,09%	130,25%
114 PRATAMA TEBING TINGGI	575,90	782,40	135,86%	61,60	80,80	131,17%	120,00%	637,50	875,10	137,27%	130,36%
115 PRATAMA KISARAN	556,40	769,60	138,32%	77,40	114,00	148,32%	120,00%	633,80	889,35	140,32%	132,19%
116 PRATAMA RANTAU PRAPAT	356,20	476,40	133,75%	392,00	508,60	150,15%	120,00%	746,20	1.068,35	142,79%	133,87%
117 PRATAMA PEMATANG SIANTAR	668,65	905,20	135,34%	239,00	381,00	159,41%	120,00%	907,65	1.338,65	147,45%	136,47%
118 PRATAMA PADANG SIDEMPLUAN	497,50	549,60	112,74%	300,00	495,00	164,94%	120,00%	788,10	1.064,20	135,03%	129,02%
126 PRATAMA SIBOLGA	444,60	525,00	118,08%	36,00	46,20	133,89%	120,00%	480,60	564,35	117,43%	118,48%
127 PRATAMA BALIGE	325,00	401,80	123,63%	81,90	146,40	178,75%	120,00%	406,90	512,75	126,01%	123,61%
128 PRATAMA KABANJAHE	340,60	456,20	133,94%	54,00	78,20	144,81%	120,00%	394,60	538,45	136,45%	129,87%
NASIONAL	176.024,55	220.919,80	125,51%	22.926,50	46.465,20	202,67%	120,00%	198.951,05	259.998,15	130,88%	126,41%

Sumber : Aplikasi Mandor DJP tanggal 15 Januari 2025

Realisasi penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan sampai dengan akhir Desember 2024 tercatat sebesar 118.44% dari trajectory sebesar 100%. Realisasi ini bertahan dari tahun sebelumnya. Penyelesaian IKU permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan ini didukung pembuatan penelitian dan analisa (LHPt), penerbitan SP2DK dan ditindaklanjuti dengan penerbitan laporan hasil permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan (LHP2DK) atas wajib pajak strategis dan kewilayahan yang optimal.

- Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realiasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	97.90%	147.42%	120%	120%	118.44%

Sumber : Laporan Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Sibolga

Realisasi Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Pajak pada tahun 2024 mengalami kenaikan dari 2 (dua) tahun sebelumnya. Hal tersebut dikarenakan meningkatnya kualitas dan kuantitas penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Pajak yang dilakukan selama tahun 2024 untuk Wajib Pajak strategis dan Wajib Pajak Kewilayahan.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	100%	100%	118.44%

Sumber : Aplikasi Mandor tanggal 15 Januari 2025

Tercapainya target IKU Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan menggambarkan meningkatnya kualitas dan kuantitas penyelesaian atas permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan. Beberapa hal yang juga melatarbelakangi membaiknya penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan sampai dengan akhir Desember 2024 diantaranya:

- Optimalnya kegiatan pengawasan kepatuhan perpajakan Wajib Pajak.
- Kualitas data yang diberikan mampu ditindaklanjuti dengan baik oleh Account Representative
- Realisasi atas LHP2DK yang telah terbit mampu mencapai target yang diinginkan
- Wajib pajak menanggapi himbauan atas permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dengan baik.

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	100%	118.44%

Sumber : Aplikasi Mandor tanggal 15 Januari 2025

Penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan, hal ini diiringi dengan kinerja jenis pajak utama yang mengalami pertumbuhan positif, Peningkatan kualitas data yang mampu menggambarkan kegiatan usaha wajib pajak yang komprehensif, dan adanya komunikasi yang efektif antara wajib pajak dan Account Representative terkait permintaan penjelasan atas data/atau keterangan.

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

a. Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja
Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian atas kinerja penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- a) Penelitian dan tindak lanjut hasil data matching.
- b) Meningkatkan produktivitas dan *success rate* (melibatkan pemeriksa, penyidik, dan penilai) atas penerbitan SP2DK di Approweb.
- c) Melakukan analisis perilaku pembayaran WP terhadap aktivitas sektor usaha.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong peningkatan kinerja realisasi penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan. Hal-hal tersebut antara lain:

- a) Penyebab keberhasilan/peningkatan kinerja penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan KPP Pratama Sibolga tahun 2024 didominasi dengan kegiatan pengawasan Wajib Pajak oleh AR/Pemeriksa/Penilai/dan Penyuluh agar terus mengikuti perkembangan kegiatan ekonomi di berbagai sektor sehingga penerimaan dari aktivitas PPM dan PKM dapat mencapai target yang sudah ditetapkan.
- b) Upaya yang dilakukan oleh KPP Pratama Sibolga ialah terus melakukan penjagaan, pengawasan, dan monitoring SP2DK yang masih outstanding sampai dengan 31 Desember 2024 agar dapat memenuhi target penerimaan dengan turut berkoordinasi dengan Kepala Kanwil DJP Sumatera Utara II.

c. Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian atas kinerja realisasi penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Adapun langkah efisiensi yang dilakukan oleh KPP Pratama Sibolga adalah melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.

- d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Capaian atas kinerja realisasi IKU ini merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Adapun program yang telah dilakukan adalah meningkatkan penerimaan pajak dengan melakukan intensifikasi pajak dengan menyusun daftar sasaran prioritas pengawasan sehingga kegiatan pengawasan yang dilakukan lebih terarah.

- e. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

Realisasi persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh KPP Pratama Sibolga adalah memperkuat pengawasan berbasis risiko, melakukan edukasi dan sosialisasi kepada Wajib Pajak.

- f. Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Realisasi persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh KPP Pratama Sibolga dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut ialah dengan optimalisasi perencanaan penerimaan, menyampaikan hasil pemantauan kinerja penerimaan secara rutin dan menindaklanjuti laporan tersebut untuk mengatasi kendala kondisi ekonomi yang masih penuh dengan ketidakpastian.

- g. Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat

Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan KPP Pratama Sibolga ialah membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum seperti di TPT KPP Pratama Sibolga, menyediakan kursi roda bagi penyandang disabilitas, serta pemerintah melalui Kementerian Keuangan yang membuat program pemberian insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.

- h. Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu seperti pajak yang dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan pendekatan persuasif agar Wajib Pajak merespon dan membayar melalui surat undangan pembahasan dan melakukan kunjungan kerja ke lokasi Wajib Pajak untuk mendapatkan data lebih lanjut tentang Wajib Pajak yang akan dituangkan di dalam Laporan Hasil Kunjungan; • Melakukan penelitian Kepatuhan Material tahun-tahun sebelumnya (yang belum daluarsa dan belum dihimbau); • Melakukan penyusunan DSP4 Adjustment dengan berfokus pada sektor unggulan dan sektor lainnya yang diproyeksikan tumbuh di tahun 2025 demi menunjang penerimaan negara yang optimal; • Merencanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak termasuk tata kelola teknologi informasi dan komunikasi serta data WP dengan membentuk Komite Kepatuhan Wajib Pajak sebagai upaya peningkatan kepatuhan WP yang komprehensif, terintegrasi, dan berkelanjutan. 	2025

▪ **IKU 6b-N : Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan**

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi				116.19%	116.19%	120%	120%
Capaian				116.19	116.19	120	120

Sumber : Laporan Penjelasan Progress IKU Triwulan IV 2024 KPP Pratama Sibolga

a. Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

b. Definisi IKU

Realisasi IKU Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu pemanfaatan data STP dan data Matching. Adapun definisi dari masing-masing komponen sebagai berikut:

- Pemanfaatan Data STP

Persentase Pemanfaatan Data STP adalah persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti yaitu jumlah potensi STP dalam rangka pengawasan pembayaran PPh, PPN, dan pajak lainnya, serta pelaporan SPT Tahunan dan SPT Masa atas masa pajak Januari 2020 hingga Oktober 2023 (STP Masa), tahun pajak 2020 hingga 2022 (STP Tahunan). Atas keterlambatan pelaporan dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang telah disampaikan SPT-nya dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang tidak disampaikan SPT-nya bagi pembayaran yang tidak diwajibkan adanya penyampaian SPT. Nominal sanksi minimal ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP. Daftar nominatif STP selain tahun berjalan disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi Approweb. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti pada Triwulan I, II, III dan IV adalah atas Daftar Nominatif STP yang diturunkan melalui aplikasi sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu:

- triwulan I: sampai dengan bulan Februari;
- triwulan II: sampai dengan bulan Mei;
- triwulan III: sampai dengan bulan Agustus; dan
- triwulan IV: sampai dengan bulan November.

Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti adalah tindaklanjut Daftar Nominatif STP yang disediakan oleh kantor pusat yang ditetapkan sebagai target. Jika AR tidak memiliki Dafnom STP namun menerbitkan STP dapat diakui sebagai IKU di level unit kerja Seksi/KPP/Kanwil. Capaian IKU Pemanfaatan Data STP Maksimal 120%. Jika AR tidak memiliki Dafnom STP, maka capaian komponen STP dihitung N/A, sehingga Realisasi IKU Pemanfaatan Data 100% hanya dari Data Matching. Panduan terkait penetapan target dan penghitungan realisasi Persentase Pemanfaatan Data STP ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.

- Pemanfaatan Data Matching

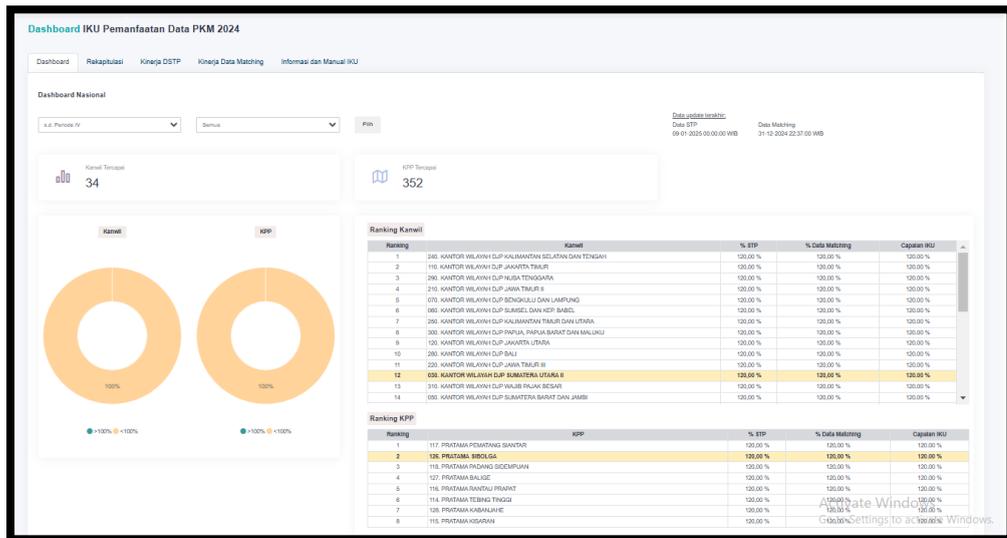
Jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan adalah jumlah WP yang memiliki baris data pemicu dengan masa pajak Januari 2020 hingga Oktober 2023 (Masa) dan tahun pajak 2020 hingga 2022 (Tahunan); memiliki data konkret tahun 2019 (masa/tahun pajak); memiliki baris Data Pemicu dan Data Konkret aktif yang tersedia di approweb pada tahun 2024; tidak masuk sebagai WP yang menjadi target dalam DSPP dan DSPPH tahun 2024; tidak termasuk WP cabang di KPP BKM (Besar, Khusus, Madya), yang tidak dapat dimasukkan sebagai DPP tahun 2024. Jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan yang ditindaklanjuti merupakan tindak lanjut atas WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan terdiri dari tindak lanjut oleh AR dengan menerbitkan LHPT; tindak lanjut oleh WP, yaitu WP melakukan pembayaran dan/atau pelaporan atau pembetulan SPT sebelum ditindaklanjuti oleh AR; jika WP sedang dilakukan pemeriksaan oleh Fungsional Pemeriksa Pajak, AR sudah mengirimkan ND pengiriman data pemicu ke Seksi P3 dan meneruskan salinannya ke email data.pemicu@pajak.go.id (dilengkapi dengan bukti bahwa WP sedang diperiksa); jika WP sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan, AR sudah mengirimkan ND pengiriman seluruh data pemicu ke kanwil dan meneruskan salinannya ke email data.pemicu@pajak.go.id (dilengkapi dengan bukti bahwa WP sedang dibukper). Daftar Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi Approweb dengan cutoff sampai dengan 30 September 2024. Capaian IKU Pemanfaatan Data Matching maksimal sebesar 120%. Jika AR tidak memiliki

Data Pemicu dan Data Konkret maka capaian komponen Data Matching dihitung N/A. Target komponen Pemanfaatan Data Matching sebesar 80%.

c. Formula IKU

Formula
Pemanfaatan Data selain tahun berjalan :
$\frac{(\text{Capaian Pemanfaatan Data STP}) + (\text{Capaian Pemanfaatan Data Matching})}{2}$
Pemanfaatan Data STP :
$\frac{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti}} \times 100\%$
Pemanfaatan Data Matching :
$(\text{Rata-rata Capaian IKU/IKI Pemanfaatan Data selain tahun berjalan Account Representative di KPP...})$
$\frac{\text{Jumlah WP yang Memiliki Data Pemicu selain tahun berjalan yang ditindaklanjuti}}{\text{Target Dafnom STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti}} \times 100\%$

d. Realisasi IKU



Sumber : Aplikasi Mandor DJP tanggal 15 Januari 2025

Realisasi Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan sampai dengan akhir Desember 2024 tercatat dengan capaian sebesar 120% dari target yang telah ditentukan.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realiasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan	-	-	-	120%	120%

Sumber : Laporan Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Sibolga

Realisasi capaian IKU Persentase Realisasi Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan pada tahun 2024 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Hal tersebut dikarenakan kualitas data yang di berikan banyak yang anomali dan perlu tindaklanjuti dan diteliti lebih lanjut lagi.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan	-	-	100%	120%

Sumber : Aplikasi Mandor tanggal 15 Januari 2025

Tercapainya target IKU Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan menggambarkan banyaknya data-data yang mampu ditindaklanjuti oleh Account Representative dengan optimal. Beberapa hal yang juga melatarbelakangi membaiknya kinerja Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan sampai dengan akhir Desember 2024 diantaranya:

- Account Representative mampu mengolah data STP dan data matching yang muncul pada aplikasi approweb.
- Data-data yang muncul memiliki kualitas yang dapat ditindaklanjuti.
- Penelitian atas pemanfaatan data STP dan pemanfaatan data matching yang berkualitas.

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan	100%	100%	120%

Sumber : Aplikasi Mandor tanggal 15 Januari 2025

Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan, hal ini diiringi dengan peningkatan kualitas data atas data STP dan data matching yang ada. Optimalisasi pemanfaatan data dalam kegiatan pengawasan kepatuhan material WP ini mampu dilaksanakan dengan baik dan mampu melebihi target yang telah ditentukan.

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

a. Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi IKU ini. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- a) Penelitian dan tindak lanjut hasil data matching.
- b) Meningkatkan produktivitas dan success rate (melibatkan pemeriksa, penyidik, dan penilai) atas penerbitan SP2DK di Approweb.
- c) Melakukan monitoring dan evaluasi untuk mendorong unit vertikal melakukan pengawasan kepatuhan pembayaran dan pelaporan Wajib Pajak dalam menerbitkan STP.
- d) Melakukan analisis perilaku pembayaran WP terhadap aktivitas sektor usaha.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja pemanfaatan data selain tahun berjalan. Hal-hal tersebut antara lain:

- a) Penyebab keberhasilan/peningkatan kinerja pemanfaatan data selain tahun berjalan KPP Pratama Sibolga tahun 2024 didominasi dengan penindaklanjutan atas data STP dan data matching yang muncul pada aplikasi approweb.
- b) Upaya yang dilakukan oleh KPP Pratama Sibolga ialah terus melakukan penjagaan, pengawasan, dan monitoring pemanfaatan data STP dan data matching sampai dengan 31 Desember 2024 agar dapat memenuhi target

penerimaan dengan turut berkoordinasi dengan Kepala Kanwil DJP Sumatera Utara II.

c. Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian atas kinerja pemanfaatan data selain tahun berjalan dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Adapun langkah efisiensi yang dilakukan oleh KPP Pratama Sibolga adalah melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Capaian atas kinerja realisasi IKU ini merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Adapun program yang telah dilakukan adalah dengan pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas administrasi perpajakan.

e. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

Realisasi atas IKU ini diperoleh tanpa dokumentasi mitigasi risiko dalam piagam risiko tahun 2024.

f. Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Realisasi persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh KPP Pratama Sibolga dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala ialah dengan optimalisasi penindaklanjutan data STP dan data matching yang optimal.

g. Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat

Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan KPP Pratama Sibolga ialah membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum seperti di TPT KPP Pratama Sibolga, menyediakan kursi roda bagi penyandang disabilitas, serta pemerintah melalui Kementerian Keuangan yang membuat program pemberian insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.

- h. Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

Pemanfaatan data dalam tahun berjalan merupakan salah satu upaya penggalian potensi perpajakan yang digunakan sebagai sumber penerimaan APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu seperti pajak yang dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> Merencanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tindaklanjut data matching dan data STP Wajib Pajak serta membentuk Komite Kepatuhan Wajib Pajak sebagai upaya peningkatan kepatuhan WP yang komprehensif, terintegrasi, dan berkelanjutan; Melakukan pengawasan terhadap tindaklanjut atas data STP dan data matching; Melakukan tindaklanjut atas data normatif STP dan data matching menggunakan aplikasi yang terupdate. 	2025

▪ **IKU 6c-N : Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu**

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	120.00%	120%	120%	96.25%	96.25%	110.92%	110.92%
Capaian	120.00	120	120	96.25	96.25	110.92	110.92

Sumber : Laporan Penjelasan Progress IKU Triwulan IV 2024 KPP Pratama Sibolga

a. Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

b. Definisi IKU

Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib pajak KPP adalah kegiatan dalam rangka memastikan pelaksanaan tugas komite kepatuhan pada KPP untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dihitung dari 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu ditambah dengan 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan ditambah dengan 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan.

- Komponen 1

Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu (bobot 30%). Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP adalah laporan yang disusun oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP (KKWP KPP) dalam rangka merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak.

- Komponen 2

Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan (bobot 40%). Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan digunakan untuk mengukur aktivitas inti yaitu kegiatan pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan pada Kantor Pelayanan Pajak. Pada tahun 2024 Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan yang diperhitungkan adalah nilai PKM rapor unit kerja dari dashboard Rapor Kinerja pada aplikasi Mandor. Target dan panduan akan diatur melalui Nota Dinas KPDJP.

- Komponen 3

Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan (bobot 30%). DSPP (Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan) dalam IKU ini adalah daftar Wajib Pajak yang akan dilakukan pemeriksaan sepanjang tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan dan/atau perubahannya, dan SE-05/PJ/2022 tentang Kebijakan Pengawasan dan/atau perubahannya baik melalui relevant business process maupun DSPP Kolaboratif.

c. Formula IKU

Formula:
Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu = 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu + 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan + 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan
Masing-masing komponen perhitungan bobot maksimal adalah 120%
Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu (bobot 30%) = (akumulasi poin penyelesaian laporan / akumulasi target poin) x 100%
Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan (bobot 40%) = nilai PKM rapor kinerja unit kerja pada aplikasi Mandor
Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan (bobot 30%) = $\frac{\text{Nilai Potensi yang diusulkan}}{\text{Target Pemenuhan Bahan Baku}} \times 100\%$

d. Realisasi IKU

6c-N Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu				Realisasi berdasarkan Link Grup KKWP
Formula apabila tidak tersedia data dari grup				110,92%
No.	Komponen	Realisasi	Realisasi Akhir	
1	Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	120%	120,00%	
2	Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan	120%		
3	Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan	120%		

Sumber : Nota Dinas Kantor Pusat

Realisasi Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu sampai dengan akhir Desember 2024 telah mencapai realisasi maksimal yaitu sebesar 110.92%.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realiasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	-	-	-	-	110.92%

Sumber : Laporan Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Sibolga

Realisasi capaian IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu pada tahun 2024 merupakan IKU yang baru dan tidak memiliki data historis. IKU ini mampu mencapai lebih dari target sebesar 110.92% dikarenakan adanya pengawasan pelaksanaan tugas komite kepatuhan yang tepat waktu dan kualitas penyiapan bahan baku terhadap target yang terealisasikan.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	-	-	100%	110.92%

Sumber : Aplikasi Mandor tanggal 15 Januari 2025

Tercapainya target IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu menggambarkan KPP Pratama mampu mengelola keefektifitasan pengelolaan komite dan laporan kepatuhan wajib pajak yang tepat waktu serta kualitas penyiapan bahan baku terhadap target yang telah direalisasikan. Beberapa hal yang juga melatarbelakangi membaiknya efektivitas pengelolaan komite kepatuhan wajib pajak sampai dengan akhir Desember 2024 diantaranya:

- Kualitas pemilihan daftar wajib pajak yang akan ditetapkan sebagai bahan baku untuk komite kepatuhan
- Optimalnya pengelolaan komite kepatuhan Wajib Pajak KPP Pratama Sibolga yang tepat waktu
- Besaran nilai PKM unit kerja terhadap daftar bahan baku yang telah disediakan

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%	-	110.92%

Sumber : Aplikasi Mandor tanggal 15 Januari 2025

Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan, hal ini diiringi dengan kualitas bahan baku yang baik untuk ditindaklanjuti. Wajib Pajak yang diusulkan dalam komite kepatuhan memiliki data historis dan background yang sebelumnya telah dilakukan analisa sehingga bahan baku tersebut mampu ditindaklanjuti dengan baik

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

a. Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi efektivitas pengelolaan komite kepatuhan wajib pajak KPP tepat waktu.

Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- a) Melakukan analisis perilaku pembayaran WP terhadap aktivitas sektor usaha.
- b) Meningkatkan tingkat keefektifitasan pengelolaan komite dan laporan pelaksanaan komite kepatuhan wajib pajak.
- c) Melakukan monitoring dan evaluasi untuk mendorong unit vertikal melakukan pengawasan kepatuhan pembayaran dan pelaporan Wajib Pajak pada bahan baku yang telah dibahas sebelumnya.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja realisasi IKU ini. Hal-hal tersebut antara lain:

- a) Penyebab keberhasilan/peningkatan kinerja efektivitas pengelolaan komite kepatuhan wajib pajak kpp tepat waktu KPP Pratama Sibolga tahun 2024 didominasi dengan rapat koordinasi terkait bahan baku dan pemilihan Wajib Pajak yang akan di usulkan pada rapat komite kepatuhan.
- b) Upaya yang dilakukan oleh KPP Pratama Sibolga ialah terus melakukan penjagaan, pengawasan, dan monitoring tindaklanjut pada bahan baku yang sudah disepakati agar dapat memenuhi target penerimaan dengan turut berkoordinasi dengan Kepala Kanwil DJP Sumatera Utara II.

c. Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian atas kinerja pemanfaatan data selain tahun berjalan dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Adapun langkah efisiensi yang dilakukan oleh KPP Pratama Sibolga adalah melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.

- d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Capaian atas kinerja realisasi IKU ini merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Adapun program yang telah dilakukan adalah dengan melakukan pelaksanaan KKWP tepat waktu, membuat susunan bahan baku pemeriksaan, dan meningkatkan kualitas raport kinerja organisasi.

- e. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

Realisasi atas IKU ini diperoleh tanpa dokumentasi mitigasi risiko dalam piagam risiko tahun 2024.

- f. Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Beberapa kendala yang dihadapi oleh KPP Pratama Sibolga dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut ialah dengan melaksanakan rapat komite kepatuhan yang meliputi pembahasan DSP4 serta meningkatkan kualitas raport kinerja organisasi.

- g. Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat

Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan KPP Pratama Sibolga ialah membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum seperti di TPT KPP Pratama Sibolga, menyediakan kursi roda bagi penyandang disabilitas, serta pemerintah melalui Kementerian Keuangan yang membuat program pemberian insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.

- h. Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

Pajak sebagai sumber penerimaan APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu seperti pajak yang dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai

infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> Merencanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak termasuk tata kelola teknologi informasi dan komunikasi serta data WP dengan membentuk Komite Kepatuhan Wajib Pajak sebagai upaya peningkatan kepatuhan WP yang komprehensif, terintegrasi, dan berkelanjutan; Melakukan penelitian Kepatuhan Material tahun-tahun sebelumnya (yang belum daluarsa dan belum dihimbau); Melakukan penyusunan DSP4 Adjustment dengan berfokus pada sektor unggulan dan sektor lainnya yang diproyeksikan tumbuh di tahun 2025 demi menunjang penerimaan negara yang optimal. 	2025

▪ **IKU 7a-CP : Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian**

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	119.18%	118.80%	118.80%	118.58%	118.58%	118.09%	118.09%
Capaian	119.18	118.80	118.80	118.58	118.58	118.09%	118.09%

Sumber : Laporan Penjelasan Progress IKU Triwulan IV 2024 KPP Pratama Sibolga

a. Deskripsi Sasaran Strategis

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

b. Definisi IKU

Efektivitas Pemeriksaan adalah kegiatan pemeriksaan yang diukur berdasarkan nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi, nilai SKP

dijetui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan, realisasi penyelesaian pemeriksaan, penyelesaian pemeriksaan tepat waktu dan ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi. Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu. Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian diukur dengan dua parameter, yaitu: Komponen Tingkat efektivitas pemeriksaan; dan Komponen Tingkat efektivitas penilaian. Tingkat Efektivitas Pemeriksaan diukur menggunakan 5 variabel yaitu:

- Persentase nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP (Target 75%, Bobot 15%)
- Persentase nilai SKP dijettui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan (Target 100%, Bobot 25%)
- Persentase realisasi penyelesaian pemeriksaan (Target 100%, Bobot 30%)
- Persentase penyelesaian pemeriksaan tepat waktu (Target 75%, Bobot 25%)
- Persentase nilai ketetapan terbit tahun berjalan dibandingkan dengan nilai restitusi (Target 70%, Bobot 5%)

Detail Target dan tata cara penghitungan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dilaksanakan berdasarkan Nota Dinas Direktur Pemeriksaan dan Penagihan yang mengatur tentang detail target dan tata cara penghitungan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan. Tingkat Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu. Tingkat Efektivitas Penilaian diukur menggunakan 2 variabel yaitu, Persentase Penyelesaian Penilaian; dan Persentase Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu. Petunjuk teknis dan tata cara perhitungan penghitungan IKU Tingkat Efektivitas Penilaian dilaksanakan berdasarkan Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian. Dalam hal satuan kerja tidak memiliki Fungsional Penilai Pajak maka dapat diusulkan Petugas Penilai Pajak dengan mengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak tentang Tata Cara Penunjukan Petugas Penilai Pajak.

c. Formula IKU

(Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan x 60%) + (Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian x 40%)

d. Realisasi IKU

No	Keterangan	Triwulan IV
a.	Realisasi Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan	108.80%
b.	Trajectory Target Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan	80.00%
c.	Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan (maksimal 120%) (c = a : b)	120.00%
d.	Realisasi Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian	115.22%
e.	Trajectory Target Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian	100.00%
f.	Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian (maksimal 120%) (f = d : e)	115.22%
g.	Realisasi IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian = (60% x Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan) + (40% x Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian)	118.09%
h.	Target IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	100.00%
i.	Capaian IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian (I = g : h)	118.09%

Sumber : Perhitungan Manual IKU Pemeriksaan dan Penilaian

Realisasi tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian sampai dengan akhir Desember 2024 dengan capaian sebesar 118.09% dari target. Realisasi IKU merupakan IKU Baru dan tidak memiliki data historis. Untuk IKU tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian sendiri memiliki 2 komponen yaitu komponen tingkat efektivitas pemeriksaan sebesar 60 % dan komponen tingkat efektivitas penilaian sebesar 40%.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realiasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	-	-	-	-	118.09%

Sumber : Laporan Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Sibolga

Realisasi capaian IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian pada tahun 2024 adalah IKU baru karena adanya penambahan tingkat efektivitas penilaian pada komponen IKU tersebut.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	-	-	100%	118.09%

Sumber : Aplikasi Mandor tanggal 15 Januari 2025

Tercapainya target IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan stakeholders dan kepatuhan Wajib Pajak agar dapat menunjang penerimaan negara melalui efektivitas tindakan pemeriksaan dan penilaian. Beberapa hal yang juga melatarbelakangi membaiknya kinerja penerimaan sampai dengan akhir Desember 2024 diantaranya:

- Tercapainya nilai SKP terbit yang disetujui tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP yang ada.
- Realisasi atas dasar penyelesaian pemeriksaan yang telah dilakukan
- Optimalnya penyelesaian pemeriksaan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan (Target 75%, Bobot 25%)
- Optimalnya penyelesaian penilaian yang tepat waktu

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	100%	-	118.09%

Sumber : Aplikasi Mandor tanggal 15 Januari 2025

Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan, hal ini dikarenakan terealisasinya nilai SKP terbit pada tahun berjalan sesuai dengan data potensi yang ada, penyelesaian pemeriksaan secara tepat waktu dan penyelesaian penilaian secara tepat waktu.

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

a. Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- a) Penelitian dan tindak lanjut bahan baku yang telah disetujui pada komite kepatuhan.
- b) Meningkatkan produktivitas dan success rate pembayaran atas SKP yang telah terbit.
- c) Melakukan manajemen restitusi dengan menggunakan dashboard restitusi.
- d) Sinergi pengawasan dengan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), dan Pemerintah Daerah.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian. Hal-hal tersebut antara lain:

- a) Penyebab keberhasilan/peningkatan kinerja tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian KPP Pratama Sibolga tahun 2024 didominasi dengan kegiatan pengawasan Wajib Pajak oleh Pemeriksa dan Penilai agar terus mengikuti perkembangan kegiatan ekonomi di berbagai sektor sehingga pengawasan atas wajib pajak yang diusulkan pemeriksaan dan penilaian dapat ditindaklanjuti dengan optimal.
- b) Upaya yang dilakukan oleh KPP Pratama Sibolga ialah terus melakukan penjagaan, pengawasan, tindak lanjut dan monitoring usulan DSPP dan DSPn sampai dengan 31 Desember 2024 agar dapat memenuhi target penerimaan dengan turut berkoordinasi dengan Kepala Kanwil DJP Sumatera Utara II.

c. Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian atas kinerja tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Adapun langkah efisiensi yang dilakukan oleh KPP Pratama Sibolga adalah melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomatisasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas

pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.

- d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Capaian atas kinerja tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Adapun program yang telah dilakukan adalah dengan memonitoring produksi Laporan Hasil Pemeriksaan dan Laporan Hasil Penilaian baik dari segi kuantitas maupun kualitas.

- e. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

Realisasi pemeriksaan dan penilaian pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi yaitu dengan melaksanakan rapat pembinaan antarseksi.

- f. Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Realisasi tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh KPP Pratama Sibolga dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut ialah dengan optimalisasi perencanaan pemeriksaan dan penilaian, menyampaikan hasil pemantauan kinerja penerimaan secara rutin dan menindaklanjuti laporan tersebut untuk mengatasi kendala kondisi ekonomi yang masih penuh dengan ketidakpastian.

- g. Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat

Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan KPP Pratama Sibolga ialah membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum seperti di TPT KPP Pratama Sibolga, menyediakan kursi roda bagi penyandang disabilitas, serta pemerintah melalui Kementerian Keuangan yang membuat program pemberian insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.

- h. Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

Pajak sebagai sumber penerimaan APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu seperti pajak yang dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> Melakukan pendekatan persuasif agar Wajib Pajak merespon dan membayar melalui surat undangan pembahasan dan melakukan kunjungan kerja ke lokasi Wajib Pajak untuk mendapatkan data lebih lanjut tentang Wajib Pajak yang akan dituangkan di dalam Laporan Hasil Kunjungan; Melakukan penelitian Kepatuhan Material tahun-tahun sebelumnya (yang belum daluarsa dan belum dihimbau); Melakukan penyusunan DSP4 Adjustment dengan berfokus pada sektor unggulan dan sektor lainnya yang diproyeksikan tumbuh di tahun 2025 demi menunjang penerimaan negara yang optimal. 	2025

▪ **IKU 7b-CP : Tingkat efektivitas penagihan**

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
Target	15%	30%	30%	45%	45%	75%	75%
Realisasi	25.64%	36.53%	36.53%	79.76%	79.76%	102.56%	102.56%
Capaian	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00

Sumber : Laporan Penjelasan Progress IKU Triwulan IV 2024 KPP Pratama Sibolga

a. Deskripsi Sasaran Strategis

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

b. Definisi IKU

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita. IKU tingkat efektivitas penagihan dimaksudkan untuk mengukur tingkat keberhasilan tindakan penagihan pajak yang dilakukan terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak dalam rangka mencairkan piutang pajak. Tingkat efektivitas penagihan terdiri dari 3 (tiga) variabel, yaitu: Variabel tindakan penagihan (50%); Variabel tindak lanjut Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (20%); dan Variabel pencairan Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (30%). Tindakan penagihan yang diukur dalam IKU ini meliputi Penerbitan Surat Teguran; Pemberitahuan Surat Paksa; Pemblokiran; Penyitaan; dan Penjualan Barang Sitaan. Ruang lingkup tindakan penagihan meliputi semua kohir yang inkrah dan wajib ditindaklanjuti.

c. Formula IKU

Tingkat efektivitas penagihan = (50% x Variabel Tindakan Penagihan) + (20% x Variabel Tindak Lanjut DSPC) + (30% x Variabel Pencairan DSPC)

d. Realisasi IKU

No	Variabel IKU	Realisasi	% Bobot IKU	Realisasi IKU
1	Variabel tindakan penagihan	120%	50%	60 %
2	Variabel tindak lanjut DSPC	62.00%	30%	12.40%
3	Variabel pencairan DSPC	100.52%	20%	30.16%
	Total			102.56%
	Indeks Capaian IKU = (TOTAL% / 75%) x 100%			120%

Sumber : Perhitungan Manual IKU Penagihan

Realisasi Tingkat efektivitas penagihan sampai dengan akhir Desember 2024 dengan capaian sebesar 102.56% dari target yang telah diberikan dengan indeks capaian sebesar 120%.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realiasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Tingkat efektivitas penagihan	-	105.12%	112.97%	98.92%	102.56%

Sumber : Laporan Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Sibolga

Realisasi capaian IKU Tingkat Efektivitas Penagihan mengalami fluktuasi selama 3 tahun terakhir, namun realisasi tahun 2024 telah mencapai target yang telah ditetapkan dengan realisasi sebesar 102.56%.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Tingkat efektivitas penagihan	75%	-	75%	102.56%

Sumber : Aplikasi Mandor tanggal 15 Januari 2025

Tercapainya target IKU Tingkat Efektivitas Penagihan bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan stakeholders dan kepatuhan Wajib Pajak agar dapat menunjang penerimaan negara melalui efektivitas tindakan penagihan. Beberapa hal yang juga melatarbelakangi membaiknya kinerja penerimaan sampai dengan akhir Desember 2024 diantaranya:

- Kemampuan Wajib Pajak dalam membayar tunggakan pajak;
- SDM yang berkompeten dalam melaksanakan tindakan penagihan.

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Tingkat efektivitas penagihan	75%	75%	102.56%

Sumber : Aplikasi Mandor tanggal 15 Januari 2025

Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan, hal ini dikarenakan terealisasinya kemampuan Wajib Pajak dalam membayar tunggakan pajak serta penyelesaian penagihan secara tepat waktu.

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

a. Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi tingkat efektivitas penagihan. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- a) Optimalisasi tindakan penagihan atas surat paksa.
- b) Melakukan kegiatan penagihan secara persuasif melalui email atau kontak kepada Wajib Pajak.
- c) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap tindakan penagihan yang sedang berjalan.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja realisasi IKU ini. Hal-hal tersebut antara lain:

- a) Penyebab kegagalan/penurunan kinerja realisasi efektivitas penagihan KPP Pratama Sibolga tahun 2024 didominasi dengan kegiatan penagihan oleh JSPN yang cukup optimal dikarenakan adanya ketidakmampuan wajib pajak dalam membayar tunggakan pajak dan SDM JSPN yang kompeten.
- b) Upaya yang dilakukan oleh KPP Pratama Sibolga ialah membuat strategi pencairan piutang, misalnya penyusunan strategi jangka panjang dan jangka pendek untuk pencairan piutang, yang mencakup pengawasan, edukasi, dan pemberian insentif kepada WP patuh, termasuk restrukturisasi utang WP yang kesulitan membayar agar dapat memenuhi target penerimaan dengan turut berkoordinasi dengan Kepala Kanwil DJP Sumatera Utara II.

c. Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian atas kinerja realisasi IKU ini dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Adapun langkah efisiensi yang dilakukan oleh KPP Pratama Sibolga adalah melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis data yang memudahkan kinerja penagihan.

- d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Capaian atas kinerja realisasi efektifitas penagihan merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Adapun program yang telah dilakukan adalah penyusunan strategi pencairan piutang per KPP, terutama fokus pada pendekatan berbasis data dengan melibatkan tim lintas fungsi.

- e. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

Realisasi efektifitas penagihan pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi efektifitas penagihan. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh KPP Pratama Sibolga adalah melaksanakan rapat pembinaan seksi.

- f. Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Realisasi efektifitas penagihan mengalami kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh KPP Pratama Sibolga dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut ialah dengan optimalisasi perencanaan penerimaan, menyampaikan hasil pemantauan kinerja penerimaan secara rutin dan menindaklanjuti laporan tersebut untuk mengatasi kendala ketidakmampuan wajib pajak dalam membayar tunggakan pajak.

- g. Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat

Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan KPP Pratama Sibolga ialah membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum seperti di TPT KPP Pratama Sibolga, menyediakan kursi roda bagi penyandang disabilitas, serta pemerintah melalui Kementerian Keuangan yang membuat program pemberian insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.

- h. Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

Pajak sebagai sumber penerimaan APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu seperti pajak yang dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> Mengoptimalkan segala sumber daya yang ada serta memaksimalkan tindakan penagihan agar segera memperoleh pencairan; Inventarisir WP DSPC yang belum dikomitmenkan maupun WP Non DSPC yang mempunyai potensi namun belum dikomitmenkan. Saldo dapat diketahui pada Aplikasi DRM, segera didetailkan agar dapat memperoleh pencairan; Penanganan WP yang mendekati daluwarsa membutuhkan atensi khusus; Lakukan pengawasan terhadap ketetapan inkrah agar dapat ditindaklanjuti menjadi tindakan penagihan dan jika ada pembayaran dapat diakui sebagai PKM Penagihan Tahun 2025 agar dipersiapkan untuk implementasi Aplikasi Coretax yang tujuannya semakin memudahkan pekerjaan khususnya di Bidang Penagihan. 	2025

▪ **IKU 7c-N : Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan**

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
Target	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
Realisasi	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Capaian	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Sumber : Laporan Penjelasan Progress IKU Triwulan IV 2024 KPP Pratama Sibolga

a. Deskripsi Sasaran Strategis

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

b. Definisi IKU

Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan berdasarkan pengembangan dan analisis melalui kegiatan intelijen atau kegiatan lain. Pengembangan dan analisis melalui kegiatan lain dilakukan melalui kegiatan pengawasan, pemeriksaan, pengembangan Pemeriksaan Bukti Permulaan, atau pengembangan Penyidikan, dengan hasil berupa Laporan yang memuat usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan. Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus dilakukan Case Building terlebih dahulu dengan Kanwil DJP, baik Kanwil DJP di dalam wilayah kerjanya maupun Kanwil DJP lain yang terkait, untuk memastikan kualitas usulan agar dapat diindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan. Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus memuat informasi minimal yang tercantum dalam formulir usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan. KPP dapat menyampaikan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Terlapor, baik Wajib Pajak yang terdaftar di dalam maupun di luar wilayah kerja KPP. Penyampaian usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Wajib Pajak yang berada di luar wilayah kerja, merupakan pilihan bagi KPP. Pihak Terlapor dalam usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Wajib Pajak yang terdaftar di luar wilayah KPP harus memiliki keterkaitan dengan Wajib Pajak yang terdaftar di wilayah kerjanya. Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan disampaikan ke Kanwil DJP yang wilayah kerjanya meliputi KPP tempat Wajib Pajak terdaftar melalui Nota Dinas Pengantar dan/atau melalui aplikasi Approweb/Portal P2 dengan tembusan Kantor DJP di wilayah kerja KPP yang menyampaikan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan. Penyampaian usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan dapat berasal dari fungsi Pengawasan dan fungsi Pemeriksaan. Realisasi penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan diakui ketika usul Pemeriksaan Bukti Permulaan disetujui untuk diterbitkan SPPBP. Kepala KPP dapat mengakui realisasi saat sudah dilakukan penelaahan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Penelaahan Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan. Satuan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah Wajib Pajak. Satu usulan untuk satu Wajib Pajak. Jika KPP mengirimkan usulan atas Wajib Pajak yang sama dengan tahun pajak yang berbeda, tetap dihitung sebagai 1 (satu) usulan. Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dapat diperhitungkan sebagai realisasi adalah usulan yang disampaikan hingga bulan November tahun berjalan. Jadi, usulan yang

disampaikan pada Desember akan diperhitungkan ke tahun depan. Target penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah sebanyak 1 (satu) usulan yang disetujui untuk ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

c. Formula IKU

Realisasi Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah	x100%
Target Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah	

d. Realisasi IKU

-

Sumber : Nota Dinas Kanwil DJP Sumatera Utara II nomor ND-2967/WPJ.26/2024

Realisasi Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan sampai dengan akhir Desember 2024 tercatat sebesar 0 usulan dengan capaian sebesar 0%. Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah IKU baru yang tidak memiliki data historis dan bertujuan untuk meningkatkan efektivitas peranan KPP dalam mendukung proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Kantor Wilayah.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realiasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	-	-	-	-	0%

Sumber : Laporan Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Sibolga

Realisasi capaian IKU Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan pada tahun 2024 adalah IKU baru dan belum mampu mencapai target yang ditentukan.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	-	-	100%	0%

Sumber : Aplikasi Mandor tanggal 15 Januari 2025

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus dilakukan Case Building terlebih dahulu dengan Kanwil DJP, baik Kanwil DJP di dalam wilayah kerjanya maupun Kanwil DJP lain yang terkait, untuk memastikan kualitas usulan agar dapat ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan. Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus memuat informasi minimal yang tercantum dalam formulir usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

KPP dapat menyampaikan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Terlapor, baik Wajib Pajak yang terdaftar di dalam maupun di luar wilayah kerja KPP. Penyampaian usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Wajib Pajak yang berada di luar wilayah kerja, merupakan pilihan bagi KPP. Pihak Terlapor dalam usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Wajib Pajak yang terdaftar di luar wilayah KPP harus memiliki keterkaitan dengan Wajib Pajak yang terdaftar di wilayah kerjanya.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan disampaikan ke Kanwil DJP yang wilayah kerjanya meliputi KPP tempat Wajib Pajak terdaftar melalui Nota Dinas Pengantar dan/atau melalui aplikasi Approweb/Portal P2 dengan tembusan Kantor DJP di wilayah kerja KPP yang menyampaikan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan. Penyampaian usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan dapat berasal dari fungsi Pengawasan dan fungsi Pemeriksaan.

Realisasi penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan diakui ketika usul Pemeriksaan Bukti Permulaan disetujui untuk diterbitkan SPPBP. Kepala KPP dapat mengakui realisasi saat sudah dilakukan penelaahan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Penelaahan Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Satuan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah Wajib Pajak. Satu usulan untuk satu Wajib Pajak. Jika KPP mengirimkan usulan atas Wajib Pajak yang sama dengan tahun pajak yang berbeda, tetap dihitung sebagai 1 (satu) usulan. Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dapat diperhitungkan sebagai realisasi adalah usulan yang disampaikan hingga bulan November tahun berjalan. Jadi, usulan yang disampaikan pada Desember akan diperhitungkan ke tahun depan. Target

penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah sebanyak 1 (satu) usulan yang disetujui untuk ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%	100%	0%

Sumber : Aplikasi Mandor tanggal 15 Januari 2025

Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan sampai dengan akhir Desember 2024 belum mampu melampaui target yang telah ditetapkan.

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

a. Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi penyampaian usul pemeriksaan bukti permulaan. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- a) Penelitian dan tindak lanjut atas temuan wajib pajak yang terindikasi melakukan tindakan pidana.
- b) Melakukan monitoring dan pengawasan untuk wajib pajak yang melakukan penyimpangan-penyimpangan dalam perpajakan.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong peningkatan kinerja penyampaian usul pemeriksaan bukti permulaan. Hal-hal tersebut antara lain:

- a) Upaya yang dilakukan oleh KPP Pratama Sibolga ialah terus melakukan penjagaan, pengawasan, dan monitoring semua wajib pajak yang beresiko tinggi agar dapat memenuhi target yang telah ditentukan.

c. Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Langkah efisiensi yang dilakukan oleh KPP Pratama Sibolga adalah melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan

aplikasi yang mendukung otomatisasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis untuk semua wajib pajak.

- d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Capaian atas kinerja realisasi IKU ini merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Adapun program yang telah dilakukan adalah dengan melakukan monitoring terhadap wajib pajak yang memiliki risiko tinggi.

- e. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

Tidak terdapat dokumentasi mitigasi risiko atas IKU persentase penyampaian usul bukti permulaan.

- f. Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Realisasi penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan mengalami kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh KPP Pratama Sibolga dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut ialah dengan optimalisasi profiling semua wajib pajak yang terindikasi melakukan tindakan pidana perpajakan.

- g. Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat

Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan KPP Pratama Sibolga ialah membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum seperti di TPT KPP Pratama Sibolga, menyediakan kursi roda bagi penyandang disabilitas, serta pemerintah melalui Kementerian Keuangan yang membuat program pemberian insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.

- h. Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

Pajak sebagai sumber penerimaan APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu seperti pajak yang dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> Melakukan penelitian Kepatuhan Material tahun-tahun sebelumnya (yang belum daluarsa dan belum dihimbau); Melakukan penyusunan daftar wajib pajak yang memiliki resiko tinggi terhadap tindakan pidana perpajakan; Melakukan koordinasi kepada Kanwil DJP Sumut II jika ditemukan wajib pajak yang melakukan penyimpangan tindakan pidana perpajakan. 	2025

▪ **IKU 8a-CP : Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan**

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
Target	20%	50%	50%	80%	80%	100%	100%
Realisasi	5.79%	107.38%	107.38%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%
Capaian	28.96	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00

Sumber : Laporan Penjelasan Progress IKU Triwulan IV 2024 KPP Pratama Sibolga

a. Deskripsi Sasaran Strategis

Data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.

b. Definisi IKU

1. Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan

Kegiatan Intelijen Perpajakan adalah serangkaian kegiatan dalam siklus intelijen yang meliputi perencanaan, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan/atau informasi sehingga diperoleh suatu produk intelijen yang dapat digunakan untuk kepentingan perpajakan. Kegiatan Pengamatan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Petugas Pengamat tanpa diketahui sasaran yang bertujuan untuk mendapatkan dan memperoleh data dan/atau informasi berupa fakta, keadaan, dan atau/kejadian yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan perpajakan. Petugas Pengamat adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang memiliki kemampuan melakukan Kegiatan Pengamatan dan ditugaskan untuk melaksanakan Kegiatan Pengamatan.

2. Persentase penyediaan data potensi perpajakan

Data potensi perpajakan berbasis lapangan adalah data/informasi yang belum dimiliki dan/atau diperoleh DJP melalui Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPDJ) yang diinput pada aplikasi mobile yang telah tersedia dan dilakukan pada lokasi tempat tinggal atau kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha atau harta Wajib Pajak (Lapangan). Data potensi perpajakan berbasis lapangan dilakukan dalam rangka optimalisasi pengawasan atas pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak baik yang telah memiliki NPWP maupun yang belum memiliki NPWP dan penguasaan atas seluruh data dan/atau informasi Wajib Pajak dan potensi pajak yang terdapat dalam wilayah kerja KPP. Data potensi perpajakan berbasis lapangan harus didukung dengan data spasial yang tepat dan akurat melalui pelaksanaan geotagging objek pajak pada lokasi Wajib Pajak yang sebenarnya, dalam hal tidak tersedia jaringan internet maka input data/informasi dapat dilakukan pada lokasi jaringan internet tersedia terdekat. Penyediaan data potensi perpajakan berbasis lapangan dilakukan untuk memberikan data potensi pajak yang memenuhi dimensi kualitas data (lengkap, unik, tepat waktu, valid, akurat, dan konsisten) sehingga data yang diperoleh dan disampaikan tersebut dapat ditindaklanjuti dalam rangka ekstensifikasi maupun intensifikasi guna mendukung kegiatan pengamanan penerimaan pajak. Realisasi penyediaan data potensi perpajakan berbasis lapangan dihitung berdasarkan jumlah produksi pengumpulan data lapangan yang telah tervalidasi.

c. Formula IKU

1. Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan
$\frac{\text{Realisasi Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan} \times \text{faktor jangka waktu}}{\text{Target Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan}} \times 100\%$
Realisasi Maksimal 120%
2. Persentase penyediaan data potensi perpajakan
$\frac{\text{Jumlah Produksi Data Lapangan}}{\text{Jumlah Target Produksi Data Lapangan}} \times 100\%$
Realisasi Maksimal 120%
$\frac{(\text{Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan}) + (\text{Persentase penyediaan data potensi perpajakan})}{2} \times 100\%$

d. Realisasi IKU

Komponen	Target	Realisasi	Realisasi IKU
1. Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan	4.8	5.8	120.00%
2. Penyediaan Data Potensi Perpajakan	1200	2131	120.00%
Penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan			120.00%

Sumber : Laporan NKO Triwulan IV 2024 KPP Pratama Sibolga

IKU Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan sampai dengan akhir Desember 2024 tercatat dengan capaian sebesar 120,00% dari target. Kegiatan penyelesaian laporan kegiatan dan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan dapat dilaksanakan dengan baik dan tidak mengalami kendala sehingga mampu mencapai target yang telah ditentukan.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realiasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	-	-	-	127.62%	120%

Sumber : Laporan Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Sibolga

Realisasi capaian IKU Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan pada tahun 2024 mampu tetap melebihi target seperti tahun sebelumnya. Hal tersebut dikarenakan masih tersedia dan terjangkauannya wajib pajak untuk di lakukan pengumpulan data dan dilakukan pengamatan oleh petugas pajak.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	-	-	100%	120%

Sumber : Aplikasi Mandor tanggal 15 Januari 2025

Tercapainya target IKU Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan menggambarkan masih banyaknya data-data wajib yang belum tercatat dan adanya wajib pajak yang perlu ditindaklanjuti dengan pengamatan lebih lanjut. Beberapa hal yang juga melatarbelakangi membaiknya kinerja penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan sampai dengan akhir Desember 2024 diantaranya:

- Peningkatan ketersediaan data yang memerlukan analisis yang lebih komprehensif;
- Kapasitas sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam pengumpulan data lapangan dan penyelesaian laporan pengamatan;
- Adanya koordinasi dan kolaborasi yang baik antara unit kerja dan pihak eksternal.

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	100%	-	120%

Sumber : Aplikasi Mandor tanggal 15 Januari 2025

Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan, hal ini diiringi dengan tingkat ketersediaan data yang tinggi dan perlu ditindaklanjuti dan kapasitas sumber daya manusia yang kompeten dan memiliki kemampuan analisis data yang baik.

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- a. Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan.

Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- a) Penelitian dan tindak lanjut atas data yang perlu dilakukan pengamatan.
- b) Meningkatkan produktivitas penyediaan data potensi perpajakan.
- c) Melakukan monitoring dan evaluasi untuk data-data yang terkumpul untuk dapat dilakukan tindak lanjut lebih dalam.

- b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong /penurunan kinerja realisasi penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan. Hal-hal tersebut antara lain:

- a) Penyebab keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi IKU ini didominasi dengan kegiatan pengawasan Wajib Pajak oleh Account Representative agar terus mengikuti perkembangan data untuk dapat menunjang tercapainya penerimaan kantor, termasuk melalui kegiatan pengamatan.
- b) Upaya yang dilakukan oleh KPP Pratama Sibolga ialah terus melakukan penjagaan, pengawasan, dan monitoring data wajib pajak sampai dengan 31 Desember 2024 agar dapat memenuhi target penerimaan dengan turut berkoordinasi dengan Kepala Kanwil DJP Sumatera Utara II.

- c. Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian atas kinerja realisasi IKU ini dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Adapun langkah efisiensi yang dilakukan oleh KPP Pratama Sibolga adalah melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis data atas wajib pajak, sehingga kegiatan administrasi data perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.

- d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Capaian atas kinerja realisasi IKU ini merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Adapun program yang telah

dilakukan adalah dengan melakukan pengumpulan data lapangan melalui survei ke tempat wajib pajak.

- e. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

Tidak terdapat dokumentasi mitigasi risiko atas IKU penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan.

- f. Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Realisasi penerimaan pajak dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh KPP Pratama Sibolga dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut ialah dengan optimalisasi perencanaan pengumpulan data, menyampaikan hasil pemantauan data wajib pajak secara rutin dan menindaklanjuti laporan tersebut untuk mengatasi kendala kondisi ekonomi yang masih penuh dengan ketidakpastian.

- g. Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat

Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan KPP Pratama Sibolga ialah membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum seperti di TPT KPP Pratama Sibolga, menyediakan kursi roda bagi penyandang disabilitas, serta pemerintah melalui Kementerian Keuangan yang membuat program pemberian insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.

- h. Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

Pajak sebagai sumber penerimaan APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu seperti pajak yang dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> Melakukan pendekatan persuasif agar Wajib Pajak memberikan data-data yang memiliki potensi perpajakan dengan melakukan kunjungan kerja ke lokasi Wajib Pajak yang akan dituangkan di dalam Laporan Hasil Kunjungan dan Pemantauan; Melakukan pemantaun kegiatan wajib pajak dengan berkolaborasi dengan pihak eksternal; Meningkatkan kualitas data yang dikumpulkan dengan melakukan analisa lebih lanjut terkait data-data yang dikumpulkan. 	2025

▪ **IKU 8b-CP : Persentase penghimpunan data regional dari ILAP**

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
Target	10%	25%	25%	40%	40%	55%	55%
Realisasi	44.55%	52.27%	52.27%	75.64%	75.64%	74.59%	74.59%
Capaian	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00

Sumber : Laporan Penjelasan Progress IKU Triwulan IV 2024 KPP Pratama Sibolga

a. Deskripsi Sasaran Strategis

Data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.

b. Definisi IKU

IKU ini mengukur kegiatan penerimaan dan penghimpunan data regional yang bersumber dari ILAP. ILAP adalah seluruh Pemerintah Daerah Provinsi dan seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerja masing-masing Kantor Wilayah DJP, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama, dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP). Masing-masing ILAP mempunyai kewajiban penyampaian data regional pada periode tertentu yang diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.03/2017 dan perubahannya dan Perjanjian Kerja Sama Tripartit antara Direktorat Jenderal

Pajak-Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan-Pemerintah Daerah. Periode tertentu dimaksud adalah tahunan, sehingga data yang wajib disampaikan untuk penghitungan IKU tahun 2024 adalah data regional dengan periode tahun 2023. Data regional sebagaimana dimaksud di atas dikategorikan menjadi Data Utama Regional dan Data Regional Lainnya. Data Utama Regional meliputi:

- Data utama regional pada Pemerintah Daerah Provinsi, antara lain Data Kendaraan Bermotor; Data Sektor Perkebunan dan Kehutanan; dan Data Sektor Pertambangan yang meliputi: Data Izin Usaha di Sektor Pertambangan; dan Data Rencana Kerja dan Anggaran Belanja (RKAB) beserta lampirannya.
- Data utama regional pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, antara lain: Data Sektor Properti yang meliputi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); Data Izin Mendirikan Bangunan (IMB)/Persetujuan Bangunan Gedung (PBG); Data Tanah dan/atau Bangunan/Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2). Data Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan.
- Data Sektor Perkebunan dan Kehutanan. Data yang tercantum pada PKS Tripartit DJP-DJPK-Pemerintah Daerah yang tidak tercantum pada PMK-228 Tahun 2017 dikategorikan sebagai data utama regional (kecuali atas data parkir, air tanah, reklame, walet, dan dokter).
- Data Regional Lainnya adalah semua jenis data regional selain Data Utama Regional.

Terdapat beberapa jenis data regional yang dikecualikan dari penghitungan IKU ini, di antara lain:

- Data PKS Tripartit DJP-DJPK-Pemda yang ditandatangani pada tahun berjalan selain yang tercantum dalam PMK-228 Tahun 2017;
- Data Pegawai Negeri Sipil Daerah;
- Data dan/atau Informasi Keuangan Daerah;
- Data sektor pertambangan di tingkat kabupaten/kota; dan
- Jenis data yang terkait perizinan berusaha (selain: a) Data Surat Izin Usaha/Data Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; b) Data usaha sektor perkebunan dan kehutanan; c) Data usaha sektor pertambangan di tingkat provinsi);

Standar Kelengkapan Data adalah standar yang digunakan oleh Direktorat Data dan Informasi Perpajakan dalam rangka penelitian kelengkapan atas data yang diterima yang berdasarkan pada kolom mandatory dengan mempertimbangkan hasil konfirmasi ketersediaan data dari Pemerintah Daerah. Kolom mandatory adalah kolom yang ditentukan berisi data yang harus tersedia/lengkap serta

diterima sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau kamus data atau kesepakatan, yang tertuang dalam PMK-228 dan PKS Tripartit sehingga data dapat diolah dan dimanfaatkan. Jumlah Jenis Data Regional dari ILAP yang disampaikan adalah jumlah jenis data regional yang disampaikan oleh ILAP pada periode tertentu yang telah diterbitkan tanda terima oleh Direktorat Data dan Informasi Perpajakan. Jumlah Jenis Data Regional dari ILAP yang wajib disampaikan adalah jumlah jenis data regional yg wajib disampaikan oleh ILAP pada periode tertentu yang ditentukan berdasarkan penetapan Kepala Kantor Wilayah DJP paling lambat akhir bulan Februari tahun berjalan.

c. Formula IKU

$$\text{Realisasi Tahun 2024} = \left[70\% \times \left(\frac{\text{Jumlah jenis data utama regional yang disampaikan}}{\text{Jumlah jenis data utama regional yang wajib disampaikan}} \times 40\% \right) + \left(\frac{\text{Jumlah jenis data utama regional yang berstatus lengkap}}{\text{Jumlah jenis data utama regional yang disampaikan}} \times 60\% \right) \right] + \left[30\% \times \left(\frac{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang disampaikan}}{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang wajib disampaikan}} \times 40\% \right) + \left(\frac{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang berstatus lengkap}}{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang disampaikan}} \times 60\% \right) \right]$$

d. Realisasi IKU

Monitoring Capaian IKU ILAP Regional (Per-KPP)									
030 - KANWIL DJP SUMATERA UTARA II									
Diurutkan Berdasar : Unit Kerja									
Tahun Data : 2023									
NO.	UNIT KERJA	UTAMA			LAINNYA			CAPAIAN IKU	DETIL KP2KP
		Wajib	Kirim	lengkap	Wajib	Kirim	Lengkap		
1	114 - KPP PRATAMA TEBING TINGGI	15	8	8	9	8	8	85,6	Lihat
2	115 - KPP PRATAMA KISARAN	25	18	18	14	8	8	87,02	Lihat
3	116 - KPP PRATAMA RANTAU PRAPAT	19	12	11	8	7	5	79,54	Lihat
4	117 - KPP PRATAMA PEMATANG SIANTAR	12	12	12	4	4	4	100	Lihat
5	118 - KPP PRATAMA PADANG SIDEMPUAN	45	21	19	29	13	13	74,45	Lihat
6	126 - KPP PRATAMA SIBOLGA	44	32	23	25	17	15	74,59	Lihat
7	127 - KPP PRATAMA BALIGE	33	26	22	23	18	16	82,99	Lihat
8	128 - KPP PRATAMA KABANJAHE	20	15	14	10	9	8	87	Lihat

Sumber : Aplikasi Monitoring SPT tanggal 15 Januari 2025

Realisasi IKU ini mengukur kegiatan penerimaan dan penghimpunan data regional yang bersumber dari ILAP sampai dengan akhir Desember 2024 tercatat dengan realisasi sebesar 74.59% dari target dengan indeks capaian sebesar 120%.

- Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realiasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase pengumpulan data regional dari ILAP	-	-	-	100%	74.59%

Sumber : Laporan Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Sibolga

Realisasi capaian IKU Persentase pengumpulan data regional dari ILAP pada tahun 2024 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, namun IKU ini telah mencapai target yang ditetapkan dengan indeks capaian 120%.

- Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase pengumpulan data regional dari ILAP	-	-	55%	74.59%

Sumber : Aplikasi Mandor tanggal 15 Januari 2025

Tercapainya target IKU Persentase pengumpulan data regional dari ILAP menggambarkan adanya hubungan kerjasama yang baik dalam pengumpulan data regional antara KPP Pratama Sibolga dan Pemerintahan Kabupaten Karo. Beberapa hal yang juga melatarbelakangi membaiknya kinerja pengumpulan data regional dari ILAP sampai dengan akhir Desember 2024 diantaranya:

- Adanya sosialisasi tentang pengumpulan data ILAP
- Kerjasama dan kolaborasi antara KPP Pratama Sibolga dan Instansi Pemerintah Karo untuk mengumpul data regional ILAP

- Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase pengumpulan data regional dari ILAP	55%	-	74.59%

Sumber : Aplikasi Mandor tanggal 15 Januari 2025

Persentase pengumpulan data regional dari ILAP sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan, hal ini diiringi dengan tingkat kualitas data ILAP yang mampu disajikan Pemerintah Karo untuk DJP. Pengumpulan

data regional dari ILAP ini bertujuan untuk mengawasi pihak pemberi data dalam menyampaikan data sesuai yang ditetapkan di dalam Peraturan Menteri Keuangan dan Perjanjian Kerja Sama antara DJP-DJPB-Pemerintah Daerah.

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

a. Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja
Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi IKU ini. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- a) Melakukan monitoring dan evaluasi untuk data-data ILAP yang dikirimkan oleh Pemerintah Daerah.
- b) Meningkatkan kolaborasi pengumpulan data antara KPP Pratama Sibolga dan Pemerintah Daerah Karo.
- c) Melakukan rapat kinerja penghimpunan data regional ILAP

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja realisasi penghimpunan data regional dari ILAP. Hal-hal tersebut antara lain:

- a) Penyebab keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi penghimpunan data regional dari ILAP KPP Pratama Sibolga tahun 2024 didominasi dengan kegiatan kerjasama penghimpunan data regional ILAP antara KPP Pratama Sibolga dan Pemerintahan Karo.
- b) Upaya yang dilakukan oleh KPP Pratama Sibolga ialah terus melakukan penjagaan, pengawasan, dan monitoring atas data regional ILAP yang diberikan Pemerintah Karo sampai dengan 31 Desember 2024 agar dapat memenuhi target penerimaan dengan turut berkoordinasi dengan Kepala Kanwil DJP Sumatera Utara II.

c. Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Adapun langkah efisiensi yang dilakukan oleh KPP Pratama Sibolga adalah melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan menghimpun data regional ILAP yang mendukung otomatisasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.

- d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Adapun program yang telah dilakukan adalah meningkatkan sinergi dengan Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah khususnya dalam rangka pertukaran data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan.

- e. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

Mitigasi risiko yang dilakukan oleh KPP Pratama Sibolga adalah memperkuat kolaborasi dan kerjasama antara KPP Pratama Sibolga dan Pemerintah Daerah Karo.

- f. Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Realisasi Persentase penghimpunan data regional dari ILAP dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh KPP Pratama Sibolga dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut ialah dengan optimalisasi perencanaan penghimpunan data, menyampaikan hasil pemantauan kinerja penerimaan secara rutin dan menindaklanjuti laporan atas pertukaran data.

- g. Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat

Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan KPP Pratama Sibolga ialah membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum seperti di TPT KPP Pratama Sibolga, menyediakan kursi roda bagi penyandang disabilitas, serta pemerintah melalui Kementerian Keuangan yang membuat program pemberian insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.

- h. Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

Pajak sebagai sumber penerimaan APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu seperti pajak yang dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> Melakukan rapat kinerja terkait pertukaran data antara Pemerintah Daerah dan KPP Pratama Sibolga; Meningkatkan dan mengolah data yang diberikan untuk dalam ditindaklanjuti lebih dalam; Menyusun kebijakan dan strategi pengamanan data regional ILAP. 	2025

▪ **IKU 9a-N : Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM**

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
Target	100	100	100	100	100	100	100
Realisasi	104.18	120.00	120.00	111.92	111.92	116.91	116.91
Capaian	104.18	120.00	120.00	111.92	111.92	116.91	116.91

Sumber : Laporan Penjelasan Progress IKU Triwulan IV 2024 KPP Pratama Sibolga

a. Deskripsi Sasaran Strategis

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

b. Definisi IKU

- Komponen 1 (Kualitas Kompetensi)

Tingkat kualitas kompetensi SDM mengukur kualitas kompetensi SDM yang meliputi 3 Aspek, yaitu:

1) Aspek 1

Kualitas kompetensi pejabat yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi manajerial dan sosial kultural pejabat struktural dan

pengembangannya; Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural. Kompetensi manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi sedangkan kompetensi sosial kultural terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan jabatan. Standar kompetensi adalah batas minimal kompetensi yang diperlukan seorang pegawai dalam melaksanakan tugas jabatan. Persentase perbandingan antara Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) dan kompetensi yang dimiliki oleh pejabat disebut Job Person Match (JPM). Dalam rangka profiling kompetensi, standar JPM yang ditentukan oleh Kementerian Keuangan adalah 80%. Kompetensi manajerial dan sosial kultural dapat ditingkatkan melalui beberapa kegiatan pengembangan dengan mengacu pada desain pembelajaran 70:20:10 (sesuai Peraturan Menteri Keuangan No 216 Tahun 2018). Kegiatan pengembangan 70, 20, dan 10 dilakukan untuk setiap kompetensi yang akan dikembangkan. Kegiatan pengembangan yang dapat dilakukan:

- a. 70: secondment, penugasan khusus, pelibatan dalam tim kerja/squad team, magang, dan/atau aktivitas pembelajaran lainnya di tempat kerja melalui praktik langsung
- b. 20: coaching, mentoring, benchmarking, community of practice, dan/atau aktivitas pembelajaran lainnya melalui bimbingan atau dengan mengobservasi pihak lain
- c. 10: belajar mandiri, e-learning, pelatihan, pembelajaran jarak jauh, seminar/konferensi/sarasehan, workshop/lokakarya, webinar, dan/atau pembelajaran lainnya secara klasikal maupun di luar kelas

Rencana kegiatan pengembangan dituangkan pada Individual Development Plan (IDP) dan ditindaklanjuti bersama atasan langsung. Cut off laporan pengembangan adalah 15 Desember 2024. Pegawai yang diperhitungkan adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas yang sudah mengikuti Assessment Center. Hasil pengukuran kompetensi manajerial dan sosial kultural yang diperhitungkan adalah Hasil Assessment Center sampai dengan

Desember 2024. Hasil Assessment Center yang dikecualikan dari penghitungan adalah bagi pejabat struktural:

1. Yang memasuki Batas Usia Pensiun (BUP) \leq 2 Tahun 0 Bulan (pensiun \leq 31 Desember 2026)
2. Yang promosi tahun 2024 dan belum dilakukan re-Assessment Center di Jabatan baru

Pegawai yang diperhitungkan terkait pemenuhan pengembangan kompetensi adalah pejabat struktural yang memiliki hasil Assessment Center tidak memenuhi standar JPM \geq 80% dan dilakukan pengembangan kompetensi manajerial dan sosial kultural pada tahun 2024.

2) Aspek 2

Kualitas kompetensi pelaksana dan fungsional yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi teknis pelaksana dan fungsional serta pengembangannya. Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural. Standar Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi. Pegawai yang diperhitungkan adalah pegawai yang mengikuti pengukuran kompetensi teknis sebagai berikut:

- a. Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang dan Jabatan bagi Fungsional yang unit pembinaannya adalah DJP pada Tahun 2024
- b. Uji Kompetensi Teknis kenaikan Peringkat dan Jabatan bagi Pelaksana umum pada Tahun 2024

Hasil pengukuran kompetensi teknis yang diperhitungkan adalah sebagai berikut:

1. Hasil Uji Kompetensi Teknis Kenaikan Jenjang dan Jabatan bagi Fungsional Pemeriksa Pajak, Asisten Penilai Pajak, Penilai Pajak, Asisten Penyuluh Pajak dan Penyuluh Pajak pada Tahun 2024
2. Hasil Uji Kompetensi Teknis kenaikan peringkat dan jabatan bagi Pelaksana Umum pada Tahun 2024

c. Formula IKU

Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	(Capaian Komponen 1 x 50%) + (Capaian Komponen 2 x 50%)			
	ket.: Capaian maksimal untuk masing-masing komponen adalah 120			
	Target Komponen 1	Triwulan I : 15 Triwulan II: 45 Triwulan III: 75 Triwulan IV: 90	Target Komponen 2	Triwulan I : 80 Triwulan II: 80 Triwulan III: 80 Triwulan IV: 80

d. Realisasi IKU

IKU	Komponen	Sub-Komponen	Nilai	Bobot	Nilai x Bobot	Realisasi	Target	Capaian	Bobot Capaian	Realisasi Akhir
Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	Komponen 1	Aspek 1	100	30%	30	100.93	90	112.15%	50%	116.91%
		Aspek 2	93.93	35%	32.87					
		Aspek 3	108.74	35%	38.06					
	Komponen 2	Pelaksanaan Kegiatan	120	60%	72	107.00	80	120.00%	50%	
		Nilai Kepatuhan Pelaporan	110	10%	11					
		Feedback Peserta	80.00	30%	24.00					

Sumber : Laporan NKO Triwulan IV 2024 KPP Pratama Sibolga

Realisasi Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024 tercatat sebesar 116.91% dari target sebesar 100% dengan capaian sebesar 116.91%. IKU ini merupakan iku baru sehingga belum bisa ditentukan besaran pertumbuhannya. Adapun komponen dalam penyusunan realisasi IKU ini diantaranya Tingkat Pemenuhan Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural Pejabat Struktural, Tingkat Pemenuhan Kompetensi Teknis Pelaksana dan Fungsional, dan Tingkat Pemenuhan Standar Jam Pelajaran Pegawai untuk Komponen 1 (Kualitas Kompetensi), dan Pelaksanaan Kegiatan, Feedback peserta, dan Kepatuhan pelaporan untuk Komponen 2 (Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM).

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realiasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Tingkat Kualitas Kompetensi dan	-	-	-	-	116.91

Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM					
-------------------------------------	--	--	--	--	--

Sumber : Laporan Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Sibolga

Realisasi capaian IKU Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM pada tahun 2024 telah mencapai target yang ditetapkan dengan indeks capaian 116.91%.

- Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	-	-	100	116.91

Sumber : Aplikasi Mandor tanggal 15 Januari 2025

Tercapainya target IKU Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM menggambarkan bahwa efektivitas kualitas kompetensi yang terdiri atas manajerial, sosial kultural untuk pejabat fungsional, teknis untuk pelaksana dan fungsional, serta pemenuhan standar jam pelajaran pegawai terpenuhi dengan sangat baik. Selain itu pelaksanaan kegiatan kebinntalan SDM yang dilaksanakan atas empat bidang yaitu ideologi, rohani, kompetensi, dan kejiwaan juga berjalan dengan baik, sesuai dengan nilai yang diberikan dari hasil survei yang merupakan efektif. Hal tersebut menyiratkan bahwa di tengah pelaksanaan IKU Organisasi yang terkait dengan penerimaan, seluruh lini tetap mampu melaksanakan IKU lainnya khususnya yang berhubungan dengan peningkatan kompetensi dan kualitas pegawai.

- Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100	-	116.91

Sumber : Aplikasi Mandor tanggal 15 Januari 2025

Tercapainya target IKU baru yaitu Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM ini menggambarkan bahwa ditengah pelaksanaan IKU

Organisasi yang terkait dengan penerimaan, seluruh lini tetap mampu melaksanakan IKU lainnya khususnya yang berhubungan dengan peningkatan kompetensi dan kualitas pegawai.

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

a. Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi IKU ini. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- a) Pelaksanaan uji kompetensi manajerial dan sosial kultural pejabat yang sesuai standar pelaksanaan.
- b) Pelaksanaan uji kompetensi teknis pelaksana dan fungsional yang sesuai standar pelaksanaan.
- c) Pelaksanaan penugasan pemenuhan jam pelajaran pegawai yang dimonitoring dengan baik
- d) Pelaksanaan kegiatan bintal SDM yang rutin dan memastikan partisipasi seluruh pegawai dalam setiap kegiatannya.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja realisasi IKU ini. Hal-hal tersebut antara lain:

- a) Penyebab keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi IKU ini didominasi dengan pelaksanaan kegiatan yang sesuai standar oleh tim dari Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal sehingga seluruh kegiatan baik uji kompetensi dan kebintalan SDM dapat berjalan dengan baik.
- b) Upaya yang dilakukan oleh KPP Pratama Sibolga ialah terus melakukan monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan dan pemenuhan pelaksanaan serta pemenuhan jam pelajaran pegawai agar dapat memenuhi target.

c. Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian atas kinerja realisasi IKU ini dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Adapun langkah efisiensi yang dilakukan oleh KPP Pratama Sibolga adalah terus memonitoring pegawai yang belum melaksanakan atau tidak melaksanakan uji kompetensi, pemenuhan jam pelajaran, dan partisipasi aktif dalam kegiatan kebintalan SDM KPP Pratama Sibolga.

- d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Capaian atas kinerja realisasi IKU ini merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Adapun program yang telah dilakukan adalah dengan melakukan monitoring dalam pemenuhan pelaksanaan kompetensi dan kebintalan SDM di lingkungan KPP Pratama Sibolga.

- e. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

Tidak terdapat dokumentasi mitigasi risiko atas IKU Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM pada tahun 2024.

- f. Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Realisasi IKU ini dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh KPP Pratama Sibolga dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut ialah, masih terdapat pegawai yang tidak mengetahui atau kurang acuh terhadap pemenuhan kompetensi dan partisipasi dalam kegiatan kebintalan SDM sehingga KPP Pratama Sibolga melalui Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal selama 2024 terus memonitoring pegawai yang belum melaksanakan pemenuhan kompetensi dan partisipasi dalam kegiatan tersebut. Terbukti dengan realisasi IKU ini yang tercapai, yaitu 120%.

- g. Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat

IKU ini memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan KPP Pratama Sibolga ialah menyediakan fasilitas untuk pelaksanaan UKOM jika dibutuhkan untuk penyandang disabilitas seperti bantuan yang dibutuhkan, misalnya melakukan klik dengan *mouse* atas pilihan yang dipilih dalam e-learning pegawai. Namun sepanjang tahun 2024 tidak terdapat pegawai yang menggunakan fasilitas ini. Untuk kontribusi terhadap Gender, UKOM dilaksanakan untuk seluruh pegawai yang memenuhi persyaratan tanpa membedakan pegawai laki-laki dengan perempuan. Seluruhnya mendapatkan perlakuan yang sama baik atas fasilitas pengerjaan, materi UKOM, maupun soal yang disajikan dalam UKOM.

- h. Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

IKU ini memiliki kontribusi terhadap kesetaraan gender. Seperti UKOM yang dilaksanakan untuk seluruh pegawai yang memenuhi persyaratan tanpa membedakan pegawai laki-laki dengan perempuan, seluruhnya mendapatkan perlakuan yang sama baik atas fasilitas pengerjaan, materi UKOM, maupun soal yang disajikan dalam UKOM.

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> Melakukan sosialisasi manfaat IHT Kebintalan SDM agar dalam pelaksanaan seluruh pegawai dapat berpartisipasi aktif; Melakukan monitoring pegawai yang belum melaksanakan UKOM; Melakukan monitoring pegawai yang belum memenuhi jam pelajaran pegawai; Memastikan sarana prasarana ujian lebih handal. 	2025

▪ **IKU 9b-N : Indeks Penilaian Integritas Unit**

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
Target	N/A	N/A	N/A	85	85	85	85
Realisasi	N/A	N/A	N/A	100.00	100.00	95.15	95.15
Capaian	N/A	N/A	N/A	117.65	117.65	111.94	111.94

Sumber : Laporan Penjelasan Progress IKU Triwulan IV 2024 KPP Pratama Sibolga

a. Deskripsi Sasaran Strategis

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

b. Definisi IKU

IKU ini mengukur Indeks Penilaian Integritas Organisasi dengan cara mengukur tingkat capaian indeks yang bersumber dari 4 komponen utama survei kepada responden eksternal (Wajib Pajak), yaitu sebagai berikut pelayanan perpajakan; pengawasan kepatuhan; pemeriksaan pajak; dan penagihan pajak. Indeks Pelayanan Perpajakan adalah hasil penghitungan indeks dari survei kepuasan Pelayanan Perpajakan terhadap 30 responden Wajib Pajak penerima layanan perpajakan;

- Indeks Pengawasan Kepatuhan adalah hasil penghitungan indeks dari survei kepuasan Pengawasan Kepatuhan terhadap 30 responden Wajib Pajak yang dilakukan pengawasan kepatuhan perpajakannya;
- Indeks Pemeriksaan Pajak adalah hasil penghitungan indeks survei kepuasan Pemeriksaan Pajak terhadap 30 responden Wajib Pajak yang telah selesai dilakukan pemeriksaan pajak;
- Indeks Penagihan Pajak adalah hasil penghitungan indeks survei kepuasan tindakan Penagihan Pajak terhadap 30 responden Wajib Pajak yang dilakukan penagihan pajak.

Faktor Koreksi berupa angka pengurang indeks sebesar maksimal 17, dengan rincian:

- Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh APH*, Inspektorat Jenderal, dan/atau Direktorat Jenderal Pajak (minus 5).
- Investigasi pelanggaran disiplin oleh Direktorat Jenderal Pajak yang terbukti fraud (minus 6).
- Pengondisian responden yaitu dengan mengarahkan responden untuk mengisi survei sesuai keinginan unit (minus 3).
- Informasi terjadinya fraud yang diberikan oleh APH (Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Mahkamah Agung (MA)) (minus 3).

Survei dilakukan kepada responden eksternal (Wajib Pajak) secara proporsional yang menerima layanan pada masing-masing kriteria (pelayanan, pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan) yang dilakukan oleh Unit Kerja. Perangkat survei disediakan oleh Direktorat KITSDA. Ketentuan mengenai pelaksanaan survei diatur lebih lanjut dengan Nota Dinas Direktur KITSDA.

c. Formula IKU

$$((25\% \times \text{indeks pelayanan perpajakan}) + (25\% \times \text{indeks pengawasan kepatuhan}) + (25\% \times \text{indeks pemeriksaan pajak}) + (25\% \times \text{indeks penagihan pajak})) - \text{Faktor Koreksi}$$

d. Realisasi IKU

10a-CP	Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00	95.15	Max	P/M	14%	50,00%	111,39
--------	----------------------------------	-------	-------	-----	-----	-----	--------	--------

Sumber : Laporan NKO Triwulan IV 2024 KPP Pratama Sibolga

Realisasi IKU Indeks Penilaian Integritas Unit sampai dengan akhir Desember 2024 tercatat sebesar 95.15 dari 85.00 dengan capaian sebesar 111.94 dari target dan realisasi yang telah ditetapkan.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realiasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks Penilaian Integritas Unit	-	98	96.05	94.06	95.15

Sumber : Laporan Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Sibolga

Realisasi capaian IKU Indeks Penilaian Integritas Unit pada tahun 2024 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Hal tersebut dikarenakan beberapa Wajib Pajak yang mengisi survei dengan nilai cukup baik.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	85	95.15

Sumber : Aplikasi Mandor tanggal 15 Januari 2025

Tercapainya target IKU Indeks Penilaian Integritas Unit pada tahun 2024 dikarenakan Wajib Pajak yang dilakukan survei telah mengisi survei dengan baik.

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Indeks Penilaian Integritas Unit	85	-	95.15

Sumber : Aplikasi Mandor tanggal 15 Januari 2025

Tercapainya target IKU Indeks Penilaian Integritas Unit pada tahun 2024 dikarenakan Wajib Pajak yang dilakukan survei telah mengisi survei dengan baik.

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

a. Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi IKU ini walaupun realisasinya masih berada dibawah target. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, ialah pelaksanaan kegiatan pelayanan, pengawasan, pemeriksaan, dan/atau penagihan sesuai prosedur yang berlaku tanpa meminta atau menerima gratifikasi dari Wajib Pajak.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja realisasi IKU ini. Hal-hal tersebut antara lain:

a) Penyebab keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi IKU ini didominasi dengan pelaksanaan kegiatan pelayanan, pengawasan, pemeriksaan, dan/atau penagihan sesuai prosedur yang berlaku tanpa meminta atau menerima gratifikasi dari Wajib Pajak.

b) Upaya yang dilakukan oleh KPP Pratama Sibolga ialah terus melakukan monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan kegiatan SPI KPP Pratama Sibolga.

c. Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian atas kinerja realisasi IKU ini dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Adapun langkah efisiensi yang dilakukan oleh KPP Pratama Sibolga adalah terus memonitoring pelaksanaan kegiatan SPI baik dalam hal penyampaian daftar Wajib Pajak, maupun memastikan Wajib Pajak yang terdata untuk dikirimkan link survei telah melakukan pengisian surveinya.

- d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Sehubungan dengan belum diterimanya detail realisasi atas IKU ini, terdapat dua kemungkinan yang menyebabkan tidak tercapainya realisasi, yaitu Wajib Pajak yang memang dalam pengisian survei memberikan nilai yang tidak sempurna, atau Wajib Pajak keliru dalam mengisi survei.

- e. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

Mitigasi risiko atas IKU Indeks Penilaian Integritas Unit yaitu menyelenggarakan sosialisasi tentang gratifikasi kepada pihak eksternal.

- f. Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Realisasi IKU ini dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh KPP Pratama Sibolga dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut ialah, masih terdapat Wajib Pajak yang belum memahami tata cara pengisian survei sehingga pada akhir deadline kegiatan SPI banyak menampilkan data Wajib Pajak belum/tidak melakukan pengisian. Langkah yang diambil untuk mengatasi kendala adalah dengan merevisi daftar Wajib Pajak target untuk mengisi survei tersebut.

- g. Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat

IKU ini memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Untuk kontribusi terhadap Gender, penyebaran Wajib Pajak terdapat survey SPI diambil secara random tanpa membedakan gender bagi Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Direktur atau Pengurus bagi Wajib Pajak Badan.

- h. Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

IKU ini memiliki kontribusi terhadap penyediaan layanan yang menjunjung tinggi integritas, bahwa atas seluruh layanan dari kegiatan pelayanan, pengawasan, pemeriksaan, maupun penagihan, Pegawai dilarang meminta atau

menerima Gratifikasi apapun atau melakukan fraud dalam pelaksanaannya. Transparansi perlakuan ini merupakan upaya pemerintah untuk mengembalikan atau meningkatkan kepercayaan masyarakat.

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan IHT yang berfokus pada integritas dalam rangka perwujudan Good Governance; Memaksimalkan peran UKI; Membuat sarana pengaduan internal pada unit jika ditemukan penyimpangan. 	2025

▪ **IKU 9c-N : Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko**

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
Target	23	47	47	70	70	90	90
Realisasi	29.96	62.87	62.87	89.15	89.15	98.65	98.65
Capaian	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	109.61	109.61

Sumber : Laporan Penjelasan Progress IKU Triwulan IV 2024 KPP Pratama Sibolga

a. Deskripsi Sasaran Strategis

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

b. Definisi IKU

IKU ini mengukur Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko.

- Implementasi Manajemen Kinerja

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, antara lain diatur bahwa:

- Manajemen kinerja merupakan rangkaian kegiatan mengoptimalkan sumber daya untuk meningkatkan kinerja organisasi dan pegawai dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
- Manajemen kinerja dilakukan berdasarkan prinsip objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.
- Ruang lingkup manajemen kinerja terdiri atas klasifikasi manajemen kinerja, struktur manajemen kinerja, kerangka kerja sistem manajemen kinerja, dan sistem informasi manajemen kinerja.
- Klasifikasi manajemen kinerja terdiri atas manajemen kinerja organisasi, yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode tertentu, dan manajemen kinerja pegawai yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, penugasan lainnya sesuai kebutuhan organisasi, serta perilaku kerja pegawai selama periode tertentu.

Unit Pemilik Kinerja (UPK) yang merupakan bagian dari struktur manajemen kinerja, terdiri atas UPK-One, UPK-Two, dan UPK-Three. Struktur UPK-Three terdiri atas:

- Submanajer Kinerja yaitu Pimpinan UPK-Three;
- Administrator Kinerja Organisasi (AKO) UPK-Three yaitu pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Submanajer Kinerja UPK-Three yang memiliki tugas membantu KKO UPK-Three dalam mengelola kinerja organisasi unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Administrator pada kantor pelayanan dan Unit Pelaksana Teknis Eselon III di Lingkungan Kementerian Keuangan; dan
- Administrator Kinerja Pegawai (AKP) UPK-Three yaitu pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Submanajer Kinerja UPK-Three yang memiliki tugas membantu KKP UPK-Three dalam mengelola kinerja pegawai unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Administrator pada kantor pelayanan dan Unit Pelaksana Teknis Eselon III di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja diukur dari 2 (dua) komponen sebagai berikut:

1. Indeks Pelaksanaan Program Budaya Kinerja

Budaya kinerja merupakan budaya kerja yang berorientasi pada peningkatan kinerja individu dan organisasi. Program budaya kinerja diterapkan untuk memperkuat kesadaran pegawai DJP dalam meningkatkan kinerja dan kompetensinya dalam rangka pencapaian

tujuan organisasi yang pada akhirnya diharapkan mampu mewujudkan sebuah pelaksanaan manajemen kinerja yang adil dan objektif.

Indeks pelaksanaan program budaya kinerja diukur dari 2 (dua) kegiatan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja; dan
- b. Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi (DKO).

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan program budaya kinerja akan disampaikan melalui Nota Dinas Direktur KITSDA.

2. Indeks Kualitas Pengelolaan Kinerja

Indeks kualitas pengelolaan kinerja diperlukan untuk mengukur efektivitas pengelolaan kinerja organisasi maupun pegawai di lingkungan DJP yang telah berjalan selama ini. Pengukuran kualitas pengelolaan kinerja akan dilaksanakan oleh Direktorat KITSDA dan Sekretariat Direktorat Jenderal, dengan mekanisme yang akan disampaikan kemudian. Hasil pengukuran berupa indeks kualitas pengelolaan kinerja menjadi dasar penghitungan capaian IKU K-3 Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja Kepala Kantor Pelayanan Pajak. Ketentuan lebih lanjut terkait indeks kualitas pengelolaan kinerja akan disampaikan melalui Nota Dinas Direktur KITSDA.

- Implementasi Manajemen Risiko

Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak terhadap pencapaian sasaran organisasi. Manajemen risiko adalah proses sistematis dan terstruktur yang didukung budaya sadar risiko untuk mengelola risiko organisasi pada tingkat yang dapat diterima guna memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian sasaran organisasi, yang bertujuan untuk meningkatkan kemungkinan pencapaian visi, misi, sasaran organisasi, dan peningkatan kinerja serta melindungi dan meningkatkan nilai tambah organisasi. Proses manajemen risiko sesuai dengan KMK-105/KMK.01/2022 adalah Identifikasi Risiko, Analisis Risiko, Evaluasi Risiko, Mitigasi Risiko, dan Pemantauan dan Reviu. Rencana Mitigasi Risiko merupakan rencana tindakan yang bertujuan untuk menurunkan dan/atau menjaga Besaran dan/atau Level Risiko Utama hingga mencapai Risiko Residual Harapan. Pemantauan rencana mitigasi risiko dilakukan triwulanan pada bulan April, Juli, Oktober, dan Januari Tahun berikutnya. Unsur Penilaian pada Implementasi Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

- Administrasi dan Pelaporan

1. Penyampaian Piagam Manajemen Risiko dan Dokumen Pendukung tepat waktu. (pada Aplikasi PERISKOP atau Nota Dinas kepada Kantor Wilayah bagi KPP, dan Direktorat KITSDA bagi Kanwil/Sekretaris Direktorat Jenderal/Direktorat/UPT) (poin 1).
 2. Jika tidak menyampaikan maka poin 0, menyampaikan namun terlambat poin 0,5.
 3. Pelaksanaan Rapat Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan yang terintegrasi dengan DKO setiap triwulannya dibuktikan dengan Risalah DKO/Notula/LPKR yang menunjukkan adanya pembahasan Pemantauan Manajemen Risiko triwulanan)* (poin 10 (2,5 poin untuk setiap triwulan)).
 4. Penyampaian Laporan Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan tepat waktu (pada Aplikasi PERISKOP atau Nota Dinas kepada Kantor Wilayah bagi KPP, dan Direktorat KITSDA bagi Kanwil/Sekretaris Direktorat Jenderal/Direktorat/UPT)** (poin 4 (1 poin untuk setiap triwulan)).
 5. Jika tidak menyampaikan maka poin 0, menyampaikan namun terlambat poin 0,5 setiap triwulan.
- Realisasi Rencana Mitigasi Risiko
Pelaksanaan Rencana Mitigasi Risiko sampai dengan Triwulan Pemantauan (Poin 35 x persentase mitigasi risiko yang selesai dijalankan)

Penghitungan realisasi rencana mitigasi risiko berdasarkan laporan pemantauan triwulanan Manajemen Risiko sesuai dengan KMK-105/KMK.01/2022 dengan nilai maksimal untuk tiap rencana aksi sebesar 100%.

c. Formula IKU

Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko =
Indeks Implementasi Manajemen Kinerja + Indeks Implementasi Manajemen Risiko

d. Realisasi IKU

Data Realisasi IKU Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko s.d. Periode Triwulan IV Tahun 2024

Kode IKU	Nama Kanwil	Nama Unit	s.d Periode Tahun	Indeks Implementasi Manajemen Kinerja			Indeks Implementasi Manajemen Risiko	Realisasi	Target	Capaian
				Imbasan terkait Manajemen Kinerja	DKRO	Indeks Kualitas Pengelolaan Kinerja				
09c-N	Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara II	KPP Pratama Tebing Tinggi	TW_IV_2024	17.50	17.50	15.00	50.00	100.00	90.00	111.11%
09c-N	Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara II	KPP Pratama Kisaran	TW_IV_2024	17.50	15.00	15.00	50.00	98.50	90.00	109.44%
09c-N	Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara II	KPP Pratama Rantau Prapat	TW_IV_2024	17.50	17.50	14.51	50.00	99.51	90.00	110.57%
09c-N	Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara II	KPP Pratama PematangSiantar	TW_IV_2024	17.50	17.50	15.00	50.00	100.00	90.00	111.11%
09c-N	Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara II	KPP Pratama Padang Sidempuan	TW_IV_2024	17.50	17.50	13.69	50.00	98.69	90.00	109.65%
09c-N	Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara II	KPP Pratama Sibolga	TW_IV_2024	17.50	17.50	13.65	50.00	98.65	90.00	109.61%
09c-N	Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara II	KPP Pratama Belitang	TW_IV_2024	17.50	17.50	14.10	50.00	99.10	90.00	110.11%
09c-N	Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara II	KPP Pratama Kabanjahe	TW_IV_2024	17.50	17.50	14.78	50.00	99.78	90.00	110.86%

Sumber : Laporan NKO Triwulan IV 2024 KPP Pratama Sibolga

Realisasi IKU Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko sampai dengan akhir Desember 2024 tercatat sebesar 98.65 dari 90.00 dengan capaian sebesar 109.61 dari target dan realisasi yang telah ditetapkan. IKU ini merupakan iku baru sehingga tidak terdapat data pertumbuhan atau penurunan atas realisasinya.

- Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realiasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko	-	-	-	-	98.65

Sumber : Laporan Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Sibolga

Realisasi capaian IKU Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko pada tahun 2024 telah mencapai target yang ditetapkan dengan realisasi 99.78 dan indeks capaian 110.87.

- Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko	-	-	90	98.65

Sumber : Aplikasi Mandor tanggal 15 Januari 2025

Tercapainya target IKU Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko disebabkan karena pelaksanaan manajemen kinerja dan risiko yang cukup baik oleh Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal. Koordinasi antar seluruh pegawai juga menjadi alasan tercapainya iku ini karena implementasi manajemen kinerja merupakan bentuk optimalisasi sumber daya untuk meningkatkan kinerja organisasi dan pegawai dalam rangka mencapai tujuan organisasi, sedangkan manajemen risiko merupakan alat yang memonitoring pencapaian visi, misi, sasaran organisasi dan peningkatan kinerja.

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko	90	-	98.65

Sumber : Aplikasi Mandor tanggal 15 Januari 2025

Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko sampai dengan akhir Desember 2024 telah melampaui target yang telah ditetapkan. Hal ini berkat keberhasilan, kekompakan, dan koordinasi yang baik antar seluruh pegawai, dan juga perangkat manajemen kinerja dan risiko KPP Pratama Sibolga yang dalam pelaksanaan kegiatannya selama 2024 dinilai efektif.

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

a. Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi IKU ini. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, ialah pelaksanaan kegiatan manajemen kinerja seperti penyampaian imbauan manajemen kinerja setiap triwulan, pelaksanaan dialog kinerja organisasi setiap triwulan, dan rapat pemantauan MR setiap triwulan.

- b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja realisasi IKU ini. Hal-hal tersebut antara lain:

- a) Penyebab keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi IKU ini didominasi dengan pelaksanaan kegiatan manajemen kinerja dan manajemen risiko yang tepat waktu setiap triwulannya.
- b) Upaya yang dilakukan oleh KPP Pratama Sibolga ialah terus mempertahankan budaya pelaksanaan tepat waktu tersebut untuk maksimal skor yang menjadi dasar penilaian dalam IKU ini.

- c. Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian atas kinerja realisasi IKU ini dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Adapun langkah efisiensi yang dilakukan oleh KPP Pratama Sibolga adalah perangkat manajemen kinerja dan manajemen risiko dari submanajer, sampai dengan PIC dapat melakukan koordinasi dalam pelaksanaan agar selalu tepat waktu sesuai dengan kriteria poin penilaian.

- d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Keberhasilan pencapaian adalah dengan menyiasati pelaksanaan kegiatan agar selalu tepat waktu sesuai dengan kriteria poin penilaian.

- e. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

Untuk IKU ini dalam pelaksanaannya dilakukan tanpa mendokumentasikan mitigasi risikonya dalam Piagam Risiko Tahun 2024 lalu.

- f. Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Realisasi IKU ini dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh KPP Pratama Sibolga dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut ialah, pelaksanaannya yang setiap triwulan rawan alpa untuk dilakukan sehingga langkah yang diambil untuk mengatasi kendala adalah dengan membuat reminder dua minggu sebelum batas waktu, agar pelaksanaan tidak terlewat.

- g. Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat

IKU ini memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Untuk kontribusi terhadap Gender, pelaksanaannya melibatkan seluruh pegawai tanpa membedakan gender.

- h. Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

IKU ini memiliki kontribusi terhadap optimalisasi *Good Governance* yang menjunjung tinggi integritas serta sinergi yang baik khususnya dalam hal pencapaian visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak.

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan kegiatan pelaksanaan Imbauan Manajemen Kinerja tepat waktu; Melaksanakan kegiatan pelaksanaan DKRO tepat waktu. 	2025

▪ **IKU 10a-CP : Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran**

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
Target	100	100	100	100	100	100	100
Realisasi	100	120	120	109.13	120	120	120
Capaian	100.00	120.00	120.00	109.13	120.00	120.00	120.00

Sumber : Laporan Penjelasan Progress IKU Triwulan IV 2024 KPP Pratama Sibolga

a. Deskripsi Sasaran Strategis

Pengaturan yang dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi, akurasi, dan keteraturan dalam pengelolaan keuangan organisasi. Dengan fokus pada akuntabilitas, organisasi berkomitmen untuk mengimplementasikan praktik pengelolaan keuangan yang jelas dan terukur sehingga organisasi dapat

memastikan bahwa kebijakan dan keputusan keuangan diambil berdasarkan informasi yang dapat dipercaya.

b. Definisi IKU

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA. Ruang lingkup perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran dalam ketentuan pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7).

Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran merupakan hasil penjumlahan dari:

- a) 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran; dan
- b) 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran.

c. Formula IKU

Perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran ini mengacu pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7).			
Triwulan I, Triwulan II = 100% = nilai IKPA dengan target 95,0			
Formula Tw I, dan II			
Realisasi IKPA/95,0			
Triwulan III dengan Indeks sebagai berikut:			
Indeks	Kriteria		
120	Realisasi IKPA \geq 98,00		
$100 < X < 120$	$100 + (\text{Realisasi IKPA} - 95) : 0,15 * (95 < x < 98)$		
100	Realisasi IKPA = 95		
$80 < X < 100$	$80 + (\text{Realisasi IKPA} - 85) : 0,5 ** (85 < x < 95)$		
80	Realisasi IKPA = 85		
79.9	Realisasi IKPA < 85		
*Koefisien 0,15 = (Realisasi IKPA capaian 120 - Target IKPA) / (indeks capaian 120 - indeks capaian sesuai target) = (98-95) / (120-100) ** Koefisien 0,5 = (Target IKPA - Realisasi IKPA capaian 80) / (indeks capaian target - indeks capaian 80) = (95-85) / (100-80)			
Triwulan IV = (50% x SMART + 50% x IKPA) dengan nilai NKA target 91,0 (indeks 100), dengan indeks sebagai berikut:			
Indeks	Kriteria		
120	Realisasi NKA \geq 95,00		
$100 < X < 120$	$100 + (\text{Realisasi} - 91) : 0,2 * (91 < x < 95)$		
100	Realisasi NKA = 91		
$80 < X < 100$	$80 + (\text{Realisasi NKA} - 80) : 0,55 ** (80 < x < 91)$		
80	Realisasi NKA = 80		
79.9	Realisasi NKA < 80		
* Koefisien 0,2 = (Realisasi NKA Capaian 120 - Target NKA) / (indeks capaian 120 - indeks capaian sesuai target) = (95-91) / (120-100) ** Koefisien 0,55 = (Target NKA - Realisasi NKA Capaian 80) / (indeks capaian target - indeks capaian 80) = (91-80) / (100-80)			

d. Realisasi IKU

NO	KODE KPPN	KODE BA	KODE SATKER	URAIAN SATKER	KETERANGAN	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN		KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN			KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN		NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	DISPENSASI SPM (PENGURANG)	NILAI AKHIR (NILAI TOTAL/KONVERSI BOBOT)
						REVISI DIPA	DEVIASI HALAMAN III DIPA	PENYERAPAN ANGGARAN	BELANJA KONTRAKTUAL	PENYELESAIAN TAGIHAN	PENGELOLAAN UP DAN TUP	CAPAIAN OUTPUT				
1	106	015	635926	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SIBOLGA	Nilai	100.00	93.23	93.56	0.00	0.00	100.00	100.00	77.70	80%	0.00	97.12
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.98	18.71	0.00	0.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	96.62			96.78		100.00					

Sumber : Aplikasi SMART DJA

Realisasi IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran sampai dengan akhir Desember 2024 tercatat sebesar 120.00 dari 100.00 dengan capaian sebesar 120.00 dari target dan realisasi yang telah ditetapkan.

- Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realiasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	92.16%	94.59%	95.64%	117.68	120

Sumber : Laporan Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Sibolga

Realisasi capaian IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran mengalami kenaikan setiap tahunnya. Realisasi IKU ini tahun 2024 telah mencapai realisasi maksimal sebesar 120 dengan indeks capaian 120.

- Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	-	-	100	120

Sumber : Aplikasi Mandor tanggal 15 Januari 2025

Tercapainya target IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran disebabkan karena pelaksanaan pengelolaan anggaran yang baik dari tim keuangan Subbagian

Umum dan Kepatuhan Internal. Koordinasi antar seluruh perangkat dari mulai KPA, PPK, PPSPM, PBJ, Bendahara, PPABP, BMN, dan staf PPK menjadikan terpenuhinya realisasi pencapaian target tersebut.

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	-	120

Sumber : Aplikasi Mandor tanggal 15 Januari 2025

Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran dapat terpenuhi karena pelaksanaan pengelolaan anggaran yang baik dari tim keuangan Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal yang melakukan koordinasi antar seluruh perangkat dari mulai KPA, PPK, PPSPM, PBJ, Bendahara, PPABP, BMN, dan staf PPK.

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

a. Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi IKU ini. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, ialah pelaksanaan koordinasi yang baik antar seluruh perangkat dari mulai KPA, PPK, PPSPM, PBJ, Bendahara, PPABP, BMN, dan staf PPK.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja realisasi IKU ini. Hal-hal tersebut antara lain:

a) Penyebab keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi IKU ini didominasi dengan pelaksanaan koordinasi yang baik antar seluruh perangkat dari mulai KPA, PPK, PPSPM, PBJ, Bendahara, PPABP, BMN, dan staf PPK.

b) Upaya yang dilakukan oleh KPP Pratama Sibolga ialah terus mempertahankan sinergi yang telah terbangun sangat baik dalam tim keuangan.

c. Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian atas kinerja realisasi IKU ini dilakukan dengan melakukan koordinasi yang antar seluruh perangkat dari mulai KPA, PPK, PPSPM, PBJ, Bendahara, PPABP,

BMN, dan staf PPK secara penuh sehingga seluruh kegiatan keuangan/anggaran dalam terlaksana sesuai dengan amanah penggunaan DIPA.

- d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Keberhasilan pencapaian adalah dengan menyiasati pelaksanaan seperti salah satu yang paling rawan adalah realisasi perencanaan RPD setiap triwulan, yang dilaksanakan agar sesuai dengan penetapan yang dilakukan sebelumnya. Hal ini dilakukan dengan cara melakukan perencanaan belanja yang baik di awal tahun sehingga kegiatan-kegiatan tersebut dapat terlaksana sesuai dengan perencanaan dan skor yang didapat menjadi tinggi (selisih deviasi kecil antara perencanaan belanja dan realisasi belanja).

- e. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

Mitigasi risiko atas IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran pada tahun 2024 yaitu melakukan rapat tim pengelola keuangan untuk membahas perencanaan anggaran dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama tahun berjalan.

- f. Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Realisasi IKU ini dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh KPP Pratama Sibolga dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut ialah, melakukan perencanaan kegiatan yang akan dilakukan belanja agar selisih deviasi pada RPD tidak terlalu jauh, melakukan pengisian capaian output rutin di awal bulan, serta melaksanakan kegiatan administrasi keuangan seperti penyampaian LPJ, pengelolaan TUP, dan lain nya tepat waktu.

- g. Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat

IKU ini memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Untuk kontribusi terhadap Gender, pelaksanaannya melibatkan seluruh pegawai tanpa membedakan gender.

- h. Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

IKU ini memiliki kontribusi terhadap optimalisasi pengelolaan DIPA yang tidak berlebihan dengan memanfaatkan yang telah diberikan.

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none">• Melaksanakan kegiatan penganggaran sesuai ketentuan;• Melaksanakan penyusunan dokumen revisi anggaran.	2025

B. Realisasi Anggaran

Pada Tahun Anggaran 2024, KPP Pratama Sibolga memperoleh anggaran melalui DIPA sebanyak Rp8.283.546.000 (delapan miliar dua ratus delapan puluh tiga juta lima ratus empat puluh enam ribu rupiah) untuk memenuhi output dan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi KPP Pratama Sibolga sebagai unit vertikal di bawah Direktorat Jenderal Pajak.

Realisasi belanja KPP Pratama Sibolga Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp7.628.916.042 atau 92.10% dari total anggaran, dengan demikian pelaksanaan anggaran yang optimal sebagai salah satu Sasaran Strategis KPP Pratama Sibolga sudah tercapai.

Berikut ini uraian output belanja KPP Pratama Sibolga Tahun Anggaran 2024.

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
JUMLAH SELURUHNYA	8,283,546,000	0	6,574,853,935	1,054,062,107	7,628,916,042	92.10 %	654,629,958
CC Program Pengelolaan Penerimaan Negara	2,205,108,000	0	1,770,856,846	238,306,057	2,009,162,903	91.11 %	195,945,097
CC.4791 Ekstensifikasi Penerimaan Negara	799,911,000	0	694,486,400	59,421,800	753,908,200	94.25 %	46,002,800
BMA Data dan Informasi Publik	799,911,000	0	694,486,400	59,421,800	753,908,200	94.25 %	46,002,800
BMA.004 Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan dalam rangka ekstensifikasi	223,011,000	0	196,112,286	24,901,200	221,013,486	99.10 %	1,997,514
BMA.005 Formulir Kegiatan Pengumpulan Data	576,900,000	0	498,374,114	34,520,600	532,894,714	92.37 %	44,005,286
CC.4792 Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi	777,156,000	0	566,377,377	84,001,119	650,378,496	83.69 %	126,777,504
BMB Komunikasi Publik	777,156,000	0	566,377,377	84,001,119	650,378,496	83.69 %	126,777,504
BMB.003 Layanan dan Konsultasi Perpajakan	163,684,000	0	97,764,770	6,699,462	104,464,232	63.82 %	59,219,768
BMB.005 Layanan Penyuluhan dan Kehumasan Perpajakan	613,472,000	0	468,612,607	77,301,657	545,914,264	88.99 %	67,557,736
CC.4794 Pengawasan dan Penegakan Hukum	628,041,000	0	509,993,069	94,883,138	604,876,207	96.31 %	23,164,793
BCE Penanganan Perkara	145,683,000	0	98,101,016	36,942,400	135,043,416	92.70 %	10,639,584
BCE.001 Dokumen Penagihan Aktif	145,683,000	0	98,101,016	36,942,400	135,043,416	92.70 %	10,639,584
BIG Pemeriksaan dan Audit Penerimaan	482,358,000	0	411,892,053	57,940,738	469,832,791	97.40 %	12,525,209
BIG.003 Laporan Hasil Pemeriksaan Perpajakan	202,000,000	0	181,508,763	19,203,000	200,711,763	99.36 %	1,288,237
BIG.004 Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan Dalam Rangka Pengawasan	243,715,000	0	199,446,290	37,437,738	236,884,028	97.20 %	6,830,972
BIG.005 Laporan Penilaian	36,643,000	0	30,937,000	1,300,000	32,237,000	87.98 %	4,406,000
WA Program Dukungan Manajemen	6,078,438,000	0	4,803,997,089	815,756,050	5,619,753,139	92.45 %	458,684,861
WA.4707 Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	5,370,953,000	0	4,178,402,089	741,718,050	4,920,120,139	91.61 %	450,832,861
EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	5,030,589,000	0	4,061,274,889	518,530,150	4,579,805,039	91.04 %	450,783,961
EBA.001 Kerumahtanggaan	829,122,000	0	737,622,941	39,042,650	776,665,591	93.67 %	52,456,409
EBA.994 Layanan Perkantoran	4,201,467,000	0	3,323,651,948	479,487,500	3,803,139,448	90.52 %	398,327,552
EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal	340,364,000	0	117,127,200	223,187,900	340,315,100	99.99 %	48,900
EBB.002 Peralatan Fasilitas Perkantoran	151,575,000	0	117,127,200	34,398,900	151,526,100	99.97 %	48,900
EBB.004 Gedung/Bangunan	188,789,000	0	0	188,789,000	188,789,000	100.00 %	0

Sumber : OMSPAN

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
WA.4708 Pengelolaan Organisasi dan SDM	707,485,000	0	625,595,000	74,038,000	699,633,000	98.89 %	7,852,000
EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	707,485,000	0	625,595,000	74,038,000	699,633,000	98.89 %	7,852,000
EBA.994 Layanan Perkantoran	707,485,000	0	625,595,000	74,038,000	699,633,000	98.89 %	7,852,000

Sumber : OMSPAN

C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Adapun bentuk efisiensi penggunaan sumber daya pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sibolga selama tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Efisiensi Anggaran

KPP Pratama berhasil mengelola anggaran operasional secara optimal dengan memprioritaskan alokasi dana pada kegiatan strategis, seperti pelayanan dan edukasi perpajakan.

2. Efisiensi Sumber Daya Manusia

Dalam bidang sumber daya manusia, efisiensi dicapai melalui pengelolaan tugas yang lebih terfokus sesuai kebutuhan organisasi sesuai dengan laporan analisis beban kerja KPP Pratama Sibolga tahun 2024.

3. Efisiensi Organisasi

Struktur organisasi KPP Pratama terus disesuaikan untuk menyederhanakan proses pelayanan kepada wajib pajak. Perampingan alur kerja tersebut dilaksanakan pada berbagai pelayanan seperti percepatan proses pemindahbukuan, permohonan PKP, pemindahan WP, dan lain-lain.

4. Efisiensi Penggunaan/Pemanfaatan Aset

Inventarisasi aset dilakukan secara berkala untuk memastikan semua aset, seperti peralatan kerja, ruang kantor, dan kendaraan operasional, dimanfaatkan secara optimal. Aset yang tidak produktif telah dialihkan untuk status idle atau proses lelang.

5. Efisiensi Teknologi Informasi

Implementasi teknologi informasi berbasis digital, seperti *e-filing*, *e-billing*, dan *e-registration* dalam pelaksanaan pemberian layanan Wajib Pajak juga telah turut diterapkan oleh KPP Pratama Sibolga.

BAB IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sibolga Tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pada Tahun Anggaran 2024 yang disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pelaksanaan tugas KPP Pratama Sibolga dilaksanakan dalam 10 sasaran strategis dan 20 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah dilaksanakan dengan baik dan cukup memuaskan di tahun 2024. Berdasarkan analisis dari keseluruhan IKU Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sibolga yaitu terdapat sebanyak 18 IKU berstatus hijau, 1 IKU berstatus kuning, dan 1 IKU berstatus merah. Realisasi kinerja ini dievaluasi sehingga apabila ada hal-hal yang menyebabkan target tidak tercapai secara optimal dapat dibuatkan inisiatif strategi demi perbaikan kinerja di kemudian hari untuk mencegah terulangnya kejadian yang sama. Beberapa upaya yang telah dilakukan KPP Pratama Sibolga dalam mengatasi masalah/hambatan selama tahun 2024 diantaranya:

1. Optimalisasi penerimaan pajak dengan melakukan forum diskusi Wajib Pajak
2. Melakukan analisis dinamisasi PPh Pasal 25 dengan memantau perkembangan usaha WP melalui SPT masa PPN, pengamatan internet, media massa dan sumber lainnya.
3. Penyusunan komponen DSP4 melalui pelaksanaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak
4. Penyelesaian SP2DK Outstanding dan LHP2DK
5. Pemeriksaan Wajib Pajak Group
6. Pengawasan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan
7. Monitoring penerimaan PPM dan PKM secara rutin dari DRM DJP

Penyusunan LAKIN ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan. baik kepada Pimpinan Direktorat Jenderal Pajak maupun seluruh pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi KPP Pratama Sibolga selaku unit operasional Direktorat Jenderal Pajak sehingga dapat memberikan umpan balik bagi peningkatan kinerja pada periode berikutnya.

LAMPIRAN

Adapun turut dilampirkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sibolga Nomor PK-8/WPJ.26/2024 tanggal 31 Januari 2024 dan Sasaran Kinerja Pegawai Pendekatan Hasil Kinerja Kuantitatif bagi Pejabat Pimpinan Tinggi dan Pimpinan Unit Kerja Mandiri, sebagai berikut.